



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR **SK.260 / BPSDMP-2020**

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2002-2024 perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
15. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2007 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Penetapan Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA termuat Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA yang di dalamnya terdapat data dan informasi kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra.
- KEEMPAT : Indikasi target dan pendanaan Renstra dapat dimutakhirkan melalui RKP dan Renja serta dapat ditinjau kembali dalam kondisi tertentu sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dengan pertimbangan kesiapan dan kapasitas pelaksanaan, ketersediaan sumber pendanaan, keterlibatan peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, serta masyarakat.

- KELIMA : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap implementasi Renstra di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan sesuai dengan kewenangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor SK.298/BPSDMP-2018 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2015-2019 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta

pada tanggal 7 DESEMBER 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

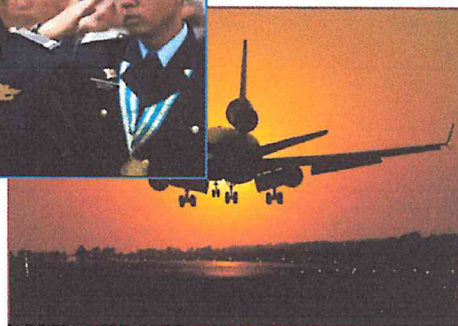


Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.



RENCANA STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM
PERHUBUNGAN**

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

JL. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini merupakan gambaran suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang ada.

Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan ini mengacu dan sejalan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 .

Semoga Renstra Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 dapat dijadikan panduan, acuan dan pedoman pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 yang mendukung Visi dan Misi Presiden Terpilih, dan dasar dalam melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan monitoring dalam capaian kinerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Perhubungan Tahun 2020-2024.

Jakarta, 7 Desember 2020

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Ir. SUGIHARDJO, MSI

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19610224 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	17
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN	53
2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024	53
2.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	60
2.3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BPSDM PERHUBUNGAN	67
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	94
3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020- 2024	94
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	101
3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024	106
3.4 KERANGKA REGULASI BPSDM PERHUBUNGAN	111
3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN BPSDM PERHUBUNGAN	117
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	121
4.1 TARGET KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024	121
4.2 KERANGKA PENDANAAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 2020-2024	143
BAB 5 PENUTUP	168
5.1 KESIMPULAN	168
5.2 ARAHAN PELAKSANAAN	168
5.3 MEKANISME EVALUASI DAN PERUBAHAN	169
LAMPIRAN	170

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
- LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan.....	1
Tabel 1.2 Realisasi Penyerapan DIPA Periode Tahun 2015-2019	4
Tabel 1.3 Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2015-2019	9
Tabel 1.4 Uraian Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2015-2019.....	10
Tabel 1.5 Keterangan Lanjutan dari Capaian Kinerja BPSDMP Tahun 2015-2019	12
Tabel 1.6 Kegiatan yang tidak terlaksana BPSDMP Tahun 2015-2019.....	104
Tabel 1.7 Permasalahan Pelaksanaan Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2015-2019	17
Tabel 1.8 Capaian Kontribusi Antar Pulau Pada RPJMN Periode 2015-2019	18
Tabel 1.9 Perkembangan <i>Supply and Demand</i> SDM Transportasi per Sub Sektor, 2019	26
Tabel 1.10 Target Penyerapan lulusan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor.....	29
Tabel 1.11 Realisasi Jumlah Peserta dan Lulusan Peserta Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekertariat BPSDM Perhubungan dan Pusbang Aparatur Perhubungan (Orang).....	31
Tabel 1.12 Realisasi Jumlah Peserta dan Lulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor.....	32
Tabel 1.13 Capaian Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat BPSDM Perhubungan.....	35
Tabel 1.14 Jumlah Tenaga Pendidik di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor.....	38
Tabel 1.15 Prasarana Eksisting di Lingkungan BPSDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor.....	39
Tabel 1.16 Sarana Eksisting di Lingkungan BPSDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor.....	40
Tabel 1.17 Perubahan Kelembagaan Diklat di Lingkungan BPSDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor.....	42
Tabel 1.18 Komposisi Pegawai BPSDM Perhubungan	47
Tabel 1.19 Laporan Posisi Barang Milik Negara BPSDM Perhubungan.....	48
Tabel 1.20 Analisa SWOT BPSDMP.....	48
Tabel 1.21 Komulatif Lokasi Kerja Lulusan Lembaga Diklat BPSDM Perhubungan Tahun 2015-2019	50
Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024.....	56

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Kementerian Perhubungan 2020-2024	62
Tabel 2.5 Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan melalui misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kemenhub..	65
Tabel 2.6 <i>Customer Perspective</i> BPSDMP 2020-2024	70
Tabel 2.7 <i>Perspective Internal Bussiness Process</i> BPSDMP 2020-2024.....	71
Tabel 2.8 <i>Perspective Learn & Growth</i> BPSDMP 2020-2024.....	71
Tabel 2.9 Indikator Kinerja BPSDMP 2020-2024	73
Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024	94
Tabel 3.2 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan periode tahun 2020-2024	102
Tabel 3.3 Indikasi Kegiatan Strategis BPSDM Perhubungan Peride Tahun 2020-2024	109
Tabel 3.4 Mandat Penguatan Regulasi dalam Pengembangan SDM Perhubungan.....	114
Tabel 4.1 Target kinerja sasaran Program Pengembangan SDM Perhubungan 2020-2024.....	123
Tabel 4.2 Target Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 (Volume)	124
Tabel 4.3 Kebutuhan Pendanaan Program Pengembangan SDM Perhubungan 2020-2024	144
Tabel 4.4 Rekap Pendanaan BPSDM Perhubungan tahun 2020-2024	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Mitra Kerjasama yang telah terjalin	27
Gambar 2.1 Tujuh Agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024	56
Gambar 2.2 Fokus Utama Kementerian Perhubungan	64
Gambar 2.3 Peta Strategi Kementerian Perhubungan	65
Gambar 2.4 Laporan Posisi Barang Milik Negara BPSDM Perhubungan.....	72
Gambar 3.1 Kerangka Regulasi Pengembangan SDM Transportasi	111
Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan Pengembangan SDM Transportasi	117
Gambar 3.3 Pemanfaatan UPT Diklat BPSDM Perhubungan	118
Gambar 4.1 Skema Pendanaan BPSDMP Tahun 2020-2024.....	143

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 Konteks Penyusunan Dokumen

Berdasarkan pemahaman atas pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Periode Tahun 2020-2024 dapat diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (jangka waktu 5 tahunan, yakni untuk periode 2020-2024) untuk melaksanakan pembangunan di sektor yang menjadi tugas dan kewenangan BPSDM Perhubungan sesuai Permen No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan untuk periode yang bersangkutan periode tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

1.1.1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan

Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan telah diatur dalam Pasal 784, 785, 786, 787 dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan seperti yang akan disampaikan pada **Tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Struktur Organisasi BPSDM Perhubungan

No.	Aspek Pengaturan	Pengaturan dalam PM 122 Tahun 2018
1	Kedudukan BPSDM (Pasal 784)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan BPSDM Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.
2	Tugas BPSDM (Pasal 785)	Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan (Pasal 786)	a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; b. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi; d. Pelaksanaan administrasi BPSDM Perhubungan; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
4	Struktur Organisasi (Pasal 787)	a. Sekretariat Badan; b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat; c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut; d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Sumber:PM 122/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Dalam kaitannya dengan Dokumen Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024 ini, maka Renstra harus mencakup upaya dari seluruh unit organisasi di lingkungan BPSDM Perhubungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sedemikian sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun pemanfaatan hasil kegiatan tersebut (*outcome/impact*) dalam kerangka program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan yang sesuai dengan target pembangunan nasional yang diembankan kepada BPSDM Perhubungan.

1.1.1.2 Posisi dan Fungsi Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024

Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024 dapat diartikan sebagai rumusan rencana BPSDM Perhubungan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya agar peran SDM Perhubungan sesuai Pasal 785 dan Pasal 786 Peraturan Menteri Perhubungan No. 122 Tahun 2018 dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional pada periode tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode Tahun 2020-2024.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan, maka Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024 merupakan bagian (pendetailan) dari Renstra Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2020-2024 terutama dalam menjalankan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) Perhubungan. Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024 memiliki fungsi sebagai arah dan pedoman bagi:

- Pelaksanaan program pengembangan SDM Perhubungan selama 5 tahun ke depan (periode tahun 2020-2024) khususnya yang menjadi kewenangan Unit Eselon I.
- Penyusunan Renstra 2020-2024 untuk Unit Eselon II Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPSDM Perhubungan;
- Penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diantaranya dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (PK) dan revidenya, Rencana Aksi Atas PK, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan BPSDM Perhubungan selama periode tahun 2020-2024.

1.1.2 Pelaksanaan Renstra BPSDM Perhubungan Periode 2015-2019

Pada bagian ini disampaikan hasil pelaksanaan program pengembangan SDM Perhubungan oleh BPSDM Perhubungan selama periode Renstra Tahun 2015-2019. Hasil evaluasi ini menjadi pijakan dalam penyusunan Renstra BPSDM Perhubungan periode tahun 2020-2024.

1.1.2.1 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran

Perubahan pagu anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan instruksi Presiden dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja, sehingga besaran pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) mengalami perubahan dari angka yang diajukan. Realisasi penyerapan Pagu DIPA Badan Pengembangan SDM Perhubungan setelah adanya penghematan, pemotongan dan/atau penambahan periode tahun 2015-2019 berdasarkan rincian realisasi per jenis belanja akan disampaikan pada **Tabel 1.2**.

Tabel 1.2 Realisasi Penyerapan DIPA Periode Tahun 2015-2019

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2015				Tahun Anggaran 2016			
	Pagu Awal Anggaran (Rp.)	Pagu Dana Setelah Revisi (Rp.) ¹⁾	Realisasi (Rp.)	Presentase Keuangan (%)	Pagu Awal Anggaran (Rp.)	Pagu Dana Setelah Revisi (Rp.) ²⁾	Realisasi (Rp.)	Presentase Keuangan (%)
Belanja Pegawai	342.042.984.000	348.388.168.000	280.506.597.242	80,52%	342.042.984.000	346.172.838.000	286.016.875.896	82,62%
Belanja Barang	1.982.974.695.000	2.173.587.952.000	1.710.263.001.017	78,68%	2.267.241.642.000	2.198.267.838.000	1.812.308.880.353	82,44%
Belanja Modal	1.648.667.552.000	2.010.906.128.000	1.779.969.792.388	88,52%	2.888.246.670.000	2.433.851.229.000	2.353.845.671.515	96,71%
Total	3.973.685.231.000	4.532.882.248.000	3.770.739.390.647	83,19%	5.497.531.296.000	4.978.291.905.000	4.452.171.427.764	89,43%

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2017				Tahun Anggaran 2018			
	Pagu Awal Anggaran (Rp.)	Pagu Dana Setelah Revisi (Rp.) ²⁾	Realisasi (Rp.)	Presentase Keuangan (%)	Pagu Awal Anggaran (Rp.)	Pagu Dana Setelah Revisi (Rp.) ⁴⁾	Realisasi (Rp.)	Presentase Keuangan (%)
Belanja Pegawai	359.980.856.000	354.501.951.000	277.471.434.623	78,27%	371.140.263.000	371.900.583.000	306.383.777.196	82,38%
Belanja Barang	2.365.232.191.000	2.156.871.094.000	1.873.898.851.678	86,88%	3.246.566.457.000	3.254.724.180.000	2.725.620.585.848	83,74%
Belanja Modal	1.622.652.121.000	1.727.162.342.000	1.654.216.700.058	95,78%	909.789.287.000	1.020.452.523.000	925.586.092.319	90,70%
Total	4.347.865.168.000	4.238.535.387.000	3.805.586.986.359	89,79%	4.527.496.007.000	4.647.077.286.000	3.957.590.455.363	85,16%

Jenis Belanja	Tahun Anggaran 2019			
	Pagu Awal Anggaran (Rp.)	Pagu Dana Setelah Revisi (Rp.) ²⁾	Realisasi (Rp.)	Presentase Keuangan (%)
Belanja Pegawai	359.980.856.000	326.189.204.000	17.926.927.262	97,47
Belanja Barang	2.365.232.191.000	3.267.241.979.000	3.091.332.521.969	94,62
Belanja Modal	1.622.652.121.000	298.724.224.000	293.497.417.359	98,25
Total	4.347.865.168.000	3.892.155.407.000	3.702.756.866.590	95,13

Sumber: diolah dari LAKIP BPSDM Perhubungan 2015-2019

Keterangan:

- ¹⁾ Adanya Perubahan Target BLU/PNBP
- ²⁾ INPRES 4/2016 tentang Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, Adanya penambahan anggaran terkait APBN-P, PNBP dan BLU sebesar Rp 502.632.694.000, INPRES 8/2016 untuk melakukan penghematan dengan melakukan blokir mandiri (*Self Blocking*) sebesar Rp. 670.154.522.000
- ³⁾ INPRES 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sehingga adanya pemotongan anggaran sebesar Rp 385.005.000 dan penambahan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp. 73.841.830.000
- ⁴⁾ INPRES 4/2018 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sehingga adanya penambahan pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp. 119.581.279.000 yang terdiri atas penggunaan saldo BLU sebesar Rp 103.702.775.00 dan penambahan pagu dari terlewatnya pencapaian target penerimaan sebesar Rp 15.878.504.000

1.1.2.2 Keluaran (*Output*) Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1.3 menyampaikan keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang terlingkupi dalam program pengembangan SDM Perhubungan selama periode Renstra Tahun 2015-2019. Hasil evaluasi dari Pelaksanaan Kegiatan hingga akhir 2019 prestasi pelaksanaan kegiatan BPSDM Perhubungan mencapai 165% dari Renstra Periode 2015-2019. Terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya di atas target, khususnya pelaksanaan diklat masyarakat, aparatur, pembentukan, dan penjenjangan. Beberapa kegiatan tidak mencapai target diantaranya: pengadaan sarana prasarana, penyusunan kurikulum dan silabi, tenaga kependidikan, sistem informasi.

1.1.2.3 *Outcome* Kinerja BPSDM

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, Renstra BPSDM Perhubungan 2020-2024 perlu memperhatikan berbagai capaian dan permasalahan yang terjadi pada periode renstra sebelumnya, yakni periode tahun 2015-2019. Tinjauan terhadap renstra sebelumnya diperlukan untuk mengetahui kondisi pencapaian kinerja pada tahun dasar (*baseline*) serta mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada periode renstra sebelumnya.

Dalam Renstra BPSDM Perhubungan periode tahun 2015-2019 telah dirumuskan sasaran strategis serta indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang termuat dalam dokumen Renstra BPSDM Perhubungan periode tahun 2015-2019 meliputi:

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Peserta Diklat SDM Perhubungan Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Rohani Yang Prima” dengan indikator kinerja Jumlah Peserta Diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan.
2. Sasaran strategis “Terwujudnya Lulusan Diklat SDM Perhubungan Yang Bersertifikat” dengan indikator kinerja Jumlah Lulusan Diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Kompeten Yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan, Setiap Tahun Sesuai Standar Kompetensi.
3. Sasaran strategis “Terlaksananya Lulusan Diklat SDM Perhubungan Yang Prima, Profesional dan Beretika” dengan indikator kinerja Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Perhubungan.
4. Sasaran strategis “Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK” dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah Kurikulum, Silabi Diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi.

- b. Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi.
5. Sasaran strategis “Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional” dengan indikator kinerja Jumlah Penelitian Oleh Tenaga Pengajar Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional.
6. Sasaran strategis Terlaksananya Pengabdian Masyarakat oleh Lembaga Diklat dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat dibawah lingkungan BPSDM Perhubungan.
7. Sasaran strategis Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition* Serta *Public Private Partnership* dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional atau Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition* serta *Public Private Partnership*.
 - a. Sasaran strategis Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDM Perhubungan dengan indikator kinerja,yakni: Nilai AKIP BPSDM Perhubungan, Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan, dan Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP
8. Sasaran strategis Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Perhubungan yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional dengan indikator kinerja Jumlah Draft Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya Yang Dihasilkan.
9. Sasaran strategis Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Diklat SDM Perhubungan dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah Sarana Diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir
 - b. Jumlah Prasarana Baru Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Dibangun
10. Sasaran strategis Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Perhubungan Yang Kompeten dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Jumlah Pendidik Diklat SDM Perhubungan Bersertifikat Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya
 - b. Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat SDM Perhubungan Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya

Hasil evaluasi dari Capaian Sasaran Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2017-2019 (IKU Penyerapan lulusan baru muncul pada tahun 2017) yakni Tingkat rata-rata penyerapan lulusan diklat transportasi relatif tinggi sekitar 88,367%, dimana Realisasi jumlah peserta dan rata-rata jumlah lulusan diklat BPSDM Perhubungan tahun 2015-2019 relatif sangat tinggi sekitar 91,9 %, khususnya disokong oleh pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat. Jumlah pembentukan BLU di BPSDM Perhubungan merupakan yang terbesar di lingkungan Kemeterian Perhubungan. Hasil capaian kinerja BPSDM Perhubungan periode tahun 2015-2019 sesuai sasaran dan indikator kinerja utama yang termuat dalam renstra disampaikan secara detail pada **Tabel 1.3** dan **Tabel 1.4**.

Tabel 1.3 Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET RENSTRA 2015-2019	TARGET				
						2015	2016	2017	2018	2019
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Rohani Yang Prima	1	Jumlah Peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, Tahunan Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	Orang	1,448,642	292,69	464,5	414,4	564,73	287,68
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat	2	Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Kompeten Yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan, Setiap Tahun Sesuai Standar Kompetensi	Orang	1,420,238	281,2	450,66	391,97	535,15	209
c	Terlaksananya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika	3	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi	%	85	-	-	80	82.5	85
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK	4	Jumlah Kurikulum, Silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi	Dokumen	332	147	97	5	14	69
		5	Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi	Dokumen	952	244	233	184	154	137
e	Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional	6	Jumlah Penelitian Oleh Tenaga Pengajar Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional	Dokumen	170	-	-	51	67	77
f	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat oleh Lembaga Diklat	7	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan	Kegiatan	142	-	-	40	53	45
g	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership	8	Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional atau Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition serta Public Private Partnership	Dokumen	670	38	189	192	170	81
h	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDM Perhubungan	9	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan	Nilai	90	87	86	82.6	89.5	90
		10	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan	(%)	94	89.25	95.12	92.84	91	94
		11	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	-	-	2	2	3
i	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional	12	Jumlah Draft Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya Yang Dihasilkan	Dokumen	69	15	26	9	12	7
j	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Diklat SDM Transportasi	13	Jumlah Sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	Unit	6,623	845	2,067	936	781	1,994
		14	Jumlah Prasarana Baru Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Dibangun	M ²	1,173,611	253,143.70	436,604.20	123,07	88,055	272,74
k	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Kompeten	15	Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi Bersertifikat Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya	Orang	11,2	3,544	3,291	1,459	1,353	1,553
		16	Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya	Orang	8,6			1,68	1,861	5,059

Tabel 1.4 Uraian Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Tahun 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET RENSTRA 2015-2019	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			
					TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Rohani Yang Prima	1	Jumlah Peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	Orang	1.448.642	292.693	463.061	158,21	464.495	622.198	133,95	414.400	395.822	95,52	564.732	422.895	74,88	520.880	548.281	105,26
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat	2	Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Kompeten Yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan, Setiap Tahun Sesuai Standar Kompetensi	Orang	1.420.238	281.204	448.901	159,64	450.655	601.543	133,48	391.974	378.912	96,67	535.146	395.374	73,88	500.034	526.812	105,36
c	Terlaksananya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika	3	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi	%	85	-	-	-	-	-	-	80,00	79,86	99,83	82,50	92,88	112,58	85,00	92,36	108,66
		4	Jumlah Kurikulum, Silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi	Dokumen	332	147	164	111,56	97	54	55,67	5	10	200,00	14	27	192,86	22	27	122,73
		5	Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi	Dokumen	952	244	514	210,66	233	243	104,29	184	255	138,59	154	154	100,00	156	127	81,41
e	Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional	6	Jumlah Penelitian Oleh Tenaga Pengajar Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional	Dokumen	170	-	-	-	-	-	-	51	71	139,22	67	153	228,36	187	236	126,20
f	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat oleh Lembaga Diklat	7	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan	Kegiatan	142	-	-	-	-	-	-	40	42	105,00	53	50	94,34	122	129	105,74
g	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership	8	Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional atau Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition serta Public Private Partnership	Dokumen	670	38	105	276,32	189	228	120,63	192	388	202,08	170	372	218,82	212	304	143,40
h	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan	9	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan	Nilai	90	87,00	90,46	103,98	86,00	77,74	90,40	82,60	82,60	100,00	89,50	89,50	100,00	83,00	82,74	99,69
		10	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan	(%)	94	89,25	83,19	93,21	95,12	89,43	94,02	92,84	89,79	96,71	91,00	85,16	93,58	90,00	95,24	105,82

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET RENSTRA 2015-2019	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
						TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDM Perhubungan	11	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	-	-	-	-	-	-	3,00	3,19	106,40	2,00	3,19	159,50	3,00	3,19	106,40
i	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional	12	Jumlah Draft Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya Yang Dihasilkan	Dokumen	69	15	35	233,33	26	12	46,15	9	9	100,00	12	12	100,00	15	15	100,00
j k	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Diklat SDM Transportasi Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Kompeten	13	Jumlah Sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	Unit	6.623	845	1.113	131,72	2.067	1886	91,24	936	946	101,07	781	1.341	171,70	311	310	99,68
		14	Jumlah Prasarana Baru Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Dibangun	M ²	1.173.611	253.143,70	254.521,22	100,54	436.604,20	435.915,20	99,84	123.071	134.521	109,30	88.055	81.085	92,08	57.363	26.917	46,92
		15	Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi Bersertifikat Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya	Orang	11.200	3.544	2.568	72,46	3.291	3.158	95,96	1.459	1.279	87,66	1.353	1.274	94,16	1.248	1.195	95,75
		16	Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya	Orang	8.600							1.680	1.606	95,60	1.861	1.850	99,41	2.164	2.225	102,82

Sumber: Lakip BPSDMP 2015-2019

Tabel 1.5 Keterangan Lanjutan dari Capaian Kinerja BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2015-2019

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET RENSTRA 2015-2019	REALISASI 2015- 2019	%	KETERANGAN
							REALISASI	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Rohani Yang Prima	1	Jumlah Peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, Pertahun Sesuai Standar Diklat BPSDM Perhubungan	Orang	1.448.642	2.452.257	169,28	Sebagaian besar Lembaga diklat di Lingkungan BPSDM telah memiliki sertifikasi internasional dan akreditasi nasional (Tabel 1.13)
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat	2	Jumlah Lulusan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Kompeten Yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan, Setiap Tahun Sesuai Standar Kompetensi	Orang	1420238	2.351.542	165,58	
c	Terlaksananya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika	3	Prosentase Penyerapan Lulusan Diklat SDM Transportasi	%	85	88,3667%	100%	
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK	4	Jumlah Kurikulum, Silabi Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi	Dokumen	332	282	84,94	
		5	Jumlah Modul/Bahan Ajar Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Kompetensi	Dokumen	952	1.293	135,82	
e	Peningkatan Jumlah Penelitian Bidang Transportasi Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional	6	Jumlah Penelitian Oleh Tenaga Pengajar Yang Dipublikasikan Pada Jurnal Nasional atau Internasional	Dokumen	170	460	270,59	
f	Terlaksananya Pengabdian Masyarakat oleh Lembaga Diklat	7	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan	Kegiatan	142	221	155,63	
g	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> Serta <i>Public Private Partnership</i>	8	Jumlah Dokumen Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah/Swasta Nasional atau Internasional Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> serta <i>Public Private Partnership</i>	Dokumen	670	1.397	208,51	Sebagaian besar Lembaga diklat di Lingkungan BPSDM telah menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional/ internasional (Tabel 1.13)
h	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDM Perhubungan	9	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan	Nilai	90	84,61	94,01	
		10	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan	(%)	94	88,56	94,21	
		11	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3,19	106,4	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET RENSTRA 2015-2019	REALISASI 2015- 2019	%	KETERANGAN
							REALISASI	
i	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional	12	Jumlah Draft Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya Yang Dihasilkan	Dokumen	69	83	120,29	
j	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Diklat SDM Transportasi	13	Jumlah Sarana Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	Unit	6623	5.596	84,49	
		14	Jumlah Prasarana Baru Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan Yang Dibangun	M ²	1173611	932.959	79,49	
k	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Kompeten	15	Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi Bersertifikat Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya	Orang	11200	9.474	84,59	
		16	Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi Yang Memiliki Kompetensi Dibidangnya	Orang	8600	5.681	66,06	

Sumber: LAKIP BPSDM Perhubungan, 2019

Tabel 1.6 Kegiatan yang Tidak Terlaksana BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2015-2019

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	DILANJUTKAN/ TIDAK	KETERANGAN
	Tahun 2015 : x Kegiatan			
1	<u>PKTJ Tegal</u>		Pembangunan Poliklinik Dilanjutkan di Tahun 2019, pembangunan Selasar dan Gudang dilanjutkan di renstra 2020-2024 direncanakan dibangun di tahun 2023	Lelang gagal dan tidak ada yang mendaftar lelang
	Pembangunan Gedung Trauma Centre (Poliklinik)	1.140.480.000		
	Pembangunan Selasar	758.670.000		
	Pembangunan Gudang	1.064.800.000		
2	<u>BP2IP Barombong</u>			
	Pengadaan Lanjutan <i>Fire Hydrant</i>	5.509.510.000		Telah dilaksanakan lelang ulang namun tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan
	Pengadaan <i>Davit</i>			Tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi waktunya jika dilakukan lelang ulang
	Penyusunan AMDAL			
3	<u>BP2TD Bali</u>			
	Penggabungan Sertifikat Tanah	205.000.000	Dilanjutkan di tahun 2016.	Tanah yang sudah dibebaskan di TA. 2015 sertifikat msh dlm proses, sehingga belum bisa digabung dgn sertifikat tanah tahun sebelumnya. Sertifikat pengadaan tanah kampus II perolehan tahun anggaran 2015 belum selesai pengurusannya oleh BPN, sehingga sertifikat lahan kampus II tahun 2013 dan 2014 belum dapat dilakukan penggabungan sertifikat.
	Pelaksanaan Diklat Teknis Diklat Pekerti	200.000.000	Dilanjutkan di tahun 2016	
4	<u>PIP Semarang</u> Penyusunan DED Gedung Asrama B dan C	957.300.000	tidak	Sumber dana BLU, proses lelang terhambat dikarenakan sumber dana dari BLU dan target pendapatan BLU belum terealisasi
5	<u>STTD Bekasi</u>			
	Pengadaan <i>Smartcity</i>			Jangka waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, karena diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 3 bulan
	Pengadaan Perlengkapan monorel			Belum adanya penjelasan terkait barang hibah monorel

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	DILANJUTKAN/ TIDAK	KETERANGAN
	Peralatan Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor			lelang gagal dan tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan dan waktu sudah tidak mencukupi lagi
	Pengadaan AC Split 2 PK			tidak ada penyedia memasukkan penawaran dan penawaran diatas HPS dan waktu sudah tidak mencukupi lagi
	Pengadaan Stasiun Radio Komunikasi (<i>Repeater</i>)			lelang gagal 3 kali karena tidak ada penyedia memasukkan penawaran dan waktu sudah tidak mencukupi lagi
	Biaya Angkut dan Pindahan Peralatan Praktek Perkeretaapian			sarana yang akan dihibahkan dalam kondisi rusak
Tahun 2016 : 13 Kegiatan		2.290.714.500		
1	<u>Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan</u> Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor Roda 4 (Minibus) sumber dana PNB	500.000.000		Target penerimaan PNB yang tidak tercapai
2	<u>Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara</u> Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang bersumber dana dari PNB	263.799.000	tidak	Tahun 2017 s/d 2019 tidak mempunyai target PNB
3	<u>BP2IP Sulawesi Utara</u> Pengadaan Kendaraan Operasional/Bus Sedang Roda 6	563.360.000		Proses revisi anggaran dan terbatasnya waktu pelaksanaan
4	<u>BP2IP Tangerang</u>			
	Pelaksanaan Diklat <i>Seafarers with Designated Security Duties</i> (SDSD)	52.440.000		Tidak adanya peserta
	Pelaksanaan Diklat <i>Basic Liquefied Gas Tanker</i> (BLGT)	124.124.000		belum terbitnya persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menyelenggarakan diklat
	Pelaksanaan Diklat <i>Global Maritime Distress Safety System Course</i> (GMDSS)	211.982.000		belum ada kurikulum diklat karena ada perubahan dari sertifikat keterampilan ke sertifikat kompetensi
5	<u>BP2IP Minahasa Selatan</u>			
	Pelaksanaan Diklat <i>Basic Safety Training</i> (BST) sebanyak 2 angkatan yang bersumber dana PNB	134.235.000		Target penerimaan PNB yang tidak tercapai
	Pelaksanaan Diklat <i>Advanced Fire Fighting</i> (AFF) sebanyak 3 angkatan yang bersumber dana PNB	104.310.000		Target penerimaan PNB yang tidak tercapai

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	DILANJUTKAN/ TIDAK	KETERANGAN
	Pelaksanaan Diklat <i>Security Awareness Training</i> (SAT) sebanyak 3 angkatan yang bersumber dana PNB	118.417.500		Target penerimaan PNB yang tidak tercapai
6	<u>BP2IP Sorong</u>			
	Pelaksanaan Diklat Ahli Teknik Tingkat (ATT) IV	61.480.000		Tidak ada peserta untuk memenuhi kuota satu kelas;
	Pelaksanaan Diklat Ahli Teknik Tingkat (ATT) V	62.137.000		Tidak ada peserta untuk memenuhi kuota satu kelas
7	<u>BP3 Curug</u>			
	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan Ajar	20.966.000		
	Pelaksanaan kegiatan Penyusunan TPM	73.464.000		
Tahun 2017 : Tidak Ada Kegiatan yang Tidak Terlaksana				
Tahun 2018 : 4 Kegiatan		1.076.608.000		
1	Penyusunan Formasi BP3KSDMT Pasir Jambu	4.836.000	Dilanjutkan	Tidak ada kegiatan penyusunan formasi pada tahun 2018, namun dilanjutkan pada tahun 2019
2	Penyusunan LHKPN dan E-PUPNS Pegawai BP3KSDMT Pasir Jambu	4.836.000	Dilanjutkan	Tidak ada kegiatan Penyusunan LHKPN dan E-PUPNS Pegawai BP3KSDMT Pasir Jambu pada Tahun 2018, namun dilanjutkan pada tahun 2019
3	Ujian Dinas BP3KSDMT Pasir Jambu	7.386.000	Dilanjutkan	Tidak ada kegiatan Ujian Dinas BP3KSDMT Pasir Jambu pada tahun 2018, namun dilanjutkan pada tahun 2019
4	Pengadaan Tanah BDP Minahasa Selatan	1.059.100.000		

Sumber: LAKIP BPSDM Perhubungan, 2018 dan Rapat Pimpinan Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Oktober

1.1.2.4 Permasalahan Pelaksanaan

Berdasarkan atas dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPSDM Perhubungan 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019, teridentifikasi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan Renstra BPSDM Perhubungan periode tahun 2015-2019 disampaikan pada **Tabel 1.7**.

Tabel 1.7 Permasalahan Pelaksanaan Renstra BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2015-2019

NO.	ASPEK PERMASALAHAN	DESKRIPSI PERMASALAHAN
1	Pendanaan diklat	- Pengesahan penerimaan PNPB-BLU pada satker/UPT yang lokasinya jauh dari KPPN dilakukan setiap bulan - Realisasi belanja dilakukan berdasarkan kebutuhan di lapangan, sehingga penerimaan BLU tidak selalu habis untuk membiayai kegiatan belanja BLU - Beberapa diklat sudah dilaksanakan, namun pihak <i>suppliers</i> terlambat menyampaikan dokumen tagihan - Adanya keterlambatan pembayaran uang makan dan SPP Tarunai/i - Masih terbatasnya peran pendanaan dari non APBN, misalnya: KPBU, BLU, KSO, CSR
2	Kelembagaan dan sistem koordinasi	- Beberapa jenis diklat yang sama yang diselenggarakan oleh K/L lainnya sehingga para peserta diklat lebih memilih lokasi terdekat - Dukungan <i>public</i>, pemda dan K/L terkait dalam melakukan sosialisasi dan pelaksanaan diklat yang diselenggarakan BPSDMP
3	Teknis administrasi pelaksanaan diklat	- Beberapa peserta diklat yang tidak mendapatkan ijin/rekomendasi dari pimpinan terkait untuk mengikuti diklat dimaksud dikarenakan adanya pekerjaan di kantor yang lebih mendesak - Beberapa diklat yang tidak terlaksana karena kendala teknis, misalnya Diklat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa tidak dilaksanakan karena sebagian besar calon peserta yang diusulkan ke LKPP tidak memenuhi persyaratan diklat fungsional pengadaan barang/jasa sehingga tidak memenuhi kuota dari jumlah peserta yang direncanakan
4	Penyerapan lulusan diklat	- Menurunnya jumlah peserta diklat - Berkurangnya formasi CPNS Baru baik di Pusat maupun Daerah - Kurangnya daya serap swasta terhadap lulusan Diklat Darat dan Diklat Perkeretaapian
5	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendukung	- Kurang siapnya dokumen perencanaan menyebabkan beberapa kegiatan pengadaan/ pembangunan di BPSDMP gagal dilaksanakan - Hambatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya proses pengadaan, tahap pengadaan lahan, dan lain sebagainya

Sumber: LAKIP BPSDM Perhubungan, Review Renstra BPSDM 2015-2019, dan Review Renstra Kemenhub 2015-2019

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia perhubungan yang perlu diselesaikan dalam periode tahun 2020-2024. Berbagai permasalahan tersebut berkaitan dengan beberapa aspek yaitu sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana, teknologi dan informasi, regulasi dan kebijakan, kelembagaan, manajemen implementasi, kinerja pelayanan, dan dampak pelayanan. Permasalahan dalam setiap aspek permasalahan ini diuraikan pada sub-bab berikut.

1.2.1 Potensi dan Ancaman dari Perkembangan Lingkungan Strategis

Pembangunan nasional di perioda Tahun 2020-2024 akan berada dalam pusaran migrasi sistem ekonomi dunia yang disebut Revolusi Industri 4.0 yang mengharuskan adanya transformasi dalam pengembangan SDM Perhubungan sebagai sebuah industri tersendiri maupun dalam rangka mendukung pembangunan di segala bidang.

A. Sosial

Total populasi dunia diperkirakan sebanyak 7,7 Milyar jiwa per Desember 2018. Hampir 2/3 dari populasi tersebut tinggal di Benua Asia yang umumnya sebagai penduduk urban dan sub-urban (dan urbanisasi terbesar umumnya terjadi di *emerging countries*), dengan lebih dari 2,5 Milyar orang tinggal di negara China dan India. World Bank (2015)¹ memproyeksikan jumlah penduduk dunia mencapai 8,14 Milyar jiwa di Tahun 2025, dan terus bertambah menjadi 8,5 Milyar jiwa di Tahun 2030, dan menjadi sekitar 9,7 Milyar jiwa di Tahun 2050.

Indonesia saat ini masih dihadapkan kepada permasalahan konsentrasi pembangunan dan penduduk yang masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Kontribusi pulau Jawa terhadap PDB Indonesia hampir mencapai 60%. (lihat Tabel 1.6. Pembangunan ekonomi dalam RPJMN periode tahun 2020-2024 diarahkan untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar pulau.

Tabel 1.8 Capaian Kontribusi Antar Pulau Pada RPJMN Periode 2015-2019

No	Indikator	Capaian Kumulatif 2015-2018	Sasaran RPJMN 2015-2019
1	Peran Sumatra dalam PDB Nasional (%)	21,53	24,60
2	Peran Jawa dalam PDB Nasional (%)	58,29	55,10
3	Peran Bali-Nusra dalam PDB Nasional (%)	3,04	2,60
4	Peran Kalimantan dalam PDB Nasional (%)	8,07	9,60
5	Peran Sulawesi dalam PDB Nasional (%)	6,28	5,20
6	Peran Maluku-Papua dalam PDB Nasional (%)	2,57	2,90

Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Bappenas 2018

B. Teknologi

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi dunia serta semakin langkanya Sumber Daya Alam (SDA), maka trend ekonomi berikut dengan perkembangan teknologi pendukungnya di masa datang akan lebih didominasi oleh perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetika, pengembangan *wearable devices*, energi terbarukan, otomatisasi, dan *artificial intelligence*.

¹ United Nations (2015) World Population Prospects, The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables, New York, 2015

Dalam konteks ekonomi industri, Schwab (2017)² menyatakan bahwa dunia sudah mulai masuk ke tahap Revolusi Industri Keempat (4.0)³ yang pada dasarnya akan mengubah cara kita hidup dan bekerja yang didorong oleh 2 elemen dasar yakni otomatisasi dan pertukaran data yang masif, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan *cyber-physical systems*, *the Internet of things*, dan *cloud computing*. Trend ini selain menghasilkan manfaat berupa efisiensi dalam produksi barang serta penyediaan jasa layanan yang luar biasa, tetapi juga memberikan ancaman (*disruption*) bagi sejumlah sektor ekonomi dan profesi konvensional.

Pada tahun 2018, Pemerintah telah meluncurkan gerakan Making Indonesia 4.0. Bagi Indonesia, fenomena Revolusi Industri 4.0 (4IR) memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadi salah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Hingga tahun 2016, industri manufaktur berkontribusi sebesar 20 persen PDB Indonesia dan membuka lebih dari 14 juta lapangan pekerjaan. Transformasi ekonomi Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kontribusi sektor manufaktur sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan, sehingga perlu upaya merevitalisasi kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional melalui Revolusi Industri 4.0.

Namun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era digitalisasi juga cukup besar. Dari sisi kesiapan inovasi untuk menghadapi revolusi digital seperti yang ditunjukkan oleh Network Readiness Index, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara. Sementara negara-negara yang setara memiliki kesiapan yang lebih baik, seperti Malaysia (peringkat 31), Turki (48), China (59), Thailand (62). Indonesia memiliki keunggulan dalam harga, namun jauh tertinggal dalam infrastruktur dan pemanfaatan oleh masyarakat.

Kesiapan Indonesia untuk mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital yang mampu mendorong transformasi dalam pemerintahan, model usaha dan pola hidup masyarakat juga dianggap kurang. Hal ini ditunjukkan oleh data World Digital Competitiveness Ranking tahun 2017 dimana Indonesia berada pada peringkat ke 59 dari 63 negara.

Cara beradaptasi, integrasi informasi teknologi, dan kerangka peraturan menjadi isu-isu yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

C. Ekonomi

Perkembangan kelas menengah secara global akan menjadi trend besar (*mega-trend*) yang melanda dunia pada Tahun 2025 (US-NIC, 2008⁴). Catatan luar

² Klaus Schwab (2017) The Fourth Industrial Revolution, January 3, 2017

³ Menurut A.T. Kearney, sebelum mencapai tahap revolusi industri keempat (4th atau 4.0) didahului oleh revolusi Industri 1st mekanisasi, 2nd mass production, 3rd digitalisasi

⁴ US-NIC (2008) Global Trends 2025: A Transformed World

biasa terjadi selama periode 1999-2014 di mana sebanyak 135 juta orang terlepas dari garis kemiskinan, kondisi ini akan berlanjut dalam beberapa dekade ke depan. *World Bank* menyatakan bahwa 72% dari populasi dunia hidup pada middle income class pada Tahun 2011. Diproyeksikan bahwa jumlah kelas menengah dunia akan bertambah, hingga Tahun 2050 jumlah *middle and upper class* secara global akan mencapai 8,1 Milyar orang (lebih dari 84%) yang akan didominasi oleh Asia dan Amerika Latin.

Ekonomi Indonesia sejak Tahun 2000 hingga Tahun 2017 tumbuh rata-rata sekitar 5,3% per tahun (Bappenas, 2018)⁵, di mana pada dasarnya angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode Tahun 1968-1979 (7,5%) maupun periode 1980-1996 (6,4%). Ditargetkan untuk periode 2020-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada pada kisaran 5,4-6% per tahun (dengan asumsi terdapat reformasi struktural melalui peningkatan investasi dan produktivitas).

Reformasi struktural sektor ekonomi dapat dilakukan melalui peningkatan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang saat ini relative stagnan. Untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dibutuhkan investasi dari perusahaan global agar industri Indonesia dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi serta memiliki daya saing ekspor.

Peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan digital. Kontribusi pariwisata dalam penciptaan devisa meningkat dari USD 11,2 miliar di tahun 2014 menjadi USD 15,2 miliar di tahun 2017. Kenaikan devisa ini dihasilkan dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) untuk menikmati wisata alam dan budaya di Indonesia dari 9,4 juta orang di tahun 2014 menjadi 15,8 juta orang pada tahun 2018. Aktivitas wisatawan nusantara juga meningkat dari 252 juta orang di tahun 2014 menjadi 277 juta orang di tahun 2017. Secara total, kontribusi sektor pariwisata kepada perekonomian nasional diperkirakan meningkat dari 4,2 persen di tahun 2015 menjadi 4,8 persen di tahun 2018.

D. Lingkungan

Resolusi PBB yang disetujui oleh 159 negara 21 Oktober 2015 tentang *The Agenda of 2030 of Sustainable Development Goals* atau sering dikenal sebagai SDGs merupakan kelanjutan dari MDG's (*Millenium Development Goals*). SDG's mencakup 17 tujuan (*goals*) dengan 169 capaian (*achievement*) yang terukur dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan sebagai agenda pembangunan dunia demi kemaslahatan manusia dan planet bumi dalam jangka panjang.

⁵ Bappenas (2018) Visi Indonesia 2025: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, disampaikan pada Diseminasi RPJPN 2005-2025 kepada Peserta Pemilu Presiden 2019, KPU, 25 September 2018

Ke-17 tujuan/*goals* dalam SDGs mencakup seluruh aspek pembangunan yang holistik dan terintegrasi (termasuk di dalamnya mencakup isu gender dan fasilitas terhadap kaum disabilitas) yang diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan jaman yang telah dikemukakan sebelumnya (kelangkaan SDA, perubahan iklim, revolusi industri, pertumbuhan ekonomi-perdagangan-serta kependudukan, dlsb).

E. Politik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV (RPJMN) periode 2020 – 2024 sebagai komitmen politik presiden untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditandai dengan adanya komitmen untuk memperbaiki kualitas sumberdaya manusia. Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing⁶, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
5. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
6. Pengentasan kemiskinan
7. Meningkatkan produktivitas dan daya saing

Pidato Presiden yang disampaikan pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober semakin menegaskan komitmen politik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta global untuk bekerja sama dengan SDM Indonesia⁷.

Pembangunan manusia yang berkualitas memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan peningkatan produktivitas. Berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas

⁶ Bappenas (2018) Visi Indonesia 2025: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

⁷ Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Dalam Rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024

tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

Sumberdaya manusia Indonesia juga masih memiliki ketertinggalan dalam hal daya saing. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan SDM Indonesia di dalam mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi. Indonesia berada di peringkat 85 dari 126 negara dengan skor *Global Innovation Index* (GII) 29,8 dari skala 0-100 (2018), atau peringkat 14 dari 15 negara-negara Asia Tenggara dan Oceania. Hal ini disebabkan oleh masih belum memadainya infrastruktur penelitian dan pengembangan. Jumlah SDM Iptek masih terbatas dan hanya 14,08 persen diantaranya yang berkualifikasi S3. Ekosistem inovasi belum sepenuhnya tercipta sehingga proses penerapan inovasi dan komersialisasi inovasi belum berlangsung dengan baik.

Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM Indonesia juga disebabkan oleh masih rendahnya pendidikan mayoritas SDM Indonesia. Saat ini proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 39,57 persen (Sakernas Agustus, 2018), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah (58,77 persen atau 72,88 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan pendidikan menengah dan tinggi mencapai 7,79 persen. Informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya mismatch antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja.

F. Hukum

Untuk menghadapi perubahan dunia serta sebagai upaya menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah berupaya untuk mewujudkan Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Integritas, Nasionalisme, Profesionalisme, Wawasan Global, Menguasai IT dan Bahasa Asing, *Hospitality*, *Networking* dan *Entrepreneurship* dengan melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam program pembinaan dan peningkatan kualitas ASN, sehingga kedepannya ASN diharapkan dapat menghadapi tantangan terbesar pembangunan. Tantangan terbesar pembangunan adalah mendorong ASN agar mampu bergerak cepat dengan memanfaatkan perubahan dan teknologi, serta melakukan percepatan regenerasi secara sistematis sebagai bekal untuk menjalankan pemerintahan di masa yang akan datang.

Seiring dengan bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia, maka kedepan tantangan dalam dunia Pendidikan di Indonesia saat ini adalah mempersiapkan Pendidikan dan pelatihan kerja bagi generasi muda dalam menyambut bonus demografi dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi alternative dalam menjawab tantangan dalam dunia Pendidikan. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang

diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas, dengan pengembangan kurikulum dan silabi berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (*multi-entry-exit system*) dan multimakna (berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup (*life skill*) yang berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia untuk memenuhi permintaan dari dunia usaha adalah dengan meluncurkan program pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industry. Hal tersebut diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara lima Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerajaan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan *industry*. Ruang lingkup MoU ini meliputi upaya untuk membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri.

Konsep pendidikan vokasi tersebut sepenuhnya berbasis kompetensi dengan keterlibatan yang intensif dari industri, mulai dari identifikasi program studi, penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, praktek kerja dan pemagangan industri, hingga penempatan dengan ikatan kerja pada perusahaan industri. Politeknik dan Akademi Komunitas tersebut mengadopsi lebih kurang 80-90 persen konsep pendidikan *dual system* dari Jerman dengan pembelajaran menggunakan *block system*, yaitu dalam setiap semester dua bulan pembelajaran teori dan praktek di kampus, dan tiga bulan magang di perusahaan industri.

Pendidikan vokasi merupakan salah satu dari tiga kegiatan pendidikan ketenagakerjaan yang dilakukan kementerian, yaitu pemagangan melalui Balai Diklat di Kemenaker maupun di Kemenperin, pembangunan politeknik atau akademi komunitas, serta kerjasama antara industri dan SMK melalui sistem klaster. Karena pembangunan industri yang utama adalah membangun manusianya. Kedepan, pendidikan Vokasi harus diselenggarakan hingga jenjang magister terapan dan doktor terapan. Dengan keadaan teknologi yang amat canggih pada era revolusi industri 4.0, sumber daya manusia memiliki wawasan keilmuan di level yang tinggi dan komitmen dalam mengambil kebijakan untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual yang tinggi pula.

G. Budaya

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *Good Clean Government* (GCG). Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) memahami GCG memiliki kunci utama yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya dimana prinsip tersebut menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. Untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan GCG, diperlukan banyak hal mendasar yang harus dipenuhi. Efendi (2005)⁸ mengungkapkan setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menjadi permasalahan dan harus diperbaiki dalam penerapan GCG, antara lain: Integritas pelaku pemerintahan, Kondisi politik dalam negeri, Kondisi ekonomi dan social masyarakat, system hukum, tidak adanya system akuntansi yang handal, kurangnya SDM yang mumpuni di bidangnya, serta belum ada standar akuntansi keuangan public yang baku. Untuk mewujudkan GCG, maka diperlukan pengelolaan SDM yang mumpuni di bidangnya melalui pengelolaan pendidikan. Kedepannya, agar penerapan tata Pemerintahan yang Baik (GCG), dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, maka harus melakukan hal sebagai berikut:

- Diperlukan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak penyelenggara Pendidikan Swasta untuk secara bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Kesepakatan tersebut dapat dituangkan secara tertulis dalam bentuk nota kesepakatan yang nantinya berfungsi sebagai landasan moral dan materiil dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus dapat menyusun Kerangka Hukum Pengadaan barang dan jasa yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai tata Pemerintahan yang baik dengan berpedoman pada azas-azas pembentukan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan aspek-aspek kearifan local dan sesuai dengan situasi dan kondisi kemampuan masing-masing Daerah.
- Sebagai wujud nyata dari partisipasi pilar-pilar tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang bersifat independen yang melibatkan unsur swasta dan masyarakat/praktisi pendidikan atau Dewan Pendidikan untuk secara bersama melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan.
- Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus dapat menambah intensitas pelatihan baik untuk Tenaga Pendidik maupun Pengelola penyelenggaraan Pendidikan, pada semua tingkat yang Pelatihan sumber daya manusia bagi kegiatan penyelenggaraan Pendidikan antara lain ditujukan untuk pembangunan moral aparatur yang baik, dan pengetahuan peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik maupun Pengelola penyelenggaraan Pendidikan.

⁸ Efendi. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Balai Buku Indonesia

1.2.2 Permasalahan yang menjadi Isu Strategis Pengembangan SDM Perhubungan

Kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan BPSDM Perhubungan di Tahun 2020-2024 harus mampu menyelesaikan sejumlah permasalahan yang menjadi isu strategis yang secara umum dapat dikategorikan menjadi 3, yakni: (1) Permasalahan penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi (*institution interest*), (2) permasalahan kinerja dan dampak dari keberadaan BPSDM Perhubungan (*public interest*) serta (3) manajemen pengembangan SDM Perhubungan.

1.2.2.1 Permasalahan Kinerja dan Dampak dari Keberadaan BPSDM (*Public Interest*)

A. Manfaat Ekonomi

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Menurut data BPS, kontribusi lapangan usaha transportasi dan pergudangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 sebesar Rp 797,3 triliun atau 5,37% dari PDB yang bernilai Rp 14.837,36 triliun. Lapangan usaha tersebut meliputi subsektor transportasi per moda (rel; darat; laut; udara; sungai, danau, dan penyeberangan), serta sektor logistic yang mencakup pergudangan dan jasa penunjang angkutan, serta pos dan kurir.

Analisis *Supply Chain* Indonesia (SCI) menunjukkan sektor transportasi Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh sub sektor angkutan darat (jalan) dengan kontribusi sebesar 53,15% dan diikuti angkutan udara (36,10%). Angkutan-angkutan lainnya memberikan kontribusi rendah, yaitu angkutan laut (6,77%), angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (2,41%), dan angkutan rel (1,57%). Kontribusi kelima sub sektor transportasi tersebut terhadap PDB tahun 2018 sebesar Rp 666,2 triliun atau meningkat sebesar Rp 50,7 triliun (8,23%) dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 615,5 triliun. Peningkatan kontribusi itu didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan nonmigas, terutama industri makanan, serta perdagangan dengan peningkatan produksi barang-barang domestik dan impor.

Perwujudan transportasi yang aman, selamat dan nyaman merupakan tugas dan tanggung jawab SDM Transportasi, sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, BPSDM Perhubungan melakukan evaluasi dan perubahan dalam menghasilkan SDM Transportasi yang berkualitas guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan khususnya pada sektor transportasi.

Pemerintah telah menetapkan tahun 2019 untuk menjadikan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai program prioritas. Kedepannya, diharapkan akan menghasilkan SDM yang kompeten, profesional, beretika, berintegritas dan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Oleh

karena itu, BPSDM melalui Lembaga diklat telah menyusun Grand Design Pengembangan SDM Transportasi Nasional Periode 2019-2045 dengan topik utama menciptakan *Link and Match* Antara kebutuhan dan Penyediaan SDM Transportasi serta Strategi Pemenuhannya. BPSDM Perhubungan.

Pembangunan sektor transportasi menjadi factor penting guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi Indonesia. Program pembangunan sektor transportasi yang menjadi fokus pemerintah saat ini diantaranya pembangunan tol laut dan pelabuhan-pelabuhan baru, pembangunan bandara baru atau merevitalisasi bandara lama, kemudian pembangunan MRT dan kereta cepat, serta pembangunan tol yang menghubungkan jalur antar provinsi. Untuk menunjang program pembangunan sektor transportasi tersebut, diperlukan penyediaan SDM transportasi yang mumpuni. Perkembangan *supply and demand* SDM Transportasi per sub sektor baik dari dalam negeri maupun luar negeri akan disampaikan pada **Tabel 1.9**.

Tabel 1.9 Perkembangan *Supply and Demand* SDM Transportasi per Sub Sektor, 2019

SUPPLY	DEMAND	
LULUSAN LEMBAGA DIKLAT BPSDM PERHUBUNGAN	NASIONAL	INTERNASIONAL
Sub Sektor Perhubungan Darat 18.916 orang	- Dinas Perhubungan: 25.732 orang - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat: 11.179 orang - SDM Kereta Api: 45.879 orang - SDM SDP: 18.021 orang	
Sub Sektor Perhubungan Laut 3.569 orang	- SDM Syahbandar Utama (4 unit) 1.720 orang - SDM Otoritas Pelabuhan Utama (4 unit) 244 orang - SDM KSOP (96 unit) 11.712 orang - SDM UPP (186 unit) 13.764 orang - SDM Terminal Khusus (Tersus) (501 unit) 34.569 orang Total SDM Regulator dan Operator Pelabuhan: 62.009 orang	3.382.035 awak kapal dunia eksisting 155.574 awak kapal yang dibutuhkan setiap tahun
Sub Sektor Perhubungan Udara 3.569 orang	- SDM Jabatan Administrasi: 2.106 orang - SDM Jabatan Operasional: 7.577 orang - SDM Jabatan Inspektur Penerbangan: 878 orang Total Kebutuhan SDM Operator Bandara (Kantor Pusat+OBU+UPBU+Balai) periode 2019-2023: 10.561 orang	- Training needs: 70.331 orang - Training capacity: 52.260 orang - Kebutuhan rata-rata setiap tahunnya: 18.071 orang

Sumber: Hasil Diskusi Evaluasi RENSTRA Tahun 2015-2019 dan Rumusan Renstra PPSDM per Sub Sektor BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

B. Daya Saing SDM Transportasi

Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan konsekuensi akan pemenuhan sumberdaya manusia transportasi yang berdaya saing. Pemenuhan sumber daya manusia transportasi (regulator dan operator) yang berdaya saing menemui beberapa hambatan antara lain adalah kurangnya standar kompetensi SDM transportasi, terbatasnya ketersediaan kesempatan sekolah dan diklat transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik transportasi Selain itu perkembangan teknologi cepat

dalam penyelenggaraan transportasi menyebabkan sumber daya manusia transportasi perlu ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing.

BPSDM Perhubungan melalui Lembaga diklat berupaya menghasilkan SDM Transportasi berkualitas dan berdayasaing di bidang transportasi darat, laut dan udara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap jasa transportasi dengan perkembangan teknologi dan standar pelayanan yang semakin tinggi. Pelayanan di bidang transportasi merupakan cerminan dari kemajuan suatu bangsa, sehingga pelayanan yang baik sesuai dengan standar keamanan nasional dan internasional menjadi hal yang wajib dipenuhi.

Lembaga diklat dibawah lingkungan BPSDM Perhubungan melakukan kerjasama dengan lembaga instansi pendidikan, Lembaga sertifikasi profesi dan pelatihan serta menjadi anggota Organisasi baik skala nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Transportasi yang dihasilkan. Adapun mitra kerjasama yang telah terjalin dengan Lembaga diklat dibawah lingkungan BPSDM Perhubungan akan disampaikan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1.1 Mitra Kerjasama yang Telah Terjalin

Sumber: Buku Profil Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2017

Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan mengacu pada standar Lembaga sertifikasi

profesi dan pelatihan nasional dan internasional, sehingga tingkat penyerapan lulusan Lembaga diklat cukup tinggi. Lulusan dari Lembaga diklat di Lingkungan BPSDM Perhubungan tidak hanya memenuhi kebutuhan SDM Transportasi dalam pemerintah, namun sebagian besar terserap oleh operator baik itu BUMN maupun swasta. Target penyerapan lulusan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan BPSDM Perhubungan akan disampaikan pada **Tabel 1.10**.

Tabel 1.10 Target Penyerapan lulusan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor

LEMBAGA DIKLAT SDM PERHUBUNGAN	2017					2018					2019				
	Lulusan	Terserap		Sisa	%	Lulusan	Terserap		Sisa	%	Lulusan	Terserap		Sisa	%
		Pemerintah	Swasta				Pemerintah	Swasta				Pemerintah	Swasta		
1. Sub Sektor Perhubungan Darat dan Perkeretaapian	366	223	37	106	71,06%	598	187	409	2	99,79%	598	183	294	2	99,58%
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	2.320	38	1.820	462	80,09%	2.546	205	2.264	77	96,98%	2.546	205	2.264	77	96,98%
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	854	46	663	145	83,02%	718	13	509	196	72,70%	718	13	509	196	72,70%
TOTAL	3.540	307	2.520	713	79,86%	3.862	405	3.182	275	92,88%	3.862	405	3.182	275	92,88%

Sumber: LAKIP BPSDM Perhubungan, 2015-2019

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dilakukan melalui promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas dengan menggunakan data base lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan. Komitmen bersama dan kerjasama dengan stakeholder, baik dalam skala nasional maupun internasional juga dilakukan oleh Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

1.2.2.2 Permasalahan penyelenggaraan pengembangan SDM transportasi (*institution interest*)

A. Kuantitas Diklat

Sektor perhubungan memiliki peranan yang teramat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peranan transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sehingga SDM transportasi dituntut memperkuat komitmen untuk memberikan kerja nyata dalam rangka mewujudkan transportasi yang aman, selamat dan nyaman. Dalam menjawab tantangan tersebut, Lembaga diklat di Lingkungan BPSDM Perhubungan mengadakan pendidikan berprogram diploma bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB serta pelatihan bagi aparatur sipil baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta pelatihan operator dan masyarakat melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM).

Realisasi Jumlah Peserta dan Lulusan Peserta Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekertariat BPSDM Perhubungan dan Pusbang Aparatur Perhubungan berdasarkan jenis kegiatan pelatihan akan disampaikan pada **Tabel 1.11**.

Realisasi Jumlah Peserta dan Lulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor akan disampaikan pada **Tabel 1.12**.

Tabel 1.11 Realisasi Jumlah Peserta dan Lulusan Peserta Pendidikan yang diselenggarakan oleh Sekertariat BPSDM Perhubungan dan Pusbang Aparatur Perhubungan (Orang)

URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN
1. Rintisan Pendidikan Gelar (S2/S3)	177	109	66	42	75	44	24	11	53	38
2. Pelatihan Prajabatan	1.446	1.445	0	0	103	103	383	383	1.080	1.080
3. Pelatihan Penjenjangan	445	443	150	149	93	93	1.502	1.498	2.427	2.427
4. Pelatihan Penataran (<i>Short Course</i>)	10.045	10.003	10.843	10.467	8.455	8.243	2.277	1.958	3.848	3.848
5. Pelatihan Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	12.113	12.000	11.059	10.658	8.726	8.483	4.186	3.850	4.981	4966

Sumber: Lakip BPSDMP 2019

Tabel 1.12 Realisasi Jumlah Peserta dan Lulusan Peserta Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor

URAIAN	2015		2016		2017		2018		2019	
	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN	PESERTA	LULUSAN
A. Pendidikan Pembentukan	14.414	3.187	14.852	3.335	17.375	3.572	20.564	4.428	23.858	5.750
4. Sub Sektor Perhubungan Darat	1.853	430	2.156	359	2.597	598	3.381	636	4.371	1.386
5. Sub Sektor Perhubungan Laut	9.313	1.945	9.406	2.235	11.483	2.301	13.100	3.008	14.780	3.569
6. Sub Sektor Perhubungan Udara	3.248	812	3.290	741	3.295	673	4.083	784	4.490	795
B. Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	390.609	388.461	383.783	392.639	299.217	288.955	187.747	189.656	273.844	265.604
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	6.549	5.813	4.857	4.416	2.966	2.683	3.113	3.113	14.053	8.862
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	377.095	375.721	372.935	382.206	287.148	278.152	171.223	173.540	249.165	250.236
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	6.965	6.927	5.991	6.017	9.103	8.120	13.411	13.003	10.626	6.506
C. Pelatihan Penjenjangan	46.441	45.283	201.505	180.317	60.941	68.346	10.149	9.539	13.424	11.628
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	20		20		20	20			66	56
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	46.221	45.154	201.392	180.241	60.921	68.326	10.149	9.539	13.331	11.572
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	200	129	93	76					27	
D. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	6.046	6.046	5.748	5.748	52.595	52.595	146.244	146.240	170.231	170.231
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	1.443	1.443	1.567	1.567	951	951	22.919	22.919	40.030	40.030
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	4.286	4.286	3.491	3.491	50.721	50.721	101.666	101.663	112.653	112.653
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	317	317	690	690	923	923	21.659	21.658	17.548	17.548

Sumber: Lakip 2019

B. Kualitas Diklat

Indonesia harus mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi *Asean Economy Community* dengan kondisi persaingan dan perkembangan yang begitu cepat, sehingga membutuhkan kontribusi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Berdasarkan undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka posisi pendidikan vokasi menjadi vital dan sama dengan jalur pendidikan akademik dan profesi. Pendidikan vokasi memiliki kesamaan hak dan proses, sehingga menjadi alternatif pilihan masyarakat.

Pendidikan vokasi menjadi salah satu *roadmap* yang disusun oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang telah ditunjuk oleh Presiden dalam upaya mengimplementasikan RPJMN 2020-2024. RPJM itu mengacu tiga poin penting yaitu sinkronisasi pendidikan dan pelatihan; mencegah ketidakcocokan (*mismatch*) antara dunia kerja dengan sektor pendidikan; dan mendorong kurikulum yang lebih memperbanyak unsur magang (praktik kerja).

Dalam penyelenggaraan program akademik, profesi/vokasi, Lembaga diklat dibawah lingkungan BSDM Perhubungan berupaya untuk memenuhi standar baik dari program studinya maupun secara kelembagaannya dari BAN-PT. Dari segi pemenuhan kebutuhan SDM Perhubungan di dunia kerja, Lembaga diklat dibawah lingkungan BPSDM Perhubungan melakukan kerjasama dengan Lembaga sertifikasi profesi dan Lembaga institusi terkait dalam menyusun jenis dan detil kompetensi agar sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi masing-masing sektor. Capaian akreditasi dan sertifikasi yang telah diperoleh Lembaga diklat akan disampaikan pada **Tabel 1.13**.

Lulusan lembaga diklat BPSDM Perhubungan harus memiliki kualitas dan wawasan yang dapat mengimbangi dinamika industri SDM Transportasi dunia dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk itu, Lembaga diklat BPSDM Perhubungan mengundang praktisi atau professional sebagai dosen tamu untuk memberikan kuliah umum dan memberikan pengayaan materi berupa pengalaman praktis sebagai bekal saat menghadapi tantangan dunia kerja.

Sektor Perhubungan memiliki peran strategis dalam keberhasilan pembangunan. Melalui sektor transportasi dapat terjalin konektivitas di seluruh wilayah tanah air Indonesia sehingga dibutuhkan sumber daya manusia transportasi yang handal guna mewujudkan transportasi yang aman, selamat dan nyaman. Untuk itu, Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan menyelenggarakan *Reform Leadership Training* bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan akan kompetensi aparatur perhubungan dan kualitas pimpinan yang baik. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan antara lain bidang hukum dan reformasi biokrasi perhubungan, logistic, multimoda dan keselamatan perhubungan, Sumber Daya Manusia dan transportasi berkelanjutan, kepemimpinan, *entrepreneurship*,

kepemimpinan transportasi nasional, inovasi sektor publik, manajemen inovasi dan *leadership, organization service of excellence* dan *change management*. Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan aparatur perhubungan yang memiliki karakter yang kuat, berwawasan kebangsaan, memiliki perspektif global dan memimpin perubahan untuk terwujudnya pemerintahan berkelas dunia (*World Class Governance*).

Tabel 1.13 Capaian Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat BPSDM Perhubungan

BPSDM PERHUBUNGAN	LEMBAGA DIKLAT	AKREDITASI/SERTIFIKASI	LEMBAGA/INSTANSI
1. PPSDM Aparatur Perhubungan	PPSDM Aparatur Perhubungan	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	TNV
2. Sub Sektor Perhubungan Darat	BP2TD Palembang	Program D-III Ahli Madya Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (D-III LLASDP) (Akreditasi Baik)	BAN-PT (Kemristekdikti)
	STTD	Akreditasi A: D-III dan D-IV Lalu Lintas Angkutan, D-III Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya, D-III Perkeretaapian Akreditasi B: D-II Pengujian Kendaraan Bermotor dan D-III Lalu Lintas Sungai Danau Dan Penyeberangan	BAN-PT (Kemristekdikti)
		ISO 9001:20015 System Manajemen Mutu	WQA Indonesia
	PKTJ Tegal	Akreditasi Perguruan Tinggi: Akreditasi B Akreditasi B: D-IV Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, D-III Pengujian Kendaraan Bermotor, dan D-IV Teknik Keselamatan Otomotif	BAN-PT (Kemristekdikti)
	API Madiun		
	BP2TD Bali	<i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978</i> Amandemen Manila 2010, yakni ANT-III pada program D-III Nautika dan D-III Teknik	<i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>
3. Sub Sektor Perhubungan Laut	STIP	Akreditasi Perguruan Tinggi Akreditasi A: D-IV Nautika, D-IV Teknik dan D-IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan	BAN-PT (Kemristekdikti)
		ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	LRQA
		Diklat Keterampilan Khusus Pelaut dan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan berstandar <i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978</i>	<i>International Maritime Organization (IMO)</i>
	BP3IP	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	
		Diklat Keterampilan Khusus Pelaut dan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan berstandar <i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978</i>	<i>International Maritime Organization (IMO)</i>
	PIP Semarang	Akreditasi A: Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	BAN-PT (Kemristekdikti)
		Diklat Keterampilan Khusus Pelaut dan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan berstandar <i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978</i>	<i>International Maritime Organization (IMO)</i>
	PIP Makassar	Akreditasi B: Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	BAN-PT (Kemristekdikti)
		Diklat Keterampilan Khusus Pelaut dan Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan berstandar <i>Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) 1978</i>	<i>International Maritime Organization (IMO)</i>

BPSDM PERHUBUNGAN	LEMBAGA DIKLAT	AKREDITASI/SERTIFIKASI	LEMBAGA/INSTANSI
		ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	
		ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan	House of Quality Indonesia (HOQI)
	Poltekpel Surabaya	Akreditasi B: Akreditasi Perguruan Tinggi dan D-III Nautika Akreditasi C: D-III Elektro Pelayaran, D-III Teknik	BAN-PT (Kemristekdikti)
		ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training ISO 21001:2018 <i>Management System for Educational Organization</i>	IRCA-QCI
	BP2IP Tangerang	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	
		Transformasi dari Balai Pendidikan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang menuju Politeknik Pelayaran Banten	BAN-PT (Kemristekdikti)
		Diklat Pelaut Tingkat V (DP-V) mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation III/4 dan STCW Code Section A – III/4	<i>Standards Of Training Certification & Watchkeeping (STCW)</i>
	BP2IP Barombong	Transformasi dari Balai Pendidikan Ilmu Pelayaran (BP2IP) menuju Akademi Pelayaran	BAN-PT (Kemristekdikti)
	BP2IP Sorong	Diklat Pelaut Tingkat V (DP-V) mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation III/4 dan STCW Code Section A – III/4	<i>Standards Of Training Certification & Watchkeeping (STCW)</i>
	BP2IP Malahayati	Akreditasi A: Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan	BAN-PT (Kemristekdikti)
		Diklat Pelaut Tingkat V (DP-V) mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation III/4 dan STCW Code Section A – III/4	<i>Standards Of Training Certification & Watchkeeping (STCW)</i>
	BP2TL Jakarta	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	
		Diklat Pelaut Tingkat V (DP-V) mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation III/4 dan STCW Code Section A – III/4	<i>Standards Of Training Certification & Watchkeeping (STCW)</i>
	Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman	Perubahan kelembagaan dari Balai Pelatihan menjadi Politeknik Pelayaran berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 124 Tahun 2015	Kementerian PAN RB dan Kementerian Perhubungan
		ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	
		Diklat Pelaut Tingkat V (DP-V) mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation III/4 dan STCW Code Section A – III/4	<i>Standards Of Training Certification & Watchkeeping (STCW)</i>
	Balai Diklat Pelayaran Minahasa Selatan	Perubahan kelembagaan dari Balai Pelatihan menjadi Politeknik Pelayaran	Kementerian PAN RB dan Kementerian Perhubungan
		ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu Training	
		Diklat Pelaut Tingkat V (DP-V) mengacu pada STCW 1978 Amandemen 2010 Regulation III/4 dan STCW Code Section A – III/4	<i>Standards Of Training Certification & Watchkeeping (STCW)</i>
4. Sub Sektor	STPI Curug	Akreditasi C: D-IV Teknik Listrik Bandara	BAN-PT (Kemristekdikti)

BPSDM PERHUBUNGAN	LEMBAGA DIKLAT	AKREDITASI/SERTIFIKASI	LEMBAGA/INSTANSI
Perhubungan Udara		Akreditasi B: D-II Penerbangan Sayap Tetap, D-III Penerbangan Aeronautika, D-III Operasi Bandar Udara, D-III Teknik Bangunan dan Landasan, D-III Pemandu Lalu Lintas Udara, D-IV Teknik Navigasi Udara, D-IV Teknik Pesawat Udara, D-IV Lalu Lintas Udara	
		<i>Authorized Service Center Piper Aircraft and Cessna Aircraft</i>	<i>Piper Aircraft Inc. and Cessna Aircraft Company</i>
		Pendidikan Program Magister dan Pelatihan Bidang Penerbangan Berskala Internasional sesuai Standar dan Rekomendasi <i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>	<i>ÉCOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE (ENAC) Perancis</i>
		Sertifikasi Penerbang dan Type Rating A320	<i>ASNZ New Zealand</i>
		<i>MOU Training Service Agreement (TSA): Trainair plus category silver/associate</i>	<i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>
	AKTP Medan	Akreditasi B: Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan	BAN-PT (Kemristekdikti)
	Poltek Penerbangan Surabaya	ISO 9001:2015 Satuan Penjaminan Mutu	WQA Indonesia
		Akreditasi B: D-III Teknik Pesawat Udara, D-III Manajemen Transportasi Udara, D-III Lalu Lintas Udara, D-III Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara dan D-III Teknik Listrik Bandar Udara	BAN-PT (Kemristekdikti)
	BP3 Palembang	ISO 9001:2008 System Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 Satuan Penjaminan Mutu	
	BP3 Jayapura	ISO 9001: 2015 Satuan Penjaminan Mutu	
	BP3 Curug	<i>Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)</i>	<i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>
		<i>ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems</i>	<i>NQA. Global Certification Body</i>
	Balai Diklat Penerbang Banyuwangi	Akreditasi Akademi	BAN-PT (Kemristekdikti)
		<i>MOU Training Service Agreement (TSA): Trainair plus category silver/associate</i>	<i>International Civil Aviation Organization (ICAO)</i>
		ISO 9001: 2015 Satuan Penjaminan Mutu	BSI Group Indonesia
		<i>ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems</i> ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan	

Sumber: Hasil Diskusi Evaluasi RENSTRA Tahun 2015-2019 dan Rumusan Renstra PPSDM per Sub Sektor BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

C. SDM Pendidik

Kualitas lulusan Lembaga Diklat salah satunya dipengaruhi oleh kualitas pengajar yang berkompeten serta adanya pembatasan jumlah peserta pada setiap kelas, sehingga diharapkan materi yang disampaikan akan terserap dengan baik. Oleh karena itu, jumlah dan kapasitas pengajar harus dapat mengimbangi jumlah peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Perhubungan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa untuk program studi rumpun ilmu terapan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi adalah 1 (satu) : 30 (tiga puluh). Jumlah tenaga pendidik di lingkungan BPSDM Perhubungan eksisting akan disampaikan pada **Tabel 1.14**.

Perbandingan jumlah tenaga pendidik dengan peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Perhubungan rata-rata adalah 1:30, dimana hal tersebut sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2 Tahun 2016, sehingga diharapkan kualitas lulusan diklat tetap terjaga.

Tabel 1.14 Jumlah Tenaga Pendidik di Lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
A. Tenaga Pengajar (Dosen/Instruktur Tetap)	655	749	735	825	901
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	106	108	112	119	127
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	328	360	365	449	524
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	221	273	250	248	241
B. Tenaga Pengajar (Dosen/Instruktur Tidak Tetap)	2.214	1.788	1.958	1.750	1.895
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	322	226	255	293	305
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	905	815	998	826	1.012
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	987	747	705	631	578
C. Jumlah Widyaiswara BPSDM Perhubungan	23	20	21	25	22
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	18	18	19	23	21
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	4	1	1	1	0
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	1	1	1	1	1

Sumber: Buku Statistik Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2019

Tenaga pengajar/pendidik dan kependidikan merupakan factor penting dalam menggerakkan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan terdiri dari Dosen, Widyaiswara, dan Instruktur serta tenaga kependidikan seperti administrasi, labora, dan teknisi perlu dilakukan *upgrading skill* dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi yang memiliki *entrepreneurship* dan berkarakter. Perbaikan kualitas dosen dapat melalui pemagangan, studi banding, dan beasiswa S3.

Kedepan, Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan mengadakan kerjasama dengan Lembaga pendidikan baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka membangun *capacity building* tenaga pengajar/pendidik. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat mendukung program peningkatan status kelembagaan dari Lembaga diklat di lingkungan BPSDM.

D. Sarana dan Prasarana

Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan adalah sarana dan prasarana, dimana kedepannya diperlukan pemeliharaan dalam menjaga kualitas serta pengadaan sarana dan prasarana agar dapat mengimbangi dinamika industry SDM Transportasi dan perkembangan teknologi. Adapun sarana dan Prasarana eksisting yang terdapat di lingkungan BPSDM Perhubungan berdasarkan sub sektor akan disampaikan pada **Tabel 1.16** dan **Tabel 1.17**.

Tabel 1.15 Prasarana Eksisting di Lingkungan BPSDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor

SARANA DAN PRASARANA EKSISTING	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
A. Kapasitas Kelas		26.078	31.074	34.820	35.567	36.503
1. PPSDM Aparatur Perhubungan	Orang	790	990	990	1.090	1.090
2. Sub Sektor Perhubungan Darat	Orang	3.383	3.628	3.943	4.455	4.529
3. Sub Sektor Perhubungan Laut	Orang	17.100	21.441	24.430	24.197	24.675
4. Sub Sektor Perhubungan Udara	Orang	4.805	5.015	5.457	5.825	6.209
B. Kapasitas Laboratorium	Orang	14.633	16.025	16.341	15.272	15.670
	Unit	600	610	622	607	589
1. PPSDM Aparatur Perhubungan	Orang	40	40	40	40	40
	Unit	1	1	1	1	1
2. Sub Sektor Perhubungan Darat	Orang	1.611	2.101	2.076	2296	2.354
	Unit	52	61	59	66	67
3. Sub Sektor Perhubungan Laut	Orang	6.699	6.920	6.933	6.738	6.836
	Unit	266	275	277	276	278
4. Sub Sektor Perhubungan Udara	Orang	6.283	6.964	7292	6198	6.440
	Unit	281	273	285	281	243
C. Kapasitas Asrama	Orang	15.635	17.680	18.799	20.030	21.346
	Unit	139	143	148	149	159
1. PPSDM Aparatur Perhubungan	Orang	448	662	774	774	774
	Unit	3	5	5	5	5
2. Sub Sektor Perhubungan Darat	Orang	2.858	3.447	3.447	3941	4.732
	Unit	40	42	42	43	50

SARANA DAN PRASARANA EKSISTING	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
3. Sub Sektor Perhubungan Laut	Orang	7.382	8.534	9.064	9741	10.278
	Unit	48	50	53	55	56
4. Sub Sektor Perhubungan Udara	Orang	4.947	5.037	5514	5574	5.562
	Unit	48	48	49	47	48
D. Kapasitas Aula	Orang	15.712	14.912	16.472	17.472	17.872
	Unit	25	24	26	28	30
1. PPSDM Aparatur Perhubungan	Orang	1.162	1.362	1.462	1.462	1.462
	Unit	1	2	2	2	2
2. Sub Sektor Perhubungan Darat	Orang	4.700	4.700	4.700	5200	5.200
	Unit	6	6	6	7	7
3. Sub Sektor Perhubungan Laut	Orang	6.700	5.700	6.960	7360	7.460
	Unit	10	9	10	11	11
4. Sub Sektor Perhubungan Udara	Orang	3.150	3.150	3350	3450	3.750
	Unit	9	9	10	10	30

Sumber: Buku Statistik Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2019

Tabel 1.16 Sarana Eksisting di Lingkungan BPSDM Perhubungan Berdasarkan Sub Sektor

SARANA DAN PRASARANA EKSISTING	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
A. Jumlah Simulator		274	300	306	316	325
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	Unit	23	24	24	25	25
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	Unit	203	224	228	235	243
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	Unit	48	52	54	56	57
B. Jumlah Mobil/Kapal/Pesawat Latih		105	113	141	151	159
1. Sub Sektor Perhubungan Darat	Unit	33	39	40	39	42
2. Sub Sektor Perhubungan Laut	Unit	9	9	7	13	14
3. Sub Sektor Perhubungan Udara	Unit	63	65	94	99	103

Sumber: Buku Statistik Badan Pengembangan SDM Perhubungan, 2019

Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan di lingkungan BPSDM Perhubungan mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sehingga kedepannya Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan akan meningkatkan status kelembagaannya. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi tantangan kedepannya untuk mengakomodir penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka updating peralatan dan simulator yang digunakan pada masing-masing sektor merupakan hal yang penting dalam mencetak SDM Perhubungan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Namun, pengadaan sarana dan prasarana seringkali terkendala dengan besaran dana yang diperlukan. Oleh karena itu diperlukan adanya skema kerjasama dan skema pendanaan yang dapat mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

E. Skema Pendanaan

Hingga saat ini, biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan sebagian besar berasal dari ABPN. Namun, besaran biaya APBN yang diperoleh belum dalam mengimbangi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sehingga perlunya peningkatan skema pembiayaan diklat bersumber Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) diantaranya menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Operasi (KSO) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya, dimana penerapan PPK-BLU pada Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan telah diatur dalam PP No. 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasi (KSO) adalah pendayagunaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya, dimana tata cara pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 43 Tahun 2018.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak. Adapun Tata cara pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 Tahun 2018.

Kedepannya, dengan berbagai jenis pola pengelolaan keuangan yang diterapkan, Lembaga diklat di Lingkungan BPSDM Perhubungan mampu memenuhi biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara mandiri.

F. Kelembagaan dan Regulasi

Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Pusat Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan

juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai dilingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan dan UPT.

Sepanjang tahun 2015-2019 telah terjadi perubahan kelembagaan pada beberapa UPT pada matra darat, laut dan udara, yakni perubahan sekolah tinggi, dan akademi menjadi politeknik serta perubahan balai menjadi politeknik atau akademi (seperti terlihat pada table terlampir). Pada matra udara, ada rencana pemindahan lokasi BP3 Curug ke Kalimantan untuk pengembangan BP3 Curuh mendekat kepada Ibu Kota Negara baru, dan untuk mengurangi persaingan pasar pada matra udara di daerah Curug.

Tabel 1.17 Perubahan Kelembagaan Diklat di Lingkungan BPSDM Perhubungan Berdasarkan Matra

BPSDM PERHUBUNGAN	PERUBAHAN KELEMBAGAAN							
	PERIODE 2010-2015*)				PERIODE 2015-2019*)			
	Balai	Akademi	Politeknik	Sekolah Tinggi	Balai	Akademi	Politeknik	Sekolah Tinggi
1. PPSDM Aparatur Perhubungan	1	0	0	0	0	0	0	0
2. Matra Darat	2	1	1	1	2	1	0	1
3. Matra Laut	8	0	2	1	6	0	0	0
4. Matra Udara	4	3	0	1	3	2	0	1

Sumber: Hasil Diskusi Evaluasi RENSTRA Tahun 2015-2019 dan Rumusan Renstra PPSDM per Sub Sektor BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Keterangan: *) LAKIP BPSDM Perhubungan, 2015

**) LAKIP BPSDM Perhubungan, 2019

NAMA UPT			
NO	SEBELUM	SESUDAH	DASAR HUKUM
MATRA DARAT			
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Palembang	Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (POLTEKTRANS SDP) Palembang	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali	Politeknik Transportasi Darat (POLTRADA) Bali	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019
3	Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun	Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019
4	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi	Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD (PTDI-STTD)	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019
MATRA LAUT			
5	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Banten	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019
6	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Malahayati	Peraturan Menteri Perhubungan Republik

			Indonesia Nomor 27 Tahun 2019
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Barombong	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019
8	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sorong	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019
9	Balai Diklat Pelayaran (BDP) Minahasa Selatan	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sulawesi Utara	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019
10	Balai Diklat Pelayaran (BDP) Padang Pariaman	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Sumatera Barat	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019
MATRA UDARA			
11	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Palembang	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019
12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi	Akademi Penerbang Indonesia (API) BANYUWANGI	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019
13	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Jayapura	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019
14	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug	Politeknik Penerbangan Indonesia Curug (PPIC)	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019
15	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar	Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Makassar	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2019
16	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan	Politeknik Penerbangan (POLTEKBANG) Medan	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019

G. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar pulau Jawa dirasakan perlu disebabkan serangkaian permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahannya adalah sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya pendistribusian penduduk ke daerah yang masih memiliki jumlah penduduk yang rendah. Ibu Kota Negara (IKN) baru dirancang memiliki konsep *Smart City*, *Smart Mobility* dengan mempertimbangkan aspek *eco friendly transportation system* dengan perpaduan antara *integrated*, *smart*, dan *sustainable*. Konektivitas dan aksesibilitas di Ibu Kota Baru akan sangat mengandalkan transportasi publik atau massal. Terlaksananya konsep tersebut harus didukung dengan perencanaan jaringan transportasi public yang baik serta didukung oleh **Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi**

yang berkompeten untuk dapat mengatur (regulator) dan mengoperasikan (operator) transportasi tersebut.

H. Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Pada saat ini sebagian besar aktivitas global terhenti akibat pandemi Covid-19. Sebagian besar pemerintah di seluruh dunia telah **menutup sementara** lembaga pendidikan dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran pandemic COVID-19.

Penutupan nasional ini berdampak hampir **73,5%** dari populasi siswa dunia. Pada 10 Mei 2020, sekitar **1.268 miliar pelajar** saat ini terkena dampak karena penutupan kegiatan belajar di sekolah sebagai respons terhadap pandemic. Menurut pemantauan UNICEF, **177 negara** saat ini menerapkan penutupan kegiatan belajar secara **nasional** dan **13 negara** menerapkan penutupan secara **local**. Dalam bidang pendidikan, semua warga dunia, termasuk masyarakat Indonesia, pada akhirnya **harus siap** dengan **pola tatanan sistem pembelajaran baru**. Model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Revolusi Industri 4.0, yaitu **penggunaan kurikulum disruptif**, yang berbeda dengan pola kurikulum dan pembelajaran konvensional. (*Sumber: marineinsight*).

Seiring dengan perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran serta penanganan dampaknya di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus tersebut, seluruh unit kerja dan sekolah-sekolah di lingkungan BPSDM Perhubungan melakukan tindakan pencegahan dengan mengadakan sosialisasi pencegahan penyebaran penyakit akibat virus corona atau Covid-19 serta menjalankan pola hidup sehat.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris BPSDM Perhubungan Nomor: KP.501/1/6 set.BPSDMP-2020 perihal Pelaksanaan Sosialisasi Penyebaran Penyakit kepada Seluruh Pegawai dan Taruna/I di Unit Kerja Masing-Masing.

Surat edaran tersebut sesuai arahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar seluruh sub sektor transportasi, termasuk lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus covid-19, serta turut serta melakukan pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona agar tidak menyebar semakin meluas di tengah-tengah masyarakat termasuk dikampus-kampus BPSDMP. Disrupsi yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 dapat memberi waktu bagi pendidik untuk lebih kreatif dan efektif dalam menggunakan model pembelajaran / perubahan metode pembelajaran menjadi *e-learning*, ujian dan pembelajaran secara daring. Di dunia di mana pengetahuan hanya berjarak satu klik, peran pendidik juga harus berubah. Dosen sebagai front providers dan front fasilitator harus mampu meningkatkan daya kreatifitas dan kompetensinya untuk menyusun bahan ajar dan memfasilitasi proses pembelajaran secara daring.

Karena selama WFH dan SFH penggunaan internet dunia sangat tinggi, agar dihimbau kepada semua taruna dan pasis serta peserta diklat untuk **bijak dalam mengirim info dan data**, kirimilah yg diperlukan untuk pembelajaran.

Rekomendasi Model pembelajaran saat pandemi COVID-19 yang:

1. **Beradaptasi dengan cepat** terhadap sistem pembelajaran baru dan implikasinya
2. **Holistik**
3. **Kesiapan (*readiness*)** para pihak yang terlibat pembelajaran jarak jauh yang **Didukung** oleh **Digitalisasi** dan **Konektifitas**
4. **Melek Teknologi** akan menjadi **kata kunci**. Pengembangan Computer Based Training (CBT) Tersedianya **Big data, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI)** adalah sisi lain sebagai konsekuensi logis agar generasi muda mampu meningkatkan literasi teknologi.

Selain perubahan metode pembelajaran, tenaga pendidik dan taruna/ diminta untuk menjalankan pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melakukan berbagai langkah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kampus. Di antaranya dengan membersihkan ruang belajar, ruang kantor, asrama, dapur dan sarana dan prasarana pendidikan yang sering disentuh oleh tangan.

I. Manajemen Pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, dimana seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka memiliki resiko yang tinggi terhadap penularan, maka kegiatan pembelajaran tidak bisa berhenti menunggu sampai pandemi hilang. Untuk tetap menjalankan fungsi kegiatan belajar dan mengajar, kegiatan pembelajaran tatap muka diganti menjadi kegiatan pembelajaran secara daring (online). Pada tahun akademik 2020/2021, terjadi transisi pembelajaran antara tatap muka dan daring. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengantisipasi kondisi terburuk adalah menggunakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran secara full daring.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dukungan untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran daring diperlukan untuk mengantisipasi revolusi industri bidang pendidikan yaitu kegiatan belajar mengajar pada masa yang akan datang tidak terbatas pada jarak dan waktu. Generasi pada masa yang akan datang akan belajar pada bidang yang mereka butuhkan sesuai dengan kebutuhan industri. Pembelajaran yang efektif dan efisien serta fleksibel akan menjadi tuntutan pasar. Distance learning akan menjadi jawaban atas tuntutan generasi pada masa yang akan datang. Distance learning terbagi menjadi dua kriteria, yaitu:

1. Belajar terbimbing (Synchronous Learning) adalah kegiatan belajar mengajar secara daring yang terikat dengan jadwal pertemuan antara murid dan guru untuk mendapatkan pembelajaran secara interaktif dan realtime.
2. Belajar Mandiri (Asynchronous Learning) adalah teknik mengajar yang berpusat pada siswa di mana sumber daya online pembelajaran yang digunakan untuk mengaktifkan berbagi informasi antara orang-orang dalam jaringan . Dalam pembelajaran asynchronous, berbagi informasi tidak dibatasi oleh tempat atau waktu. Asynchronous learning difasilitasi

oleh media, seperti email, forum diskusi online, daftar email, blog dan modul pembelajaran online, dll.

Budaya disiplin yang sudah mengakar pada budaya pendidikan BPSDM Perhubungan harus selalu ditanamkan kepada taruna-taruna BPSDM. Adanya transisi perubahan metode pembelajaran tidak serta merta menghapus budaya yang ada, sangat dimungkinkan pemantauan kegiatan penunjang dan peningkatan disiplin dilakukan secara daring pula.

Kesiapan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria dalam pembelajaran daring sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan di bawah naungan BPSDM agar masing-masing UPT memiliki standar kualitas lembaga dan lulusan yang sama antar satu dengan yang lain.

Pemenuhan NSPK dalam bidang IT dan konten/substansi akademik dapat dimulai dengan penetapan standar Learning Management System (LMS) yang digunakan oleh BPSDM. Selanjutnya, NSPK terkait dengan Computer Based Training (CBT) yaitu modul-modul pembelajaran online yang dipadukan dengan tata cara evaluasi yang menjamin kualitas hasil evaluasi.

1.2.2.3 Manajemen Pengembangan SDM Perhubungan

Permasalahan/isu strategis terkait sarana manajemen (*management tools*) pengembangan SDM Perhubungan antara lain berkenaan dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM), pendanaan pengembangan SDM Perhubungan, penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana.

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan LAKIP BPSDM Perhubungan 2018 jumlah ASN yang ditempatkan di berbagai wilayah sebanyak 2.641 pegawai yang berstatus PNS dan 3.110 pegawai berstatus non PNS dari berbagai macam latar pendidikan, dengan komposisi sebagaimana disebutkan pada **Tabel 1.19**. Hal pertama yang perlu dikaji adalah analisis beban kerja dari setiap ASN BPSDM Perhubungan, hasilnya dibutuhkan sebanyak 9772 pegawai untuk mencapai komposisi organisasi ideal, atau masih kekurangan sekitar 1819 orang pegawai yang dapat dipenuhi melalui penerimaan PNS ataupun PPPK. Diperlukan evaluasi terhadap konsep kelembagaan pengembangan SDM Perhubungan, dimana efisiensi jumlah pegawai hanya akan dapat dilakukan jika pegawai BPSDM Perhubungan hanya mengurus perencanaan program, administrasi, pengendalian, dan pelaporan.

Tabel 1.18 Komposisi Pegawai BPSDM Perhubungan

NO	JENIS	DATA
1	Jumlah Pegawai menurut status	
	PNS	2.742 orang
	Non PNS	3.110 orang
2	Jumlah pegawai berstatus PNS menurut penempatan	
	Sekretariat BPSDM Perhubungan	122 orang
	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	69 orang
	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	61 orang
	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	70 orang
	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	86 orang
	UPT Pengembangan SDM Perhubungan Darat	433 orang
	UPT Pengembangan SDM Perhubungan Laut	1.086 orang
	UPT Pengembangan SDM Perhubungan Udara	784 orang
	UPT Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	31 orang
3	Jumlah Pendidik Diklat SDM Transportasi	
	Jumlah Tenaga Pendidik UPT/Satker Diklat SDM Transportasi yang Bersertifikat dan Berkompetensi	1.195 orang
	Jumlah Tenaga Kependidikan Diklat SDM Transportasi yang Berkompetensi	2.225 orang

Sumber: ditabelkan dari LAKIP BPSDM Perhubungan, 2019

Pada tahun 2018 ini Badan Pengembangan SDM Perhubungan menargetkan memiliki 1.353 orang tenaga pendidik, tetapi hanya tercapai 1.274 orang tenaga pendidik. Hal ini dikarenakan tidak adanya formasi penerimaan PNS dan adanya mutasi pegawai serta pensiunnya pegawai. Guna menutupi kekurangan tenaga pendidik tersebut, maka UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan merekrut Dosen Terbang/Luar Biasa, Widyaiswara dan Instruktur dari instansi luar.

Sama halnya dengan tenaga pendidik, tenaga kependidikan faktor yang mendukung pencapaian tujuan meningkatnya kualitas lulusan. Pada tahun 2017 Badan Pengembangan SDM Perhubungan menargetkan 1.861 orang tenaga kependidikan yang memiliki kmpetensi di bidangnya, tetapi hanya tercapai sebanyak 1.850 orang tenaga kependidikan.

Pada Tahun 2019 Tenaga pendidik BPSDM dapat tercapai 95,75 % dengan target 1.248 orang sedangkan untuk capaian tenaga kependidikan dapat melebihi target yaitu dengan capaian 102,82 % dari target 2.164 orang.

B. Pendanaan Pengembangan SDM Perhubungan

Hingga saat ini, biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan sebagian besar berasal dari ABPN. Namun, besaran biaya APBN yang diperoleh belum dalam mengimbangi kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sehingga perlunya peningkatan

skema pembiayaan diklat bersumber Penerimaan Negara Buka Pajak (PNBP) diantaranya menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Operasi (KSO) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kedepannya, dengan berbagai jenis pola pengelolaan keuangan yang diterapkan, diharapkan BPSDM Perhubungan mampu memenuhi biaya penyelenggaraan pengembangan SDM Transportasi secara mandiri.

C. Penyediaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kelengkapan Sarana dan prasarana merupakan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM Perhubungan dalam rangka mencapai sasaran pengembangan SDM Perhubungan yang ditetapkan. **Tabel 1.16** menyampaikan informasi tentang aset sarana dan prasarana yang dikuasai oleh BPSDM Perhubungan sebagaimana tercatat dalam neraca.

Tabel 1.19 Laporan Posisi Barang Milik Negara BPSDM Perhubungan

NO	URAIAN AKUN	NILAI (Rp)
1	Tanah	7.703.080.421.347
2	Gedung dan Bangunan	5.191.697.362.651
3	Peralatan dan Mesin	8.879.557.449.152
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	121.665.000
5	Aset Tetap Lainnya	145.846.214.917
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.249.143.550
7	Aset Tak Berwujud	69.995.714.578
8	Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	111.973.601.378
9	Aset Lancar berupa Persediaan	59.561.860.320
	TOTAL	17.631.702.430.508

Sumber: Laporan Posisi BMN di Neraca tahun 2019

1.2.3 Analisis SWOT

Tabel 1.20 Analisis SWOT BPSDM Perhubungan

	STRENGTHS BPSDMP adalah Pusat Pelaksanaan Pendidikan Vokasi bidang Transportasi dengan kelengkapan Sarana dan Prasarana	WEAKNESS Keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun finansial
OPPORTUNITIES Perkembangan Teknologi untuk melakukan peningkatan kinerja BPSDMP	STRATEGI SO Strategi Pengembangan Metode Pembelajaran e-learning dengan memanfaatkan Teknologi dan CBT	STRATEGI WO: Melakukan pemanfaatan Teknologi untuk efektifitas ruang dan waktu serta efisiensi biaya pertemuan.
THREATS Terbatasnya minat masyarakat dalam melaksanakan diklat bidang Transportasi	STRATEGI ST: Pengembangan Program Studi dan Kompetensi keahlian yang diakui dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan Industri dan dunia kerja sehingga memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat	STRATEGI WT: Sosialisasi melalui media terkait Perguruan Tinggi dan Programnya di lingkungan BPSDMP. Pengembangan Kompetensi kepada pegawai terkait kinerja organisasi.

Pemetaan Kompetensi - Analisis Produksi SDM Transportasi (*Training Need Analysis-TNA*)

Program peningkatan kompetensi menjadi acuan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai negeri sipil (PNS). Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan”. Kebijakan ini secara eksplisit mendudukkan konsep kompetensi sebagai acuan utama untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan karir PNS, terutama dalam hal promosi dan jenjang karir seorang PNS.

Demikian juga, dalam PP No. 101 Tahun 2000 tentang kebijakan pendidikan dan pelatihan aparatur, konsep kompetensi juga dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan diklat aparatur. Pasal 3, misalnya, menegaskan bahwa sasaran diklat adalah untuk mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing, baik itu untuk Diklat Kepemimpinan, Teknis, dan Fungsional. Disamping itu, Pasal 17 menegaskan bahwa kurikulum diklat aparatur mesti disusun berdasarkan atas standar kompetensi jabatan PNS.

Kuesioner *training need analysis* ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kesenjangan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/Xiii/10/6/2001 Tentang Pedoman Umum Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Kuesioner *training need analysis* ini terbagi ke dalam 2 bagian. Bagian I bertujuan untuk mengetahui kebutuhan SDM Perhubungan yang membutuhkan Program Diklat yang bersumber dari (1) adanya kegiatan human resources planning yang ditunjukkan oleh besaran kebutuhan diklat prajabatan (2) adanya kegiatan performance appraisal yang ditunjukkan dengan adanya kesenjangan kompetensi.

Metode yang digunakan dalam penyusunan kuesioner Bagian I ini adalah metode analisis diskrepensi. Informasi diskrepensi diperoleh dengan membandingkan angka kredit yang diperoleh dari pengukuran kinerja (performance appraisal) dengan standard angka kredit untuk suatu jabatan. Sedangkan yang menjadi unit analisis dalam penyusunan kuesioner ini adalah kebutuhan pelatihan pada tingkat organisasi. Pemilihan unit analisis organisasi dipilih dengan pertimbangan agar diperoleh informasi agregat jumlah SDM yang membutuhkan DIKLAT per tahun.

Jabatan pada tingkat organisasi selanjutnya dipilah menjadi jabatan structural dan jabatan fungsional. Untuk masing masing jenis jabatan dilakukan analisis kebutuhan pelatihan secara agregatif dengan membandingkan kompetensi actual dan kompetensi standard untuk masing masing jabatan.

Bagian II bertujuan untuk mengetahui daya saing lulusan dalam lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan. Metode yang digunakan adalah metode studi penelusuran lulusan (*tracer study*). Yang menjadi unit analysis dalam TNA ini adalah lulusan berbagai Lembaga diklat di lingkungan BPSDM. Hasil dari penelusuran lulusan dari Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan hingga tahun 2019 dengan waktu tunggu lulusan selama 1 tahun akan disampaikan pada **Tabel 1.21**.

Tabel 1.21 Komulatif Lokasi Kerja Lulusan Lembaga Diklat BPSDM hingga Tahun 2019

NO	TEMPAT KERJA	Jumlah lulusan	Persentase
A	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	718	100.00
1	PNS	406	56.55
2	BUMN	124	17.27
3	Swasta	53	7.38
4	Belum Bekerja	135	18.80
B	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	3161	100.00
1	PNS	247	7.81
2	BUMN	476	15.06
3	Swasta	1800	56.94
4	Belum Bekerja	638	20.18
B	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	735	100.00
1	PNS	99	13.47
2	BUMN	32	4.35
3	Swasta	102	13.88
4	Belum Bekerja	502	68.30

D. Manajemen Resiko

Manajemen Resiko merupakan strategi dan langkah yang dilakukan BPSDM Perhubungan dalam rangka mencapai peningkatan perbaikan baik dari sisi manajemen maupun teknis. Pemberlakuan Manajemen Resiko dilakukan guna menjamin unsur keselamatan dan keamanan di lingkungan BPSDM Perhubungan yang diperuntukan untuk semua Civitas di lingkungan BPSDM Perhubungan. Selain itu manajemen resiko di BPSDM Perhubungan dilakukan dalam rangka mewujudkan *Good Government* yang lebih baik dan berkomitmen untuk menerapkan Manajemen Resiko sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Penerapan manajemen resiko juga dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain :

1. Menetapkan dan mengelola resiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan,
2. Melindungi kementerian dari resiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi,
3. Meningkatkan kinerja organisasi didalam pencapaian tujuan,
4. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen resiko.

Manajemen resiko Merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait resiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Manajemen Resiko merupakan suatu rangkaian Proses aktifitas yang harus dilakukan secara menyeluruh. Proses manajemen resiko disesuaikan berdasarkan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja di lingkungan BPSDM Perhubungan. Serangkaian proses manajemen resiko meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis yang diarahkan dengan melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Penetapan Konteks/Tujuan
2. Identifikasi Resiko;
3. Analisis Resiko;
4. Evaluasi Resiko;
5. Penanganan Resiko;
6. Pemantauan Dan Reviu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dalam melakukan analisa resiko telah di tetapkan matrik resiko yang nantinya dapat digunakan dalam melakukan assessment/menilai resiko sehingga dapat menentukan mitigasi yang tepat dalam mengendalikan atau mengontrol resiko pada unit kerjanya. Matriks penilaian resiko yang dimasuk adalah sebagai berikut:

Gambar.1.2 Matriks Penilaian Resiko

Tingkat Frekuensi Kejadian		Tingkat Dampak				
		Tidak Signifikan	Dapat Ditolerir	Tidak Diinginkan	Meluas	Fatal
Uraian	Nilai	1	2	3	4	5
Sangat Sering	1	Acceptabel	Issue			
Sering	2	Acceptabel	Issue	Issue		
Cukup Sering	3	Acceptabel	Issue	Issue		
Jarang	4	Acceptabel	Acceptabel	Issue	Issue	
Sangat Jarang	5	Acceptabel	Acceptabel	Acceptabel	Issue	Issue

Red Area sebagai Objek Untuk Penyusunan Rencana Aksi

Isu-isu strategis yang merupakan tantangan dapat juga menjadi resiko yang perlu dilakukan identifikasi hingga mitigasinya. Yang termasuk dalam isu-isu strategis dan tidak terbatas pada hal-hal berikut :

1. Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan merupakan suatu kelebihan dan tantangan untuk BPSDM Perhubungan. Perkembangan Industri Transportasi yang sangat cepat membuat BPSDM Perhubungan harus melakukan penyesuaian dengan perkembangan Industri yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan mitigasi awal dengan melakukan pemetaan pengembangan program-program pendidikan dan pelatihan yang *link and match* dengan kebutuhan industri.
2. Pengembangan Perguruan Tinggi di lingkungan BPSDM Perhubungan dengan pengelolaan keuangannya sebagai Badan Layanan Umum. Hal ini juga dapat menjadi Resiko dalam pemenuhan target BLU pada masing masing UPT BLU dikarenakan perbedaan sisi kelebihan dan kelemahan masing masing Unit Pelaksana Teknis. Dalam hal ini mitigasi awal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran Pusbang sebagai pembina teknis dalam melihat kelebihan dan kelemahan masing masing UPTnya sehingga dapat melakukan pemetaan dan strategi dalam meningkatkan kualitas dan layanan di masing-masing matryanya.
3. Perubahan kondisi lingkungan. Mulai tahun 2020 terdapat wabah kesehatan yang membuat kondisi lingkungan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan pengkondisian *new normal*, hal ini juga perlu dilakukan manajemen resiko dalam menghadapi perubahan lingkungan tersebut dengan melakukan program pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan terobosan-terobosan lainnya sebagai mitigasi awal yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan pemantauan untuk membuat suatu mitigasi lainnya dalam mencapai peningkatan pengendalian resiko dan tetap mengutamakan kualitas lulusan serta komposisi teknis pembelajaran vokasi.
4. Perkembangan Teknologi yang dinamis menuntut pendidikan dan pelatihan dapat menyesuaikan dari sisi sarana prasarana pendidikannya maupun adaptasi perkembangan teknologi di bidang industrinya. Hal ini perlu dilakukan mitigasi agar pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BPSDM Perhubungan tetap memiliki kualitas serta *link and match* dengan kondisi Industri Transportasinya. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan pembaharuan/review metode pembelajaran serta kurikulum silabus secara berkesinambungan juga perlu dilakukan.
5. Skema Pendanaan di lingkungan BPSDM Perhubungan menggunakan pendanaan APBN dan PNB/BLU. Pada anggaran APBN masih terdapat keterbatasan ketersediaan anggaran sehingga pengembangan dengan skema APBN sangatlah terbatas. Hal ini sdh dapat dilakukan mitigasi dengan penambahan skema pendanaan melalui skema PBNP/BLU. Namun demikian pada skema pendanaan PBNP/BLU masih ditemukan resiko tidak tercapainya target pendapatan yang diharapkan. Hal ini diperlukan suatu tindak lanjut strategi yang tepat dan berkesinambungan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan dalam penajakan pasar melalui kerjasama-kerjasama sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat dan stakeholder yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan PNB/BLU dilingkungan BPSDM Perhubungan.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPSDM PERHUBUNGAN

2.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN PRIORITAS KERJA PRESIDEN PERIODE TAHUN 2019-2024

2.1.1 Visi dan Misi Presiden Periode Tahun 2019-2024

Sasaran pokok pembangunan nasional periode tahun 2019-2024 mengacu pada visi dan misi Presiden yakni

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Misi periode tahun 2020-2024 tersebut didukung oleh 9 misi presiden, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

2.1.2 Prioritas Kerja Periode Tahun 2019-2024

Visi misi presiden periode tahun 2020-2024 tersebut didukung oleh 5 prioritas kerja yang sesuai dengan Arahan Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2 **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024**

Sasaran pokok pembangunan nasional 2020-2024 mengacu pada visi dan misi arahan RPJPN 2005-2025, dimana visi pembangunan 2005-2025 yakni **Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur**. Visi pembangunan 2005-2025 tersebut diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan, dimana upaya peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dimulai dari RPJMN 2010-2014 hingga RPJMN 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tidak mengenal istilah visi dan misi, oleh karena itu, visi dan misi pembangunan nasional hingga mengacu pada dokumen RPJPN 2005-2025. Dokumen RPJMN 2020-2024 menyampaikan visi misi, sasaran, indikator dalam bentuk tema pembangunan, agenda pembangunan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator.

2.2.1 **Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024**

Tema pembangunan pada RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Tema pembangunan periode 2020-2024 tersebut didukung oleh 7 agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi pelayanan publik.

2.2.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 adalah :

mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 yang juga merupakan RPJMN ke IV dalam RPJPN 2005-2025, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan yakni :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Ke-empat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional untuk mempermudah dalam pelaksanaan implementasinya.

Gambar 2.1. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024

sumber : PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020

Sasaran pembangunan yang harus dicapai dalam periode 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 terangkum dalam **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Sasaran Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
		Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin	Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
		Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN
	Pemerataan	Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
		Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
		Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
		Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
		Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
		Pengentasan kemiskinan; dan
		Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
		Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
		Moderasi beragama; dan
		Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
		Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
		Pembangunan infrastruktur perkotaan;
		Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
		Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6	Membangun Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
		Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan

NO	PRIORITAS NASIONAL	SASARAN
	Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Iklim; dan Pembangunan Rendah Karbon.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan; Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020

Di dalam Arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 Misi yang telah disampaikan, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4 sebagai berikut:

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

1. Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
2. Mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah;
3. Meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital;

4. Memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1. Pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur;
2. Meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut;
3. Membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rel ganda, dan bandara di Sukabumi.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- Mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020 – 2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024 menyadur dari dokumen naskah teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang disusun oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

2.3.1 Visi Kementerian Perhubungan

Visi Kementerian Perhubungan yang tercantum Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 adalah:

“KEMENTERIAN PERHUBUNGAN YANG BERUPAYA MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS NASIONAL YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH GUNA Mendukung Terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

- **Konektivitas Nasional** merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara..
- **Handal** berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.
- **Berdaya Saing** berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.
- **Nilai tambah** berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

2.3.2 Misi Kementerian Perhubungan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, serta penyelarasan dan sejalan dengan Arahkan Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden, maka ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan

Tujuan dan sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024 dirumuskan dalam bentuk peta strategi (*strategy map*) berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) pada 4 perspektif: *Stakeholders Perspective* (SP), *Customer Perspective* (CP), *Internal Business Perspective* (IBP), dan *Learning and Growth Perspective* (LGP) sebagaimana divisualisasikan pada **Gambar 2.1**.

Terdapat 5 (lima) tujuan pembangunan bidang transportasi yang penyelenggaraannya menjadi tugas dari Kementerian Perhubungan untuk periode 2020-2024 adalah:

- T1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.
- T2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi.
- T3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.
- T4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.
- T5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran, dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Adapun sasaran pembangunan bidang transportasi yang diharapkan dicapai oleh program-program di Kementerian Perhubungan periode 2020-2024 akan disampaikan dalam **Tabel 2.4**.

Sasaran dan indikator kinerja pembangunan Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang memiliki kaitan erat dengan BPSDM perhubungan antara lain :

- a. Sasaran (4) Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum dengan Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum
- b. Sasaran (5) Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten dengan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten
- c. Sasaran (8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan Indikator Kinerja Kegiatan Indeks RB Kementerian Perhubungan

Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya konektivitas nasional	IKSS 1 Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	IKSS 2 On Time Performace Layanan Transportasi
		IKSS 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	IKSS 4 Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan
4	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum	IKSS 5 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum
5	Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	IKSS 6 Tingkat pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten
6	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	IKSS 7 Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024
7	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian	IKSS 8 Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	IKSS 9 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015-2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Sasaran strategis ini juga disusun dengan mempertimbangkan fokus utama Kementerian Perhubungan dalam mendukung arahan Presiden (**Gambar 2.2**).

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan:

1. Meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
2. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
3. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning and growth perspective, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Stakeholders Perspective

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional.

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan.

2. Customer Perspective

Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- IKSS 2.2 On Time Performance Layanan Transportasi.

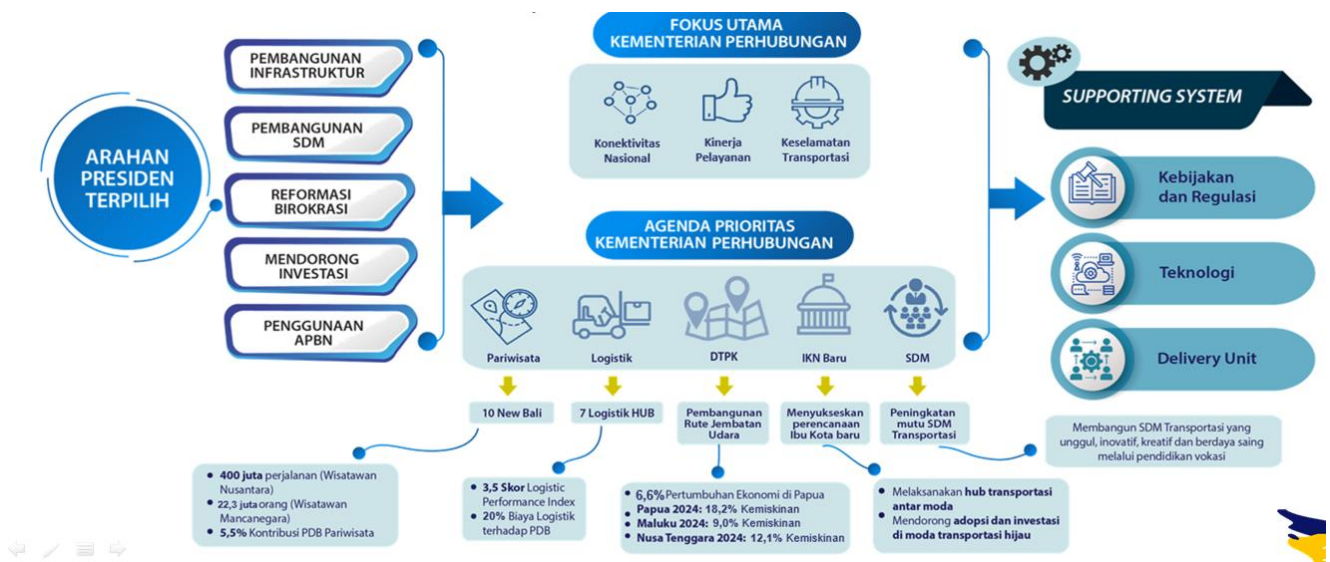
3. Internal Process Perspective
 - a. Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum.
 - b. Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten.
 - c. Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi.
 - d. Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
 - Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".
4. Learn And Growth Perspective

Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:

 - Indeks RB Kementerian Perhubungan.

Selengkapnya kompilasi secara lengkap memuat Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.5 dibawah ini.

Gambar 2.2 Fokus Utama Kementerian Perhubungan



Gambar 2.3 Peta Strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020

Tabel 2.5. Langkah Konkrit Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan melalui Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	- On Time Performance Layanan Transportasi - Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan Produktif.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatkan keselamatan transportasi Meningkatkan Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori "Sangat Baik"	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" Indeks RB Kementerian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO2 pada tahun 2024

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020

2.4 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BPSDM PERHUBUNGAN

2.4.1 Visi BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Mengacu pada Visi Misi Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan 2020-2024 maka dirumuskan Visi BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“BPSDM Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Terpenuhinya SDM Transportasi yang maju, mandiri, kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam mewujudkan konektivitas nasional untuk mendukung Visi dan Misi Kementerian Perhubungan: Konektivitas Nasional Yang Handal, Berdaya Saing Dan Memberikan Nilai Tambah”

2.4.2 Misi BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai visi BPSDM Perhubungan 2020-2024 yang telah ditetapkan, BPSDM Perhubungan menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu dan relevansi lulusan diklat transportasi;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi.

2.4.3 Tujuan BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

2.4.3.1 Hirarki Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerjanya) BPSDM Perhubungan 2020-2024 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 4 perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective* (SP), yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengembangan SDM di bidang Transportasi yang dilaksanakan oleh BPSDM Perhubungan. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);
- *Customer Perspective* (CP), yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (*outcome*) berupa layanan transportasi darat pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (*user*) dalam hal ketersediaan (*existence/accessibility and capacity*), pelayanan (*time, cost, quality, punctuality, etc*), serta keselamatan dan keamanan (*safety and security*). Kualitas layanan transportasi darat yang baik akan menjadi penentu

efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level *Stakeholders Perspective* (SP);

- *Internal Business Perspective* (IBP), yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (*business process*) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam rangka pengembangan SDM di bidang Transportasi yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (*costumer perspective/CP*) dan berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (*stakeholders perspective/SP*). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPSDM Perhubungan sesuai pasal 785 dan pasal 786 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) Pelaksanaan pengembangan SDM di bidang transportasi, (4) evaluasi dan pelaporan di pengembangan SDM Transportasi (Pengembangan SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Aparatur Perhubungan).

Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (*POAC/planning, organizing, actuating, and controlling*) dilakukan oleh BPSDM Perhubungan dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang pengembangan SDM di bidang Transportasi.

- *Learning and Growth Perspective* (LGP), yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (*basic capital*) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna.

Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (*Man, Money, Machine, Method, Material, and Information*).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi BPSDM Perhubungan disampaikan pada **Gambar 2.4**. Dalam hal ini sesuai dengan nomenklatur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dalam **Gambar 2.4** tersebut digunakan beberapa istilah berikut:

- TS (Tujuan Strategis) yakni tujuan sebagai penjabaran Visi K/L yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional/Sasaran Strategis (SS) yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (dalam mendukung sektor ekonomi di segala bidang). Dalam hal ini, TS (Tujuan Strategis) merupakan tujuan untuk Stakeholders Perspectives/SP yang menjadi *concern* dari Presiden dan yang ditugaskan kepada Menteri untuk melaksanakannya.

- TP (Tujuan Program), yakni tujuan sebagai penjabaran dari Visi Unit Eselon I (BPSDM Perhubungan) yang dilengkapi dengan Sasaran Program (SP) yang hendak dicapai dalam rangka menyediakan pelayanan publik (*outcome*), dalam hal ini di bidang transportasi darat. TP (Tujuan Program) merupakan tujuan untuk *Costumer Perspectives/CP* yang menjadi *concern* dari Menteri dan ditugaskan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) untuk melaksanakannya.
- TK (Tujuan Kegiatan), yakni tujuan sebagai penjabaran dari Visi Unit Eselon II/UPT (Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan) yang dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan (SK) berupa keluaran kegiatan (*output*) ataupun pemanfaatannya (*outcome*) yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPSDM Perhubungan. TK (Tujuan Kegiatan) merupakan tujuan untuk *Internal Business Perspectives/IBP* (yang sifatnya teknis) dan *Learning and Growth Perspectives/LGP* (yang sifatnya administratif) yang menjadi *concern* dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) dan ditugaskan kepada para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM Perhubungan) untuk melaksanakannya.

2.4.3.2 Tujuan BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Tujuan BPSDM Perhubungan dalam renstra periode tahun 2020-2024 dirumuskan dalam 3 (tiga) butir tujuan yang merepresetasikan pencapaian visi BPSDM Perhubungan periode tahun 2020-2024 SDM Transportasi yang maju, mandiri, kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Tujuan BPSDM Perhubungan ini meliputi:

Tujuan BPSDMP	Indikator Kinerja Tujuan	Ket
T1. Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
T2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi	Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%
	Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
T3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi	Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai

2.4.4 Sasaran Program BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Perumusan sasaran program BPSDM Perhubungan didasarkan pada hasil penurunan sasaran strategis dan sasaran strategis program Kementerian Perhubungan dan analisis terhadap tugas pokok dan fungsi BPSDM Perhubungan. Berdasarkan Surat Bersama Kemenkeu – KemenPPN/Bappenas No S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tanggal 24 Juni 2020 tentang Pedoman Redesain Perencanaan dan Penganggaran K/L, selanjutnya BPSDMP melakukan Redesain Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) K/L Progam dan Kegiatan, dimana Struktur Anggaran BPSDMP sesuai dengan RSPP adalah :

- Fungsi : a. Pendidikan
b. Ekonomi
- Program : a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)
b. Program Dukungan Manajemen (WA)
- Kegiatan : 8 kegiatan,
- Adapun rincian kegiatan BPSDMP adalah :
- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)
 - 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi;
 - 2) Pendidikan Transportasi;
 - b. Program Dukungan Manajemen (WA)
 - 1) Legislasi dan Litigasi SDM Transportasi;
 - 2) Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama SDM Transportasi;
 - 3) Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SDM Transportasi;
 - 4) Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi;
 - 5) Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasi;
 - 6) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Sasaran program dan sasaran kegiatan BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 diukur dengan indikator kinerja. Sasaran diukur dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam indikator kinerja.

Tabel 2.9 Indikator Kinerja BPSDM Perhubungan 2020-2024

PERSPEKTIF	TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT
		SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	
Costumer Perspective	T1. Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
			IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
		SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
			INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
			IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
			IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%
			IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	%
			IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
			IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
			IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
			IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks
		SASARAN KEGIATAN (SK)		
Internal bussiness	T2. Meningkatkan	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%

PERSPEKTIF	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT
process	Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi	Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan		
		SK.WA.03.02. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur	IKK 9.1 Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	Indeks
		SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%
		SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
			IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%
Learn & Growth	T3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi	SK.WA.03.03. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
			IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
			IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
			IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
			IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
			IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
			IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
		SK .WA.01.01. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP	IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP	Nilai
		SK.DL.01.01. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	IKK 21. Kualitas Kebijakan BPSDMP	%
		SK.WA.03.04. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
			IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
			IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
		SK.WA.03.05. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
			IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

Uraian sasaran strategis dan indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. *Customer Perspective*

Sasaran Program dalam *Customer Perspektive* terdiri dari :

Tabel 2.6 *Customer Perspektive* BPSDM Perhubungan 2020-2024

SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT
SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks
	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%
SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SAT
	IKK.1 Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang
	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%
	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	%
	IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%
	IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan
	IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen
	IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks

2. *Internal Business Process Perspective*

Sasaran kegiatan dalam *perspektif internal business process* terdiri dari 4 (empat) sasaran kegiatan yang meliputi:

Tabel 2.7 *Perspektif Internal Business Process* BPSDM Perhubungan 2020-2024

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SAT
SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%
SK.WA.03.02. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur	IKK 9.1 Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	Indeks
SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%
SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%
	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%

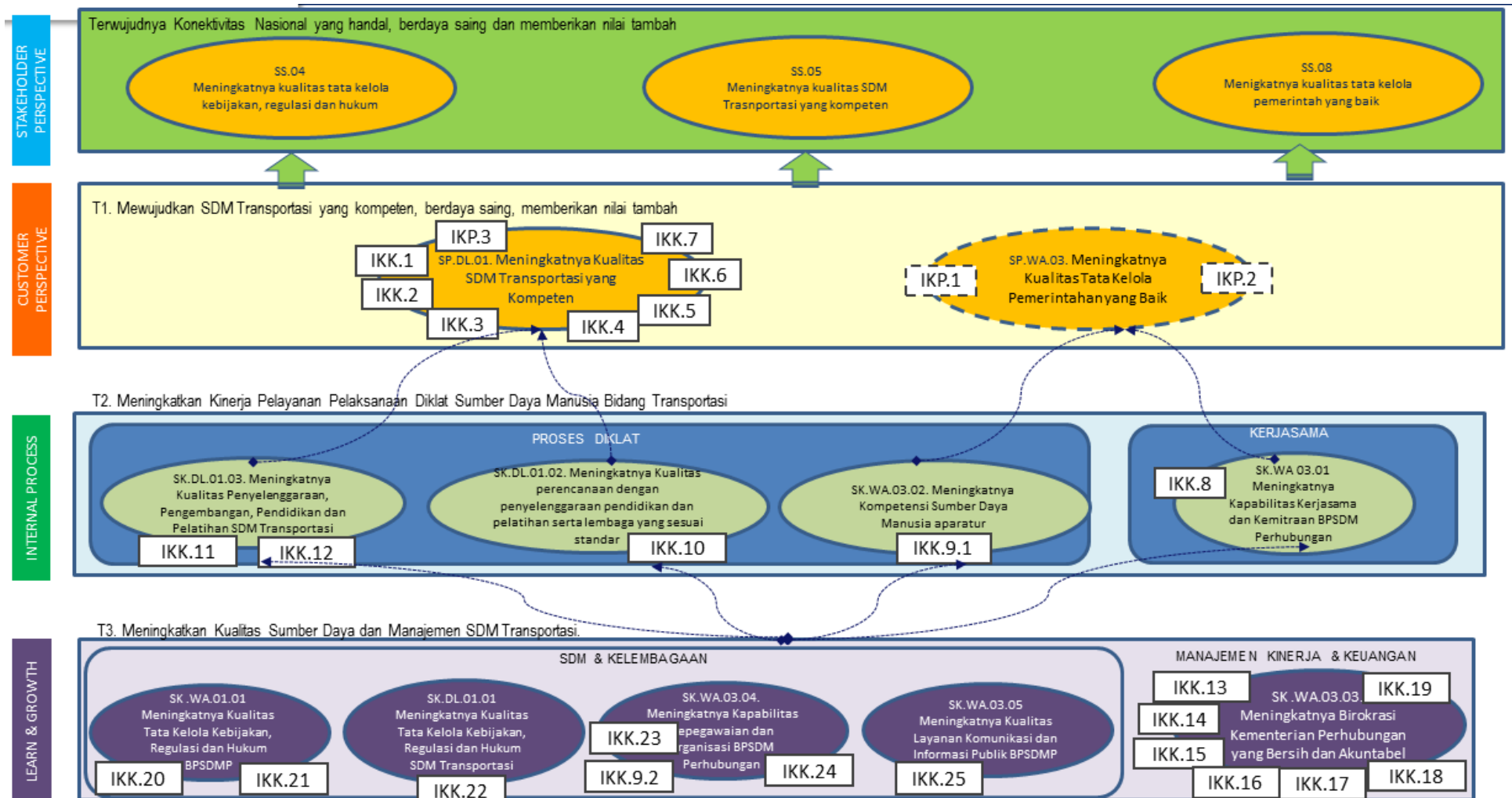
3. *Learn & Growth Perspective*

Sasaran kegiatan dalam *perspektif learn & growth* terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan yang meliputi:

Tabel 2.8 *Perspektif Learn & Growth* BPSDM Perhubungan 2020-2024

SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SAT
SK .WA.03.03. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level
	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai
	IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai
	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai
	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai
	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai
	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai
SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP	IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP	Nilai
	IKK 21. Persentase Kualitas Kebijakan BPSDMP	%
SK.DL01.04. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%
SK.WA.03.04. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai
	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks
	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai
SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%

Secara lengkap dapat dilihat Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui Gambar 2.3 Peta Strategis dan Tabel 2.9 Indikator Kinerja BPSDM Perhubungan 2020-2024 dibawah ini.



Gambar 2.4 Peta Strategi BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Pengukuran Indikator Kinerja dilakukan berdasarkan rumusan, formulasi, pembobotan, istilah dan tata cara sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
T1. Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan oleh Kementerian PAN-RB
		IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%	1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lingkungan BPSDM Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi BPSMDP sebagaimana dijelaskan dalam PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%). 2. Dimensi yang diukur meliputi unsur K3.
	SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten dan Berkeselamatan: $(C_{vokasi} \times W_{vokasi}) + (C_{kompetensi} \times W_{kompetensi})$ Dimana: W _{vokasi} = Bobot Persentase penyerapan lulusan diklat pembentukan 60% W _{kompetensi} = Bobot persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi 40% Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (C _{vokasi}) Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi (C _{kompetensi})
		IKK.1 Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang	Jumlah Realisasi Peserta Diklat Transportasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun (n) n : tahun berjalan Definisi : Jumlah Peserta Diklat Transportasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pada tahun (n) <u>Meta Indikator:</u> - Jumlah Peserta Diklat Pembentukan - Jumlah Peserta Diklat Teknis (Penjenjangan, revalidasi, kerjasama dll) - Jumlah Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah Peserta diklat daerah afirmasi (sesuai dengan PP No.78 Tahun 2014) - Jumlah Peserta diklat daerah rawan bencana - Jumlah Peserta beasiswa
		IKK.2 Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%	$\left(\frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Transportasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target lulusan Diklat Transportasi pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
				n : tahun berjalan <u>Definisi:</u> Prosentase jumlah lulusan Diklat Transportasi yang telah lulus dibandingkan dengan peserta pada satu angkatan yang sama <u>Meta Indikator:</u> - Lulus dalam uji kompetensi - IPK > 3 (untuk diklat pembentukan) - Lulus tanpa terlibat tindak kekerasan / catatan kriminal - Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan - Jumlah Lulusan Diklat Pelatihan (Penjenjangan, revalidasi, kerjasama dll)
		IKK. 3 Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	%	$\left(\frac{\text{Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } (n - 1) \text{ yang telah mendapat pekerjaan pada tahun } (n) \leq 1 \text{ tahun}}{\text{Jumlah keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan pada tahun } (n - 1)} \right) \times 100 \%$ n : tahun berjalan <u>Definisi:</u> Prosentase jumlah lulusan Diklat Pembentukan tahun (n-1) yang telah mendapat pekerjaan pada tahun n dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dari keseluruhan lulusan Diklat Pembentukan yang lulus pada tahun (n-1). <u>Meta Indikator :</u> - Masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama tidak lebih dari 1(satu) tahun - Mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi (linier dengan jurusan yang diambil)
		IKK.4 Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%	$\left(\frac{\text{Jumlah Kapasitas Sarpras yang digunakan pada tahun } (n)}{\text{Jumlah Keseluruhan Kapasitas Sarpras pada tahun } (n)} \right) \times 100 \%$ n : tahun berjalan <u>Definisi:</u> Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir ; <u>Meta indikator :</u> - Jumlah sarana layak guna yang berteknologi tinggi/mutakhir - Jumlah prasarana yang layak guna - Prasarana yang dibangun sesuai dengan masterplan
		IKK.5 Jumlah Kegiatan Pengabdian	Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pada Lembaga Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara Dan Perkeretaapian Yang Dilaksanakan

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
		Masyarakat yang dilaksanakan		n : tahun berjalan Definisi: jumlah kegiatan pengabdian masyarakat pada lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang dilaksanakan di bawah naungan BPSDM Perhubungan. Meta indikator : - Jumlah Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan
		IKK.6 Persentase Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	dokumen	Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional Satuan : Dokumen n : tahun berjalan Definisi: Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional pada lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian di bawah naungan BPSDM Perhubungan. Meta indikator : - Jumlah kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional
		IKK.7 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	a. Petugas survei menggunakan data sekunder dari Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berupa populasi tahunan. Jumlah responden minimal mewakili populasi <i>peak season</i> tahunan dan ditentukan dengan menggunakan tabel sampel dari Morgan and Krejcie atau dengan perhitungan sebagai berikut: $S = \{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\} / \{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}$ Dimana: S = jumlah sampel λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10% N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
				d = 0,0 b. Teknik pelaksanaan survei dilakukan dengan cara wawancara/interaksi kepada responden. Survei yang dilaksanakan melalui e-survey bisa dilakukan melalui layar monitor yang telah disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik atau melalui petugas dengan menggunakan gawai (alat komunikasi). c. Apabila terdapat keterbatasan sarana dan prasarana (jaringan internet), maka survei dapat dilakukan secara manual dengan menyebarkan formulir survei kepada responden. d. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam formulir survei elektronik/manual memuat sembilan unsur SKM yaitu persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana. Unsur-unsur tersebut dapat digunakan seluruhnya atau berupa kombinasi dari beberapa unsur disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (contoh formulir survei pada lampiran 3). e. Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda yang bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1) Tidak baik, diberi nilai persepsi 1; 2) Kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 3) Baik, diberi nilai persepsi 3; 4) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4. f. Layanan yang disurvei adalah perjenis layanan dan disesuaikan dengan Standar Pelayanan. g. Melakukan tabulasi data secara berurutan untuk setiap unsur. Skala likert untuk masing-masing pertanyaan (unsur) terdiri dari buruk (nilai 1), kurang baik (nilai 2), baik (nilai 3), dan sangat baik (nilai 4). Masing-masing jumlah responden yang memilih skala likert tersebut disalin kedalam tabel kemudian dikalikan nilai masing-masing dan dirata-ratakan. h. Menghitung bobot untuk masing-masing pertanyaan (unsur) dengan melakukan pembagian antara 1/jumlah unsur yang digunakan, misalkan jumlah unsur yang digunakan ada sembilan unsur maka $= 1/9 = 0,11$. i. Melakukan perhitungan Nilai Rata – Rata Tertimbang (NRR) dengan cara mengalikan bobot dengan nilai rata-rata untuk masing-masing pertanyaan. j. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai rata-rata tertimbang untuk semua pertanyaan. k. Langkah berikutnya adalah mengalikan jumlah nilai rata-rata tertimbang dengan 25 maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan																									
				Bilangan pengali nilai dasar 25 dimaksudkan untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100. l. Kategori mutu pelayanan dan kinerja pelayanan dapat digolongkan kedalam tabel sebagai berikut: Tabel 1. Kategori Mutu Layanan <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Nilai Interval</th><th>Nilai Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr> </tbody> </table> Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 m. Agregasi perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Agregasi perhitungan survei kepuasan masyarakat adalah proses pengumpulan hasil SKM pada masing-masing subsektor untuk dilakukan penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan. 2) Agregasi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Agregasi Indeks Layanan Publik dan Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat. Agregasi Indeks Layanan Publik digunakan untuk menghitung indeks keseluruhan dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan. Sedangkan Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk menghitung indeks dalam satu Unit Kerja Eselon 1. 3) Agregasi Indeks Layanan Publik dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut: $\text{Agregasi Indeks Layanan Publik} = \frac{\sum \text{agregasi IKM seluruh subsektor}}{\sum \text{Unit Kerja Eselon I yang melaksanakan SKM}}$ 4) Agregasi Indeks Kepuasan Masyarakat untuk masing-masing subsektor dilakukan dengan metode pendekatan: $\text{Agregasi IKM} = \sum (IKM_a \times f_a) + (IKM_b \times f_a) + (IKM_c \times f_c) + (IKM_d \times f_d)$	No	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
No	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																									
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																									
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																									
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																									

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
				Keterangan: $IKM_{a,b,c,d}$ = Nilai rata-rata IKM pada Unit Pelayanan Publik mulai tipe tertinggi sampai dengan tipe terendah $f_{a,b,c,d}$ = Faktor koefisien pada masing-masing Unit Penyelenggara Pelayanan Publik mulai tipe tertinggi sampai dengan tipe terendah. Faktor koefisien diperoleh dengan membagi populasi pada unit pelayanan publik tipe tertentu dengan jumlah total populasi pada semua tipe unit pelayanan publik. Populasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sebagai contoh untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) populasi yang digunakan adalah jumlah penumpang pertahun.
	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		
T2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	IKK8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%	$\left(\frac{\text{Jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$ n : tahun berjalan Definisi: Prosentase jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti tahun (n) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n) dilingkup sekretariat BPSDMP, Pusbang Aparatur dan BP3KSDMT Meta indikator : - Jumlah kerjasama Dalam Negeri - Jumlah Kerjasama Luar Negeri

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan		
				Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN Kementerian Perhubungan berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.		
				NO	Dimensi	Bobot
				A	Kualifikasi (Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS)	
				1	Pendidikan S-3 (Strata Tiga).	25
				2	Pendidikan S-2 (Strata Dua).	20
				3	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/DIV (Diploma Empat).	15
				4	Pendidikan D-III (Diploma Tiga).	10
				5	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat.	5
				6	Di bawah SLTA.	1
				Total Kualifikasi		25%
				B	Kompetensi	
				1	Diklat Kepemimpinan (Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan).	15
				2	Diklat Fungsional Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional).	15
				3	Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis.	15 / 22,5
				4	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnnya Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnnya).	10 / 17,5

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan	
					jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
				Total Kompetensi	40%
				C	Kinerja (Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP))
				1	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
				2	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
				3	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.
				4	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
				5	PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
				Total Kinerja	30%
				D	Disiplin
				1	PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
				2	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
				3	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.
				4	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
				Total Disiplin	5%
				Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Perhubungan (A+B+C+D)	
				100%	

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
	SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar	IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%	$\left(\frac{\text{Jumlah Jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pada tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan jumlah diklat yang ditargetkan pada dokumen perencanaan untuk tahun (n)}} \right) \times 100 \%$ Satuan : % n : tahun berjalan <u>Definisi:</u> Persentase Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun (n) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jenis pendidikan dan pelatihan yang ditargetkan pada tahun (n) <u>Meta Indikator :</u> - Jumlah Jenis Diklat Pembentukan - Jumlah Jenis Diklat Teknis (Penjenjangan, revalidasi, kerjasama dll) - Jumlah Jenis Diklat Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan yang terselenggara sesuai dengan perencanaan awal berdasarkan kebutuhan pasar/industri transportasi, SKKNI, atau TNA.
	SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	$\left(\frac{\text{Jumlah Program Studi yang terakreditasi pada Lembaga pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah Total Program Studi pada Lembaga pendidikan dan pelatihan}} \right) \times 100 \%$ Satuan : % n : tahun berjalan <u>Definisi:</u> Presentase jumlah Program Studi yang terakreditasi (minimal "B") atau sesuai standar dibandingkan dengan total keseluruhan Program Studi pada lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan. <u>Meta indikator :</u> - Jumlah Program Studi yang dimiliki - Jumlah prodi yang terakreditasi minimal "B" oleh BAN-PT - Penilaian Program Studi baru H+3 ; H; tahun Prodi baru ditetapkan/disahkan - Jumlah Jenis Diklat yang dimiliki (peruntukan non Perguruan Tinggi) - Jumlah Jenis Diklat yang memiliki approval oleh instansi berwenang

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan																					
		IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	Nilai	$\left(\frac{\text{Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditindaklanjuti tahun (n)}}{\text{jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$ Satuan : % n : tahun berjalan Definisi: Prosentase jumlah dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang telah ditindaklanjuti tahun (n) dibandingkan dengan jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti pada tahun (n) di lingkup Satker/UPT matra darat, laut dan Udara Meta indikator : - Jumlah kerjasama bidang pendidikan dan pelatihan Dalam Negeri - Jumlah Kerjasama bidanga pendidikan dan pelatihan Luar Negeri																					
T3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi	SK .WA.03.03. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP	Level	Penilaian <i>Maturity Level</i> SPIP difokuskan pada 25 sub Unsur SPIP. Masing-masing sub unsur mempunyai 5 indikator, sehingga terdapat 125 buah parameter <i>Maturity Level</i> SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Penetapan skor maturitas SPIP menggunakan skor hasil validasi dengan membuat rerata tertimbang dari skor validasi. Skor ini yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. <table><tr><th>NO</th><th>TINGKAT MATURITAS</th><th>INTERVAL SKOR</th></tr><tr><td>0</td><td>Belum ada</td><td>Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)</td></tr><tr><td>1</td><td>Rintisan</td><td>1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)</td></tr><tr><td>2</td><td>Berkembang</td><td>2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)</td></tr><tr><td>3</td><td>Terdefinisi</td><td>3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)</td></tr><tr><td>4</td><td>Terkelola dan terukur</td><td>4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)</td></tr><tr><td>5</td><td>Optimum</td><td>Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)</td></tr></table>	NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR	0	Belum ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)	1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)	2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)	3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)	4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)	5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)
NO	TINGKAT MATURITAS	INTERVAL SKOR																							
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0)																							
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0)																							
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0)																							
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0)																							
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5)																							
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)																							

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan					
				Tingkat	Karakteristik SPIP				
				Belum Ada	K/L/Pemda sama sekali belum memiliki keijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksa aka prakt k-praktik pengendalian intern.				
				Rintisan	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan resiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan, sehingga kelemahan tidak teridentifikasi.				
				Berkembang	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik, dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu, serta belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.				
				Terdefinisi	K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun, evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.				
				Terkelola dan Terukur	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Telah ada evaluasi formal dan terdokumentasi.				
				Optimum	K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berke- lanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta didukung oleh pemantauan otomatis dengan menggunakan aplikasi TI.				
	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh Objek Pengawasan terdiri atas: a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan) ; b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan) ; c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik) ; d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik) ; e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup) ; dan f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang) ; dan g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang) . Sumber Data : Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan						
			IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	Penilaian Indeks Pengelolaan Aset BPSDM Perhubungan ada terdiri dari 2 Indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%)				
					NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT	
					1	Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya			
					a	Lebih dari sama dengan 80%	1	50%	
					b	60% s.d. kurang dari 80%	0,80		
			c	40% s.d. kurang dari 60%	0,60				

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan					
				d	20% s.d. kurang dari 40%	0,40			
				e	1% s.d. kurang dari 20%	0,20			
				f	0% s.d. kurang dari 1%	0			
				Total Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya = nilai (1) x bobot					50
				2	Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN				
				a	Laporan BMN Semester 1	1	50%		
				b	Laporan BMN Semester 2/Tahunan	1			
				c	Laporan Wasdal BMN	1			
				Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = nilai (2) rata2 x bobot					50
				Indeks Pengelolaan Aset BPSDM Perhubungan = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan					Maksimal nilai =100
		IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	(60% x Nilai EKA) + (40%x Nilai IKPA)					
				EKA : Nilai Evaluasi Anggaran					
				IKPA : Nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran					
		IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek Integrasi Perencanaan.					
				NO	ASPEK				Bobot
				A	Integrasi Perencanaan				
				1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra K/L dengan sasaran RPJMN *)				20%
	2			Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN				20%	
	3			Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP				30%	
	4			Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L **)				30%	
Total Integrasi Perencanaan					100%				

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan			
		IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut: 1. Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30% 2. Pengukuran Kinerja, dengan bobot 25% 3. Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15% 4. Evaluasi Kinerja, dengan bobot 10% 5. Capaian Kinerja, dengan bobot 20%			
				No	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi
				1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
				2.	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
				3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
				4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
				4.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
				5.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
				6.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.
		IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	No	Uraian	Nilai	Keterangan
				1	Tingkat Layanan Rumah Tangga :	20	(RKA Tepat Waktu; LKIP Tepat Waktu; Kinerja Anggaran ; % Pemenuhan Dokumen RENSTRA; %Pencapaian Indeks Maturitas SPIP >3) PMK 214/PMK.02/2017
				2	% Kesesuaian Pencatatan Aset BMN	5	• (%) Jumlah asset yang dicatat pada tahun (n) dibandingkan dengan Jumlah asset yang sudah terealisasi pada tahun (n) x total nilai • Pencatatan asset BMN di tahun (n) pada aplikasi SIMAK BMN tahun (n) • Apabila tidak terdapat realisasi aset ditahun (n) maka nilai 5
				3	Tingkat Pemenuhan	5	• (%) Jumlah Sarana perkantoran yang terealisasi pada tahun (n) dibandingkn Jumlah

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan			
					Sarana Perkantoran		sarana perkantoran dengan target sesuai kebutuhan pada tahun (n) x total nilai
							• Apabila tidak terdapat target/usulan ditahun (n) maka nilai 5
				4	Tingkat Keandalan Sarana Perkantoran	10	(%) Jumlah sarana perkantoran yang dapat digunakan secara optimal dibandingkan jumlah sarana yang tercatat di BMN x total nilai
	SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP	IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP	nilai	5	Tingkat Layanan	60	Kuesioner indeks pelayanan
				NO	Uraian Penilaian	Bobot Penilaian	Keterangan
				1	Agenda Setting	24	n-1 s.d n
				2	Formulasi Peraturan	36	n-1 s.d n
				3	Implementasi Peraturan	24	n-2 s.d n
				4	Evaluasi Peraturan	16	n-2 s.d n-1
		IKK 21. Kualitas Kebijakan BPSDMP	%	n : tahun berjalan			
				$\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan yang dihasilkan tahun (n)}}{\text{Jumlah Target Kebijakan yang dihasilkan tahun (n)}} \right) \times 100 \%$			
				Satuan : % n : tahun berjalan <u>Definisi:</u> Presentase Jumlah Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang APAratur dibandingkan dengan total target keseluruhan target Kebijakan yang dihasilkan tahun (n) pada lembaga Pusbang APAratur. <u>Meta indikator :</u> - Analisa Kebutuhan Diklat - Man Power Planning (MPP)			

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan								
	SK.DL.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	$\left(\frac{\text{Jumlah NSPK yang dihasilkan tahun (n)}}{\text{Jumlah Target NSPK yang dihasilkan tahun (n)}} \right) \times 100 \%$ Satuan : % n : tahun berjalan Definisi: Presentase jumlah lembaga diklat transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menghasilkan NSPK dibandingkan dengan total keseluruhan target NSPK lembaga diklat di bawah naungan BPSDM Perhubungan. Meta indikator : Jumlah Norma,standar , prosedur dan kriteria yang tersusun								
	SK.WA.03.04. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai	Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi. Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan instrumen kuesioneryang tercantum di dalam Permenpan RB No.20 Tahun 2018. <table><tr><th>PERINGKAT</th><th>KETERANGAN</th></tr><tr><td>Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100</td><td>Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.</td></tr><tr><td>Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80</td><td>Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.</td></tr><tr><td>Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60</td><td>Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.</td></tr></table>	PERINGKAT	KETERANGAN	Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.	Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.	Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.
PERINGKAT	KETERANGAN											
Peringkat Komposit 5 (P-5) Skor 81-100	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong sangat efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.											
Peringkat Komposit 4 (P-4) Skor 61-80	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi segera apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.											
Peringkat Komposit 3 (P-3) Skor 41-60	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong cukup efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai cukup mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan cukup mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Namun struktur dan proses organisasi memiliki berbagai kelemahan yang dapat menyebabkan peringkatnya menurun apabila organisasi tidak segera melakukan tindakan korektif secara sistematis.											

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan	
				Peringkat Komposit 2 (P-2) Skor 21-40	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong kurang baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai kurang mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan kurang mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki beberapa faktor kelemahan serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang efektif berpotensi memperburuk peringkat organisasi sampai ke kondisi terburuk.
				Peringkat Komposit 1 (P-1) Skor 0-20	Mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong tidak baik. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai tidak efektif dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi serta tidak mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi. Di samping itu, struktur dan proses organisasi dinilai memiliki banyak faktor kelemahan yang sangat serius, baik faktor kelemahan yang bersifat parsial dan berdiri sendiri maupun faktor kelemahan yang bersifat terkait satu sama lain dan pengaruh negatifnya bersifat simultan. Berbagai kelemahan ini apabila tidak dilakukan tindakan korektif yang bersifat total (perombakan total struktur organisasi dan proses organisasi) berpotensi membahayakan kelangsungan organisasi
		IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks	Penilaian tingkat profesionalitas pegawai ASN dilingkungan BPSDMP berdasarkan 4 (empat) dimensi, yaitu dimensi Kualifikasi (25%) dari keseluruhan pengukuran, Kompetensi (40%) dari keseluruhan pengukuran dan Kinerja (30%) dari keseluruhan pengukuran serta Disiplin (5%) dari keseluruhan pengukuran.	
				NO	Dimensi
				A	Kualifikasi (Pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS)
				1	Pendidikan S-3 (Strata Tiga).
				2	Pendidikan S-2 (Strata Dua).
				3	Pendidikan S-1 (Strata Satu)/DIV (Diploma Empat).
				4	Pendidikan D-III (Diploma Tiga).
				5	Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat.
				6	Di bawah SLTA.
				Total Kualifikasi	
				25%	
				B	Kompetensi

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan		
				1	Diklat Kepemimpinan (Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan).	15
				2	Diklat Fungsional Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional).	15
				3	Diklat Teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis.	15 / 22,5
				4	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional dan Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan Bobot nilai sebesar 0 (nol) yang belum mengikuti Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisnya dalam 2 (dua) tahun terakhir.	10 / 17,5
				Total Kompetensi		40%
				C	Kinerja (Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP))	
				1	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	30
				2	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.	25
				3	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.	15
				4	PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	5

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan		
				5	PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.	1
				Total Kinerja		30%
				D	Disiplin	
				1	PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.	5
				2	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.	3
				3	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang.	2
				4	PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	1
				Total Disiplin		5%
				Indeks Perencanaan Kementerian Perhubungan (A+B+C+D)		100%
		IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.		
				Dokumen HCDP (human capital development plan) Merupakan dokumen perencanaan pengembangan pegawai. Setiap individu pegawai pengembangan kompetensinya sudah direncanakan, jangka pendek dan jangka menengahnya, dari pengembangan kompetensi berdasarkan pendidikan formal maupun non formal (kompetensi teknis/manajerial)		
				No	Uraian Penilaian	bobot
				1	Tersusunnya dokumen HCDP	30
				2	% Kesesuaian Formasi ASN dengan HCDP	25
				3	%Ketepatan waktu kenaikan Pangkat/jabatan ASN	15
				4	% Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	15
				5	% Ketepatan Waktu Perolehan SK Pensiun	15
				Jika tahun berjalan tidak ada ASN pensiun nilai 15		

TUJUAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (SP/SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	Perhitungan
	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%	$\left(\frac{\text{Jumlah sistem informasi yang di update/dapat diakses tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan sistem informasi pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$ Satuan : % n : tahun berjalan Definisi: Persentase Keandalan Sistem Informasi BPSDM Perhubungan (web, aplikasi berbasis e, dsb), termasuk aplikasi untuk pemantauan dan monitoring sistem informasi pendidikan dan pelatihan satuan kerja/UPT. Meta indikator : - Jumlah Sistem informasi dalam Aplikasi yang diupdate - Jumlah Sistem informasi dalam Aplikasi yang dapat diakses - Jumlah informasi yang menjangkau sasaran penerima informasi - Jumlah kritik dan saran yang masuk pada helpdesk/PPID

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 sebagaimana disampaikan pada Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disusun Bappenas disusun untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan (lihat **Sub Bab 2.1**). Adapun rumusan tentang arah kebijakan tersebut disampaikan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2020-2024

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	
	1. Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	• Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) • Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan • Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
	2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	• Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) • Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi • Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) • Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
	1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa)	• Pembangunan desa terpadu dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah; • Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah; • Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum; • Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah; • Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, pembangunan infrastruktur perkotaan, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; • Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan
	2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah	
	3. Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah	
	4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah	

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		ekonomi; • Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	
	1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	• Percepatan cakupan administrasi kependudukan; • Integrasi sistem administrasi kependudukan • Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
	2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	• Penguatan pelaksanaan jaminan sosial • Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran • Perlindungan sosial adaptif • Peningkatan kesejahteraan sosial
	3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	• Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi • Percepatan perbaikan gizi masyarakat • Peningkatan pengendalian penyakit • Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) • Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
	4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	• Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran • Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun • Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata • Penguatan jaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah • Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan
	5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	• Perwujudan Indonesia layak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya • Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja imigran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) • Peningkatan kualitas pemuda
	6. Pengentasan kemiskinan	• Akselerasi penguatan ekonomi keluarga • Keperantaraan usaha dan dampak sosial • Reforma agraria • Pembaruan kawasan hutan untuk masyarakat
	7. Peningkatan produktivitas dan daya saing	• Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri dan stakeholder lintas bidang • Penguatan pendidikan tinggi (universitas) berkualitas • Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi • Peningkatan pendidikan vokasi dengan mengundang Duta Besar/ Atase Perhubungan di Luar Negeri terkait Program Magang • Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
	1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	• Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong, • Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan jaman, • Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental, • Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
		berlandaskan Pancasila, Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme,
	2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,	- Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal, - Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat, - Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, - Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia, - Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan,
	3. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial,	- Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, - Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, - Penyelarasan relasi agama dan budaya, - Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, - Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan,
	4. Meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter,	- Peningkatan budaya literasi, - Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra, - Pengembangan budaya lptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta, - Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi,
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
	1. Infrastruktur pelayanan dasar	- Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau - Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan - Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman - Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak dan Aman - Keselamatan dan Keamanan Transportasi - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
	2. Infrastruktur ekonomi	- Konektivitas Transportasi Jalan - Konektivitas Transportasi Kereta Api - Konektivitas Transportasi Laut - Konektivitas Transportasi Udara - Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda
	3. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan	- Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan - Infrastruktur Jalan Perkotaan - Energi dan Listrik Berkelanjutan untuk Perkotaan - Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman di Perkotaan - Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan
	4. Energi dan ketenagalistrikan	- Diversifikasi energi dan ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan, - Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, - Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, - Peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan, - Pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan,
	5. Transformasi digital	- Penuntasan infrastruktur dan pemanfaatan infrastruktur TIK - Menyediakan fasilitas pendukung transformasi digital
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	
	1. Peningkatan kualitas	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
	lingkungan hidup	dan Lingkungan Hidup, • Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, • Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
	2. Peningkatan ketahanan bencana alam dan iklim	• Penanggulangan Bencana dengan Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana; Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana; Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan; dsb • Peningkatan Ketahanan Iklim, yang dilaksanakan dengan implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RANAPI) pada sektor-sektor prioritas,
	3. Pembangunan rendah karbon	• Pembangunan energi berkelanjutan • Pemulihan lahan berkelanjutan • Penanganan limbah • Pengembangan industri hijau • Rendah karbon pesisir dan laut
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
	1. Konsolidasi demokrasi	• Penataan Lembaga Demokrasi • Penguatan Hak-Hak Politik dan Kebebasan Sipil • Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik
	2. Optimalisasi kebijakan luar negeri	• Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri, • Memperkuat Kerjasama Pembangunan Internasional, • Meningkatkan Citra Positif Indonesia Di Dunia Internasional, • Meningkatkan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global
	3. Penegakan hukum nasional	• Penataan regulasi • Perbaikan sistem peradilan • Optimalisasi upaya anti korupsi • Peningkatan akses terhadap keadilan
	4. Reformasi kelembagaan birokrasi	• Penguatan implementasi manajemen ASN, • Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional, • Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan, • Perluasan penerapan inovasi pelayanan publik.
	5. Menjaga stabilitas keamanan nasional	• Penguatan Keamanan Dalam Negeri, • Penguatan Kemampuan Pertahanan, • Penguatan Keamanan Laut, • Peningkatan Keamanan Personal dan Ketertiban Masyarakat, • Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber

Sumber: Kemen PPN/BAPPENAS, NASKAH TEKNOKRATIK RPJMN 2020 – 2024, Agustus 2019

Arah kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan SDM Transportasi sebagaimana yang telah disampaikan pada Tabel 3.1. meliputi:

1. Agenda (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan dan sasaran pada agenda (3) yang berkaitan dengan pengembangan SDM Transportasi terdapat pada point 4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan point 7. Peningkatan produktivitas dan Daya Saing, meliputi:

- Point 4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas

- a. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
- b. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata,
- c. Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah,
- Point 7. Peningkatan produktivitas dan Daya Saing
 - a. Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan,
 - b. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri dan Stakeholder lintas bidang,
 - c. Penguatan pendidikan tinggi (universitas) berkualitas,
 - d. Peningkatan pendidikan vokasi dengan mengundang Duta Besar/ Atase perhubungan Luar Negeri terkait program magang di luar negeri,
 - e. Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi,
 - f. Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
- 2. Agenda (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang berkaitan dengan SDM Transportasi terdapat pada point 1. Infrastruktur pelayanan dasar, point 2. Infrastruktur pelayanan ekonomi, dan point 3. Infrastruktur perkotaan. Arah kebijakan dan sasaran pada agenda (5) untuk mencapai sasaran pengembangan SDM Transportasi periode 2020-2024, sebagai berikut:
 - Point 1. Infrastruktur pelayanan dasar terdapat pada sasaran Keselamatan dan Keamanan Transportasi, dimana arah kebijakannya meliputi:
 - a. Pembenahan kerangka kelembagaan dan kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah serta Operator dalam penengakkan aturan
 - b. Penerapan pendekatan sistem yang berkeselamatan yang komprehensif
 - c. Peningkatan kuantitas dan sebaran SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana SAR Darat, Laut, dan Udara untuk memenuhi waktu tanggap
 - Point 7. Infrastruktur pelayanan ekonomi, dimana arah kebijakannya meliputi:
 - a. Konektivitas transportasi jalan

Peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah;
 - b. Konektivitas transportasi kereta api

- 1) Sinergi BUMN di bidang industri perkeretaapian dalam pengembangan teknologi dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- 2) Pembentukan dan Penyelenggaraan sistem transportasi dan Badan Usaha multimoda;

c. Konektivitas transportasi laut

- 1) Penegakan aturan standar keselamatan pelayaran;
- 2) Pengintegrasian jasa pelayaran lokal (PELRA) dengan sistem pelayaran nasional,
- 3) Pengintegrasian jasa pelayaran komersial dengan sistem pelayaran non-komersial;
- 4) Pengembangan hinterland terintegrasi
- 5) Konsolidasi kargo di 7 pelabuhan untuk menciptakan efisiensi;
- 6) Pengembangan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayanan angkutan laut

d. Konektivitas transportasi udara

- 1) Pemenuhan dan peningkatan standar keselamatan dan keamanan penerbangan,
- 2) Meningkatkan pelayanan transportasi udara dan cakupan layanan penerbangan perintis,

e. Konektivitas transportasi darat dan antar moda, dimana arah kebijakannya yang berkaitan dengan SDM Transportasi yakni Mendorong pertumbuhan wilayah 3T melalui pembangunan dan pengembangan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang memadai

• Point 3. Infrastruktur perkotaan, dimana arah kebijakannya meliputi:

a. Sistem angkutan umum massal perkotaan, yakni:

- 1) *Urban mobility plan* untuk kota besar dan sedang melalui program pengembangan kapasitas pemda;
- 2) Penerapan skema-skema *insentif* untuk kota sedang dan kecil (*buy the service*); dan

b. Infrastruktur jalan perkotaan, dimana arah kebijakan yang berkaitan dengan Pengembangan SDM Transportasi adalah peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan jalan daerah;

3. Agenda (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dan sasaran pada agenda (7) yang berkaitan dengan pengembangan SDM Transportasi terdapat pada point 4. Reformasi kelembagaan birokrasi, meliputi:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN,
- b. Penataan kelembagaan berbasis prioritas pembangunan nasional,
- c. Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan,
- d. Perluasan penerapan inovasi pelayanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Muatan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi untuk perioda 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari Naskah Teknokratik Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang disusun oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan.

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Umum

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan untuk perioda Tahun 2020-2024 berbasis pada 2 kebijakan utama dengan strategi implementasi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia (termasuk kawasan perbatasan, tertinggal, rawan bencana, KSPN, KEK, keberpihakan lansia, difabel dan gender). Adapun strateginya:
 - Pemenuhan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
 - Peningkatan kinerja pelayanan;
 - Keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran;
 - Peningkatan ASN perhubungan yang kompeten dan berintegritas;
 - Peningkatan level keselamatan dan keamanan.
- b. Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui peningkatan kerjasama ekonomi global dan kerjasama investasi sektor transportasi. Adapun strateginya:
 - Peningkatan SDM Perhubungan yang kompeten dan berintegritas;
 - Peningkatan daya saing global melalui teknologi dan informasi untuk mencapai efisiensi layanan sektor transportasi;
 - Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral;
 - Inovasi skema pendanaan untuk peningkatan infrastruktur sektor transportasi (*brainware, software, hardware*).

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

Untuk setiap sasaran pembangunan bidang perhubungan pada perioda Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada **Bagian 2.2.2** sebelumnya, maka Kementerian Perhubungan menetapkan sejumlah arah kebijakan dan strategi implementasi berikut dengan indikasi kegiatan utama, sebagaimana dirangkum pada **Tabel 3.2.**

Tabel 3.2 Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2020-2024

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	• Optimalisasi simpul transportasi eksisting • Pembangunan simpul transportasi baru • Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia • Reaktivasi jalur moda transportasi • Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal • Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia • Penguatan jaringan layanan moda eksisting	•Penguatan jaringan transportasi eksisting •Perluasan jaringan layanan transportasi •Penguatan transportasi antar moda dan multi moda •Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi •Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi •Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia •Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi •Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan PSN •Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal •Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi •Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia •Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia •Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan •Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda •Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	• Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi • Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana • Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi • Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan	•Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi •Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi •Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan •Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan •Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi <i>real time</i> OTP •Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan, gender, difabel, dan lansia •Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana •Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan <i>delay</i> yang terjadi pada sistem layanan transportasi

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		- Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan - Mendukung kinerja logistik nasional	- Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (<i>Buy The Service</i>) - Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat) - Pengembangan rute jaringan saling terhubung (<i>loop</i>) distribusi domestic - Pengembangan sistem informasi logistik (<i>e- logistic</i>) - Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland - Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri - Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	- Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan - Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan <i>database</i> kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR <i>online</i>, <i>travel data recording</i>. - Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi - Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan - Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum - Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Sekolah (RASS) dan taman edukasi - Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian	- Penegakan hukum - Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan - Pembatasan usia sarana prasarana transportasi - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan - Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi - Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi - Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan - Edukasi keselamatan transportasi - Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi - Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api - Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		- Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi - Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara	
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	- Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi - Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan	- Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi - Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan - Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan - Peningkatan EST (<i>Environmentally Sustainable Transportation</i>) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besarPelatihan petugas keamanan untuk semua moda - Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
5	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	- Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi ; - Pembentukan SDM Yang Berkarakter Dan Berintegritas; - Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi - Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi.	- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni; - Peningkatan <i>Link and Match</i> SDM Transportasi; - Penguatan SDM Transportasi Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan; - Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti; - Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai- nilai Agama; - Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara; - Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi; - Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penelitian (<i>Research & Development</i>); - Transformasi kelembagaan Balai/ UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN; - Peningkatan peran BPSDM Perhubungan - dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi.
6	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari	- Menghitung Nilai indeks berkelanjutan (<i>sustainability index</i>) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan feedback bagi peningkatan kualitas sistem transportasi - Perumusan kebijakan adaptasi dan/atau mitigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor transportasi Melakukan Pemetaan Dan - Intensifikasi Dokumen Lingkungan

NO	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI
		satu generasi ke generasi berikutnya.	
7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Kementerian Perhubungan	- Melakukan reviu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu - Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi - Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Kementerian Perhubungan - Pengembangan sistem e- monev untuk penilaian kinerja Kementerian Perhubungan - Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)
8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	- Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan - Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten - Penyempurnaan SOP layanan transportasi - Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan - Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT - Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronisasi regulasi antar Lembaga - Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian	- Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan - Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi - Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil - Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi - Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung smart city pada kota besar dan metropolitan - Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Sesuai ketentuan dalam Permen Permen PPN/Bappenas 5/2019 Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil Pemerintah Pusat untuk mencapai tujuan.

3.3.1 Arah Kebijakan Umum BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Arah kebijakan umum pengembangan SDM Perhubungan, BPSDM Perhubungan untuk mencapai tujuan SDM Transportasi yang maju, mandiri, kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah yang telah ditetapkan (lihat **Sub Bab 2.3.2**) untuk periode 2020-2024 terdiri dari 4 kebijakan pokok berikut ini:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi;
2. Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi;
3. Peningkatkan peran BPSDM Perhubungan dalam kegiatan Kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri baik dalam peran sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan transportasi maupun peran sebagai lembaga pendidikan;
4. Pembentukan SDM Yang Berkarakter dan Berintegritas.

3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024

Strategi implementasi ini merupakan indikasi kegiatan utama atau inisiatif strategis (*strategic initiatives*) untuk mencapai tujuan dan sasaran program pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024. Strategi implementasi yang akan ditempuh BPSDM Perhubungan untuk melaksanakan setiap arah kebijakan umum, sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi **(AK.1)**, meliputi:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.
 - b. Peningkatan *link and match* SDM Transportasi.
 - c. Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan.
2. Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi, yang diwujudkan melalui:
 - i. Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.

- ii. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penelitian (*Research & Development*).
- 3. Peningkatkan peran BPSDM Perhubungan dalam kegiatan Kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri baik dalam peran sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan transportasi maupun peran sebagai lembaga pendidikan melalui:
 - a. Transformasi kelembagaan Lembaga diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN.
 - b. Peningkatan peran BPSDMP dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi.
- 4. Pembentukan SDM yang berkarakter dan berintegritas, melalui:
 - a. Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti.
 - b. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama.
 - c. Peningkatan Pendidikan Kewargaan dan Bela Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi implementasi yang akan ditempuh BPSDM Perhubungan untuk melaksanakan setiap arah kebijakan umum yang dirinci dalam Indikasi Kegiatan Strategis, sebagaimana tercantum pada **Tabel 3.3**.

Arah kebijaksanaan (AK) ditujukan untuk memenuhi sasaran strategis BPSDM Perhubungan. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang link and match dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi **(AK.1)** ditujukan untuk memenuhi 5 Sasaran Program/Kegiatan, meliputi: SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten, SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar, SK.WA.03.04. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur, SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi, SK.DL.01.04 . Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi. Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi **(AK.2)** merupakan arah kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi 2 Sasaran Program/Kegiatan, yakni: SP.DL.01. Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten, SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.

Peningkatkan peran BPSDM Perhubungan dalam kegiatan Kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri baik dalam peran sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan transportasi maupun peran sebagai lembaga pendidikan **(AK.3)** merupakan arah kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi 8 Sasaran Program/Kegiatan, yakni: SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan, SK.DL.01.02. Meningkatnya Kualitas perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta lembaga yang sesuai standar, SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi

Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel, SK .WA.01.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP, SK.DL.01.03. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi, SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan, dan SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.

Pembentukan SDM Yang Berkarakter Dan Berintegritas **(AK. 4)** merupakan arah kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi 4 Sasaran Program/Kegiatan, meliputi: SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten, SK.WA.03.04. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur dan SK .WA.03.02. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel, SK.DL.01.04 . Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi,

Tabel 3.3 Indikasi Kegiatan Strategis BPSDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024

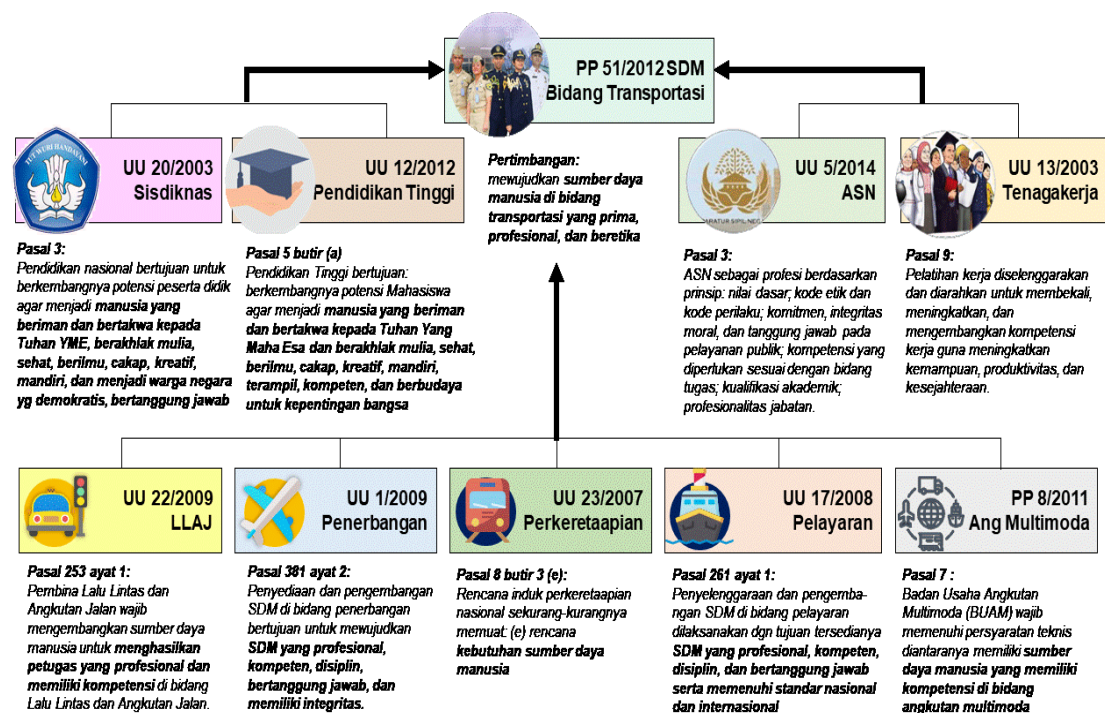
ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	RENCANA KERJA
1. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang <i>link and match</i> dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi;	a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.	• Melakukan <i>Road Map</i> Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sehingga terjalannya <i>Link and Match</i> antara target Peserta didik/Lulusan dengan Kebutuhan Industri
		• Meningkatkan kualitas lulusan dengan bekerjasama/melibatkan pihak Industri/user dalam pengembangan materi dan metode pembelajaran
	b. Peningkatan <i>link and match</i> SDM Transportasi.	• Penyusunan <i>Training Needs Analysis</i> (TNA) dan <i>Grand Design</i> SDM Transportasi
		• Pembaruan kurikulum sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan kerja sektor transportasi baik teknis maupun non teknis
		• Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri
		• Sistem Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan
		• Pengembangan Program S2 Terapan sesuai Kebutuhan dan Persyaratan
	c. Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan	• Peningkatan Akses Layanan Pendidikan pada Daerah 3T dan KSPN
		• Program Pola pembibitan SDM Regulator Pusat dan Daerah
		• Menyelenggarakan Program pendidikan dan pelatihan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) terutama 5 new Bali
		• Beasiswa bagi Anak tidak Mampu dan Berbakat, khususnya Daerah Rawan Bencana dan Daerah Afirmasi 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)
2. Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi;	a. Melakukan Transformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.	• Pemberian bantuan pendidikan berupa diklat pemberdayaan masyarakat (DPM) dalam rangka pembekalan/peningkatan kompetensi untuk memasuki dunia kerja di bidang transportasi
		• Melakukan inventarisasi penyebaran lulusan dan kepuasan penggunaan lulusan SDM Transportasi
		• Melakukan pengembangan dan evaluasi terhadap variasi/jenis diklat yang dibutuhkan serta lama waktu pendidikan.
		• Melakukan studi banding (program magang) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Pihak swasta, BUMN dan Luar Negeri
		• Lembaga Pendidikan kerja menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
		• Mengembangkan lembaga diklat sesuai standar
		• Peningkatan akreditasi lembaga pengembangan SDM transportasi, termasuk melalui Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	RENCANA KERJA
		• Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik, Pengasuh dan Tenaga Kependidikan
		• Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berbasis Teknologi
		• Pengembangan Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi
		• Pengembangan Pembelajaran yang Berkualitas
		• Menyusun <i>roadmap</i> pengembangan kelembagaan Balai/UPT di lingkungan BPSDMP
		• Menyusun Roadmap Pengembangan Pendidikan Tinggi di Lingkungan BPDMP
		• Peningkatan kualitas pengelolaan BLU eksisting di lingkungan BPSDM Perhubungan
		• Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Pengawasan Internal
	b. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penelitian (<i>Research & Development</i>)	• Pengembangan <i>Research</i> Transportasi oleh lembaga pendidikan
		• Peningkatan produktivitas riset/penelitian dosen yang inovatif
3. Peningkatkan peran BPSDM Perhubungan dalam kegiatan Kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri baik dalam peran sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan transportasi maupun peran sebagai lembaga pendidikan;	Peningkatan Kerjasama di dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan transportasi	• Melakukan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Pihak Industri, Perguruan Tinggi, swasta, BUMN dan Luar Negeri
		• Melakukan Kerjasama dalam pengembangan kualitas/mutu pendidikan dan pelatihan baik dari SDM, Sarana Prasana, kurikulum silabus dll.
4. Pembentukan SDM Yang Berkarakter dan Berintegritas	a. Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti.	• Pembentukan Budaya sekolah yang profesional, berakhlak mulia dan beretika bebas dari kekerasan (<i>bullying free school environment</i>).
	b. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama.	• Penyelenggaraan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi
	c. Peningkatan Pendidikan Kewargaan dan Bela Negara	• Penyusunan Pola Pengasuhan dalam membentuk Akhlak mulia, jujur, saleh, peduli sosial, hidup rukun, toleran, kekeluargaan
		• Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Leadership Training Program
		• Reviu Kurikulum pendidikan untuk membentuk jiwa Patriotisme, nasionalisme, taat hukum, tanggung jawab, demokratis dan berintegritas

3.4 KERANGKA REGULASI BPSDM PERHUBUNGAN

3.4.1 Kerangka Umum Regulasi Pengembangan SDM Perhubungan

Pelaksanaan Diklat BPSDM Perhubungan tunduk pada beberapa peraturan perundangan terkait dengan (1) pendidikan, (2) sektor transportasi, dan (3) ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Kerangka Regulasi Pengembangan SDM Transportasi

SDM Perhubungan yang dihasilkan oleh Lembaga Diklat dibawah naungan BPSDM Perhubungan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan profesionalitas dan kompetensi dari moda-moda transportasi yang masing-masing memiliki pengaturan yang berbeda, dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. PP 51 Tahun 2012 mengenai SDM Transportasi yang diarahkan untuk mewujudkan SDM Transportasi yang prima, profesional, dan beretika serta berkelas dunia.

Dalam UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan program akademik, profesi/vokasi harus memiliki standar baik dari program studinya maupun secara kelembagaannya dari BAN-PT. Sehingga kedepannya dibutuhkan kebutuhan penguatan regulasi, dalam rangka mendukung upaya transformasi kelembagaan dari Balai/UPT Diklat BPSDM Perhubungan menjadi Akademi/Politeknik yang terakreditasi.

Terkait dengan SDM ASN Perhubungan, BPSDM Perhubungan melalui Pusbang Aparatur diharapkan menghasilkan SDM Perhubungan yang professional sesuai

dengan Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019. BPSDM Perhubungan memberikan mandat pengembangan kompetensi ASN tersebut kepada Pusbang Aparatur yang membawahi sejumlah Lembaga Diklat Aparatur Perhubungan untuk memenuhi kebutuhan profesionalitas ASN Kementerian Perhubungan yang berkelas dunia. Adapun pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat Aparatur Perhubungan, sebagai berikut: pendidikan dan pelatihan manajerial, structural dan fungsional untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan, serta pemberian pembinaan teknis kepada satuan organisasi yang menangani pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan SDM Perhubungan di dunia kerja, maka lulusan diklat teknis harus memenuhi kompetensi yang jenis dan detail yang menyesuaikan perkembangan regulasi dan teknologi masing-masing sektor. Jenis dan detail kompetensi tersebut harus disusun berdasarkan kurikulum diklat teknis yang mengacu pada bakuan kompetensi dan Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

3.4.2 Kebutuhan Penguatan Regulasi BPSDM Perhubungan

Kebutuhan penguatan regulasi diperlukan untuk memfasilitasi inisiatif strategis dalam rangka melaksanakan arah kebijakan strategi dari BPSDM Perhubungan yang telah disebutkan pada **Subbab 3.3.2**, beberapa inisiatif strategis tersebut diantaranya:

1. Pembentukan Balai Diklat Aparatur diperlukan karena jumlah ASN Perhubungan sebanyak 30.739 pegawai yang tersebar di Indonesia, namun pelatihan pembentukan diklat aparatur dilaksanakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan yang berlokasi di Bogor. Sehingga, pelaksanaan pelatihan pengembangan menjadi tidak efektif apabila hanya dilakukan terpusat di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan yang berlokasi di Bogor. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan pembentukan Balai atau pemanfaatan UPT Diklat yang ada untuk melakukan pelatihan pengembangan secara terpisah dengan sebaran wilayah sedekat mungkin dengan daerah. Untuk itu diperlukan adanya perubahan regulasi mengenai pengaturan organisasi di Pusat Pengembangan BPSDM Perhubungan atau mekanisme pemanfaatan fasilitas UPT Diklat dari Pusat Pengembangan SDM.
2. Peningkatan status pendidikan vokasi menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang terakreditasi BAN-PT diperlukan dalam menghasilkan SDM Transportasi unggul dan berdaya saing. Untuk itu, diperlukan adanya penguatan regulasi mengenai peningkatan status Lembaga pendidikan vokasi dalam transformasi UPT Diklat menjadi Akademi/Politeknik.
3. Sejalan dengan peningkatan status lembaga pendidikan vokasi pada UPT Diklat, maka diperlukannya adanya penyesuaian eselonisasi UPT Diklat menjadi sebuah lembaga yang lebih besar untuk memfasilitasi kebutuhan ASN Perhubungan dalam penyelenggaraan pendidikan dan

pengembangan SDM Perhubungan. Untuk itu, diperlukan adanya regulasi untuk melakukan penyesuaian eselonisasi UPT Diklat.

4. Untuk menghasilkan kualitas SDM Transportasi unggul dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan teknologi, maka diperlukan adanya pengembangan kerjasama antara UPT Diklat dengan organisasi profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Selain dari pada itu kerjasama dengan universitas baik dalam dan luar negeri perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Transportasi yang berdaya saing nasional dan internasional. Oleh karena itu, kedepannya diperlukan regulasi mengenai pengembangan kerjasama UPT di lingkungan BPSDM Perhubungan dengan universitas nasional dan internasional serta organisasi profesi.
5. Dalam mewujudkan SDM Transportasi unggul berskala internasional serta menjawab tantangan kebutuhan pasar mengenai SDM Transportasi, maka diperlukannya pengembangan kerjasama UPT Diklat dengan Lembaga Internasional. Sehingga kedepannya dibutuhkan regulasi mengenai kerjasama antara UPT Diklat dengan Lembaga Internasional.
6. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan (BLU) di Lingkungan BPSDM Perhubungan untuk efisiensi kelembagaan keuangan serta dapat menjadi alternative sumber dana, sehingga kedepannya diperlukan adanya regulasi mengenai Pengelolaan Keuangan dengan skema BLU di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Tabel 3.4 Mandat Penguatan Regulasi dalam Pengembangan SDM Perhubungan

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
1. Pembentukan Balai Diklat Aparatur	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme • PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM Transportasi • PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi • Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	• Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penelitian dan Pengembangan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana SDM Transportasi Nasional; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembinaan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi Nasional;
2. Peningkatan Status Lembaga Pendidikan Vokasi yang terakreditasi BAN-PT	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan • UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan • UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian • UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran • PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • PP No. 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda • PP No. PP 51 Tahun 2012 mengenai SDM Bidang Transportasi • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta • Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi	• Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kapal Latih; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Instruktur Penerbangan; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penelitian dan Pengembangan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana SDM Transportasi Nasional; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Kerja Terhadap Kesehatan Kerja SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang

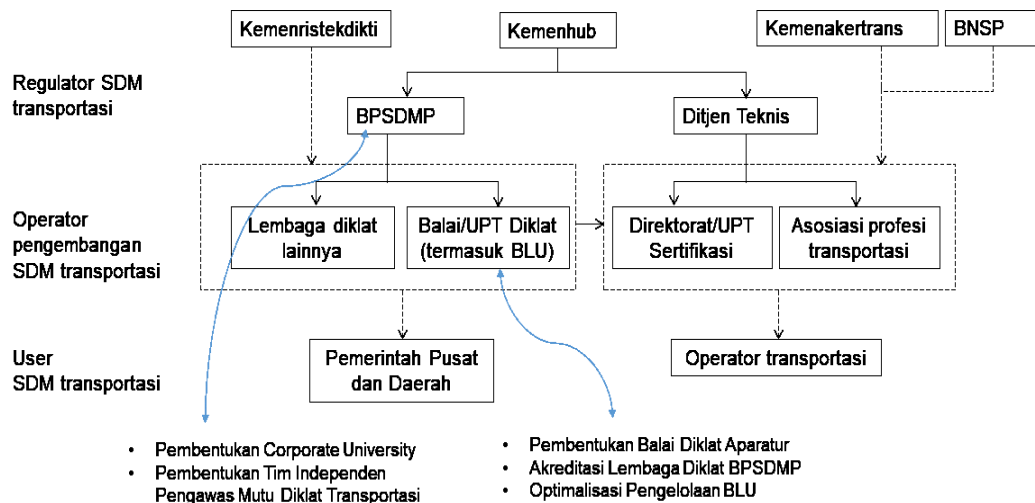
ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
	Peraturan Menteri Ristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Pembinaan SDM di Bidang Transportasi; - Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi Nasional; - Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Dosen di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Penyesuaian Eselonisasi UPT Diklat	- UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara - InPres Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan - PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan - PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan - Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi - Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Rencana Peraturan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola
4. Pengembangan kerjasama antara UPT dengan organisasi profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	- UU No. 18 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang - PP No. 51 Tahun 2012 mengenai SDM Bidang Transportasi	
5. Pengembangan kerjasama antara UPT dengan Lembaga	- UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri - UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional - UU No. 18 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
Internasional	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang • PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing • PP No. 51 Tahun 2012 mengenai SDM Bidang Transportasi • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi	
6. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan (BLU) di Lingkungan BPSDM Perhubungan	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum • PP No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur • PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara • PP No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur • KP No. 145 Tahun 2018 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan • Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Bahan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur • Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Diklat • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum	•

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN BPSDM PERHUBUNGAN

3.5.1 Kerangka Umum Kelembagaan Pengembangan SDM Perhubungan Eksisting

Gambaran mengenai Kelembagaan pengembangan SDM Perhubungan mengacu pada kerangka regulasi (lihat **Subbab 3.4.1.**) yang secara umum disampaikan pada **Gambar 3.2.**



Gambar 3.2 Kerangka Kelembagaan Pengembangan SDM Transportasi

Secara kelembagaan, BPSDM Perhubungan memiliki keterikatan dengan institusi lain yang memegang wewenang sesuai undang-undang di bidang Transportasi (Ditjen Teknis Kementerian Perhubungan); Pendidikan (Kemenristekdikti); ASN (Pemerintah/ Pemerintah Daerah); dan Ketenagakerajaan (Kemenakertrans dan BNSP).

Terkait dengan balai/UPT Diklat sebagai Lembaga Pendidikan, maka secara kelembagaan terkoordinasi dengan regulasi kebijakan di bidang pendidikan tinggi oleh Kemenristekdikti. Selanjutnya, Balai/UPT Diklat Teknis sebagai Lembaga Diklat SDM Transportasi, maka secara kelembagaan berkoordinasi dengan regulasi kebijakan di Ditjen Teknis Kementerian Perhubungan.

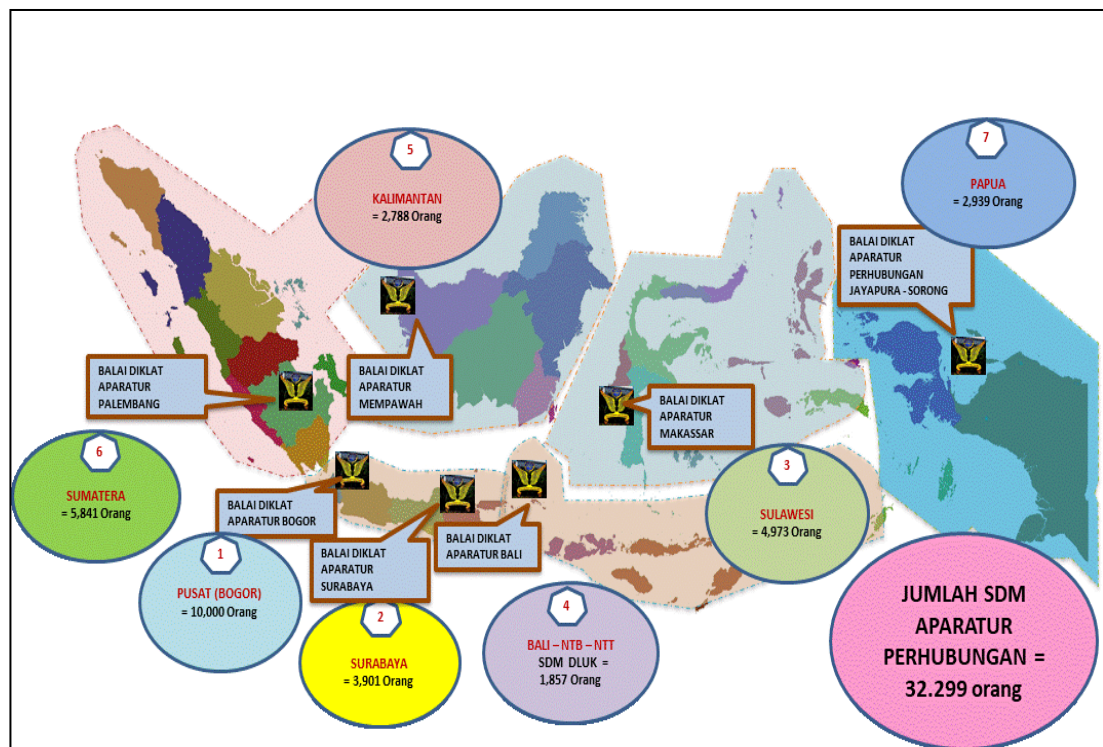
Selanjutnya, terkait dengan Direktorat/UPT Sertifikasi dan Asosiasi profesi transportasi, maka secara kelembagaan terkoordinasi dengan regulasi kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan profesi oleh Kemenakertrans dan BNSP.

Terkait dengan Pusbang Aparatur sebagai Lembaga Diklat Aparatur, maka secara kelembagaan terkoordinasi dengan regulasi kebijakan di bidang ASN Perhubungan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

3.5.2 Kebutuhan Penguatan Kelembagaan Pengembangan SDM Perhubungan 2020-2024

A. Pembentukan Balai Diklat Aparatur

Pelaksanaan pengembangan SDM Perhubungan dalam bidang administratif dan manajerial di bawah Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, dimana jumlah aparatur sipil Perhubungan mencapai jumlah 30.739 pegawai (4.168 pegawai Manajerial dan 26.571 pegawai Teknis) yang tersebar di 34 provinsi seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, Kebutuhan jumlah pendidikan dan pelatihan yang melebihi jumlah kapasitas yang bisa ditampung oleh Pusat Pengembangan SDM Aparatur di Bogor. Oleh karena itu, perlunya pengembangan dan penambahan intitusi/unit kerja baru yang melakukan pengembangan terhadap aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan. Pembentukan UPT baru ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan SDM Kementerian Perhubungan yang efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta, sumber daya manusia yang telah ada dan utilisasi sarana dan prasarana yang telah tersedia.



Gambar 3.3 Pemanfaatan UPT Diklat BPSDM Perhubungan

Metode yang digunakan dalam pengembangan kompetensi ASN Kementerian Perhubungan tersebut mengandung kelemahan, yaitu tidak adanya keselarasan (*alignment*) antara apa yang dipelajari di pelatihan dan persoalan bisnis yang ditangani Kementerian Perhubungan. Sehingga, program pelatihan, diklat, *training center*, atau *learning center* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja. Oleh karena itu, kedepannya Lembaga Diklat

Aparatur bertransformasi menjadi Balai yang berbentuk *Corporate University*, dimana program *corporate university* dirancang agar baik individu karyawan maupun institusi perusahaan sama-sama dapat memetik manfaat besar dari aktivitas belajar, sehingga pengetahuan, keterampilan, dan attitude yang dipelajari dapat diterapkan dan memiliki *linkage* yang kuat serta berdampak signifikan terhadap kinerja pegawai.

Pengertian Corporate University menurut Jeffrey W. Grenzer (2006)⁹ adalah seluruh hasil *learning*, *training*, dan *knowledge* yang mendukung langsung kepada *performansi* unit bisnis agar *performansi*-nya berkembang dan terus berkembang di atas perkembangan rata-rata industry dengan sistem pengajarannya dibuat dalam sebuah kurikulum berdasarkan *best practise* di perusahaan. *Corporate University* berbeda dengan pusdiklat yang selalu menekankan kepada penguasaan dari setiap modul, dimana *Corporate University* lebih mengutamakan peningkatan kecerdasan (*inteligensia*) perusahaan untuk melakukan perubahan, mengeksekusi inisiatif, strategis, dan menyebar "*best practices*" diantara unit usaha dan dari luar.

B. Transformasi Kelembagaan Balai/Sekolah Tinggi di Lingkungan BPSDM Perhubungan

Restrukturisasi Kelembagaan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi dalam Lingkungan BPSDM Perhubungan khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan mencakup:

1. Peningkatan status lembaga pendidikan, meliputi Peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik (memiliki 3 prodi) /Akademi (memiliki 2 prodi)) dan Penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut yang terakreditasi oleh BAN-PT.
2. Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa UPT.
3. Pengembangan kerjasama antara UPT dengan organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional.
4. Pengembangan kerjasama antara UPT dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), *Non Governmental Organisation* (NGO), dan Lembaga diklat internasional dalam penyelenggaraan *Standard Training Package* (STP) atau sertifikasi keahlian profesi dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM Transportasi nasional dan internasional.
5. Pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai dilingkungan PPSDM dan UPT.

⁹ Jeffrey W. Grenzer (2006) Developing and implementing a Corporate University, September 1, 2006

C. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan BPSDM Perhubungan

Restrukturisasi kelembagaan keuangan pengembangan SDM Perhubungan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Pusat Pengembangan SDM Perhubungan dengan melibatkan berbagai stakeholder, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, *Non Governmental Organisation* (NGO), Lembaga Diklat Internasional dan lainnya. Pola pengelolaan keuangan dengan skema BLU yakni dengan optimalisasi dengan asset yang ada seperti penyewaan Gedung, penyewaan fasilitas, penyelenggaraan pelatihan atau *Standard Trainning Package* (STP) serta melakukan *Join riset* (proyek).

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA BPSDM PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

4.1.1 Kegiatan Pengembangan SDM Perhubungan

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja utama program pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2020-2024 yang disampaikan pada **Subbab 2.3.4** sebelumnya, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan BPSDM Perhubungan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2015-2019, maka ditetapkan target sasaran program pengembangan SDM Perhubungan untuk periode Renstra 2020-2024 sebagaimana disampaikan pada **Tabel 4.1**.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pengembangan SDM Perhubungan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran BPSDM Perhubungan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu, capaian kinerja setiap indikator kinerja harus diukur dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada setiap tahunnya. Pengukuran kinerja diperlukan selain untuk menginformasikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pengembangan SDM Perhubungan, juga digunakan sebagai alat evaluasi tentang berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi jika terdapat hambatan maupun ketidakberhasilan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, sehingga dapat disusun kebijakan dan strategi penanganannya.

4.1.2 Target dan Kegiatan Prioritas Nasional BPSDM Perhubungan 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Target dan Kegiatan Prioritas Nasional di Lingkungan BPSDM Perhubungan selama 2020 sampai dengan 2024. Prioritas nasional ini merupakan dukungan secara langsung dan merupakan fokus capaian nasional dan telah ditetapkan sebagaimana disampaikan pada **table 4.2**.

Tabel 4.2 Target dan Kegiatan Prioritas Nasional di Lingkungan BPSDM Perhubungan 2020-2024

Uraian	TARGET VOLUME						ANGGARAN (Rp.000)
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
A. PRIORITAS NASIONAL							12.980.700.000
Jumlah Iulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	5428	5289	5369	5463	5660	27.209	1.170.800.000

Uraian	TARGET VOLUME						ANGGARAN
Jumlah lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	4652	7746	9393	9673	9574	41.038	655.100.000
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat	19510	27731	27831	28361	29071	132.504	746.400.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	6	6	6	6	6	30	399.500.000
Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	16038	16983	17416	17981	18822	87.240	2.710.700.000
Jumlah lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	168637	171523	173228	173570	179570	866.528	2.248.100.000
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut	82392	71573	73912	73572	73942	375.391	1.311.200.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	0	12	12	12	12	48	431.000.000
Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	4873	5434	5674	5626	5883	27.490	1.164.800.000
Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	7145	7169	7906	8017	8303	38.540	1.672.500.000
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara	12495	8222	8287	8317	8452	45.773	255.100.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	0	8	8	8	8	32	215.500.000

4.1.3 Target Keluaran (*Output*) Kegiatan

Tabel 4.3 menyampaikan target keluaran dari kegiatan utama BPSDM Perhubungan untuk perioda Renstra 2020-2024 sesuai dengan perkiraan kebutuhan perkembangan maupun kapasitas (*delivery capacity*) dari Unit Kerja di Lingkungan BPSDM Perhubungan.

Target keluaran (*output*) kegiatan utama ini adalah target capaian yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dari program pengembangan SDM Perhubungan (lihat **Tabel 4.1** sebelumnya). Adapun target capaian untuk setiap indikator kinerja kegiatan (IKK) BPSDM Perhubungan yang menjadi pendukung dari kegiatan utama tersebut selengkapnya disampaikan pada **Lampiran**.

Tabel 4.1 Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2020-2024

PERSPEKTIF	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	2020	2021	2022	2023	2024
Costumer Perspective	T 1. Mewujudkan SDM Transportasi yang kompeten, berdaya saing, memberikan nilai tambah	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	79	79.5	80	80.5
		IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%	100	100	100	100	100
		IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	85	85	85	85
		IKK 1. Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang	366.061	375.253	386.748	389.488	398.738
		IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%	85	85	85	85	85
		IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	%	85	85	85	85	85
		IKK 4. Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%	85	85	85	85	85
		IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	844	844	844	844	844
		IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen	328	351	361	374	389
		IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3	3	3	3
		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)						
Internal bussiness process	T2. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pelaksanaan Diklat Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi	IKK 8. Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDMP	%	90	90	90	90	90
		IKK 9.1 Indeks Profesionalisme ASN KEMENHUB	Indeks	71	72	74	74	75
		IKK 10. Persentase Keterpaduan antara perencanaan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100
		IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	70	80	87	88	89
		IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%	90	90	90	90	90
Learn Growthl &	T3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya dan Manajemen SDM Transportasi	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6
		IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91.5	91.7	91.9	92
		IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75	76	77	78	80
		IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.2	84.2	86.2	88.2	90.2
		IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	80	82	84	85
		IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	85	85	90	90	90
		IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	71	72	73	74
		IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP	Indeks	90	90	90	90	90
		IKK 21. Kualitas Kebijakan BPSDMP	%	90	90	90	90	90
		IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	100	100	100	100
		IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai	78	78.5	79	79.5	80
		IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks	71	72	74	74	75
		IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.8	0.9	0.92	0.96	1
		IKK 25. Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	90	90	90

Tabel 4.3 Target Keluaran (*Output*) Kegiatan BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 (Volume)

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Setkretariat BPSDMP							
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	layanan	10	10	10	10	10	50
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	1	1	1	1	1	5
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	1	1	1	1	5
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	4	4	4	4	4	20
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5
2	PPSDMAP							
	Layanan Perencanaan	laporan	1	1	1	1	1	5
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	2	2	2	2	2	10
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	138	144	146	155	159	742
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	409	310	311	321	327	1678
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	3	3	3	3	3	15
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan	orang	4876	5363	5438	5653	5683	27013
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
3	BP3KSMPPT							
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	63	41	41	41	41	227
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	2	2	2	2	2	10
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2548.512	1757	3162	6185.833	11977.83	25631

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan	orang	7800	7960	8620	8880	8920	42180
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	14	16	16	16	16	78
4	PPSDMP Darat							
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	5	18	18	8	10	59
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	5	7	7	7	7	33
	Layanan Perencanaan	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	3	2	2	2	10
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3	6	6	372	353.13	740
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	155	207	208	207	207	984
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
5	PTDI-STTD							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2173	2173	2173	2173	2173	10865
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	960	960	960	960	960	4800
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	4826	4826	4826	4826	4826	24130
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	48	48	48	48	48	240
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	22	22	22	22	22	110
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	26	26	26	26	26	130
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2317	24387	5373	8950	5281	46308
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	45	45	45	45	45	225
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
6	BP2TD Mempawah							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	239	336	240	360	456	1631
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	750	1853	1753	1773	1713	7842
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2736	10850	10950	11300	11650	47486
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2	11	7	5	0	25
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	3	3	3	3	19
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	13	4	4	7	28
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	27	27	27	27	27	135
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
7	BP2TD Minahasa Selatan							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	540	540	540	540	540	2700
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1355	1523	1673	1848	2098	8497
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	8352	7852	7852	8097	8097	40250
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	70	85	94	115	130	494
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	4	4	4	4	20
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	3	3	3	3	3	15
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	71	21501.35	10823.06	10928.7	1729.75	45054
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	20	20	20	20	20	100
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
8	PKTJ							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1054	1103	1135	1105	1110	5507
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1160	750	750	750	750	4160
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2580	2275	2275	2275	2275	11680
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	6	11	14	23	8	62
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	25	30	30	30	30	145
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	7	7	7	7	35
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	3	3	3	3	17
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	2	4	4	5	3	18
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	41	41	41	41	205
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
9	Poltrada Bali							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	432	144	216	216	216	1224

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	564	2078	2370	2308	1832	9152
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1868	2280	2280	2280	2520	11228
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	13	13	13	13	13	65
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	4	4	4	4	4	20
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	4	2	2	2	2	12
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	2373	129851.2	21737.92	6946.666	0	160909
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	41	41	41	41	205
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
10	Poltrans SDP							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	713	716	788	792	888	3897
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	270	606	1512	1788	2124	6300
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	300	300	300	480	600	1980
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	19	4	34	14	0	71
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	6	6	6	6	6	30
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	3	3	3	3	18
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	7	7	7	7	33

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1445	7032	3172	5022	21383	38054
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	56	35	34	34	35	194
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
11	PPI Madiun							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	817	817	817	817	817	4085
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	948	1499	2048	2094	2195	8784
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	7200	7200	7200	7200	7200	36000
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2372	17319	3396	5636	1761	30484
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	33	38	34	34	34	173
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	48	50	50	50	50	248
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	20	5	11	5	11	52
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	5	5	5	5	25
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3	4	4	4	4	19
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	75	70	73	69	71	358
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
12	PPSDMP Laut							
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	10	16	16	16	16	74
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	16	25	25	25	25	116
	Layanan Perencanaan	laporan	5	12	11	10	10	48
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	6	5	5	5	5	26
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	4	2	5	4	3	18

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	1904	2113	2341	1891	1881	10130
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
13	STIP Jakarta							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2088	2382	2628	2748	2940	12786
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	56420	53677	51770	48580	51898	262345
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	13700	12800	12800	13100	13100	65500
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1425	2540	2350	2400	2400	11115
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	319	16	5	3	1504	1847
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	40	40	40	40	40	200
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	95	141	47	45	46	374
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	1424	1430	1430	1430	1430	7144
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
14	Poltekpel Banten							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2240	2601	2612	2830	2967	13250
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3078	3078	3510	3894	3894	17454
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	9750	7731	8800	8800	8800	43881
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	2268	2268	2268	2268	2316	11388
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	0	0	0	1	2
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	9	9	9	9	9	45
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	17	9	6	6	8	46
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	49	49	49	49	49	245
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
15	Poltekpel Barombong							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2005	2071	2160	2232	2160	10628
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	14175	12750	12750	12750	12779	65204
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3780	3780	3780	3780	3780	18900
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	11350	16826	18874	18922	19018	84990
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	1	1	1	0	3
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	3	10	12	12	12	49
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	3	3	3	3	14
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	12	12	12	12	52
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	1	3	2	2	2	10
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	12	13	12	12	12	61
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
16	Poltekpel Malahayati							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1085	1085	1085	1085	1085	5425
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5304	5304	5304	5304	5304	26520
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	8900	8400	8400	8645	8645	42990
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	504	504	504	504	504	2520
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	2	2	2	2	2	10
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	2	2	2	2	10
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	7	7	7	7	7	35
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	0	3	0	1	0	4
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	43	43	43	43	43	215
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
17	Poltekpel Sorong							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	840	864	888	912	936	4440
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	864	888	912	936	960	4560
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5310	3600	3600	2160	2160	16830
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	720	744	768	792	816	3840
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	439	413	200	200	1252
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	1	1	1	1	1	5
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	5	5	5	5	25
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	2	2	2	2	2	10

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	6832	1470	1275	24	9601
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	19	19	19	19	19	95
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
18	Poltekpel Sumatera Barat							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	720	1140	1420	1740	1980	7000
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3044	6355	7574	9214	10153	36340
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	6580	2900	3770	3630	3650	20530
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	400	640	800	1000	1120	3960
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	1	1	0	1	3
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	7	18	20	20	22	87
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	4	7	7	8	8	34
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	1	1	1	1	8
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	16559.5	28920	7	8571	54058
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	10	17	17	17	17	78
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
19	Poltekpel Surabaya							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1671	1679	1680	1728	1944	8702
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	17312	17840	18368	18896	19429	91845

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	11300	10500	9555	9905	9905	51165
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	6440	6824	6780	6780	6876	33700
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	5	0	0	1	6
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	22	22	22	22	22	110
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	6	6	6	6	6	30
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	0	33	32	31	31	127
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	43	43	43	43	43	215
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
20	BP2TL Jakarta							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	6180	7050	7620	7830	8100	36780
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1400	1400	1400	1400	1400	7000
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1620	1860	1980	2220	2280	9960
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	0	2	2	2	2	8
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	0	6	6	6	8	26
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	4	6	6	6	26
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	34	34	34	34	34	170

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
21	BP3IP Jakarta							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	25660	25984	26310	26643	26990	131587
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	11822	12098	12376	12662	12956	61914
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	4	2	2	2	2	12
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	8	32
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	8	8	8	10	12	46
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	4	2265	2341	2211	2267	9088
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	14	94	94	94	67	363
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
22	PIP Makassar							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2830	2602	2399	2138	2230	12199
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	14940	16480	16810	17065	17330	82625
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	7800	8715	10060	10160	10510	47245
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1220	1950	3610	3785	3565	14130
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	0	2	1	4	7
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	19	20	20	21	21	101
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	10	11	11	12	12	56
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	9	9	7	8	8	41

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	55094.6	34284	20459	11003	120841
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	8	43	43	43	43	180
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
23	PIP Semarang							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2019	2019	2004	2028	2040	10110
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	20305	20594	20627	20610	20635	102771
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5520	3895	3895	3895	3895	21100
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	6956	6956	6956	6956	6956	34780
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	7	3	3	2	15
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	13	13	13	13	13	65
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	7	7	7	7	35
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	16	16	16	16	16	80
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	40	19	18	17	95
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	67	69	70	70	70	346
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
24	PPSDMP Udara							
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	25	9	25	25	25	109
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	18	62	24	24	24	152

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Perencanaan	laporan	7	6	7	7	7	34
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	3	4	4	4	19
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	7	8	8	8	8	39
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	275	2428	277	275	276	3531
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	145	569	575	575	574	2438
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
25	PPI Curug							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1809	2116	1943	1944	2088	9900
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2723	2590	2988	3091	3169	14561
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	4224	3944	4004	4004	4024	20200
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	25	716	1245	169	28	2183
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	44	30	35	40	45	194
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	8	9	10	10	42
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	12	9	10	10	11	52
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	6	6	6	6	6	30
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	20	23	26	26	30	125
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	6	24	20240	15594	4597	40461
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	45	44	42	43	45	219
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
26	Poltekbang Jayapura							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	192	240	288	312	288	1320
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	0	0	24	96	168	288

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	178	178	178	178	178	890
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	860	940	1000	1020	1040	4860
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	200	203	295	206	205	1109
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	4	4	4	4	4	20
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	3	4	4	5	18
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	8	8	9	9	40
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3462	11402	4235	8026	16030	43155
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	10	155	153	180	180	678
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
27	BP3 Curug							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1840	1618	1716	1702	1800	8676
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1045	735	765	800	940	4285
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	0	0	0	50	50
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	0	1	1	1	1	4
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	2	3	3	3	14
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	22	13	6	10	52
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	65	75	75	75	75	365
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
28	API Banyuwangi							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	169	152	190	204	218	933

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	154	198	218	162	155	887
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	500	250	250	250	250	1500
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2	13	15	9	9	48
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	3	3	5	5	6	22
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	3	4	5	5	6	23
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	14	15	19	22	76
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	2	2	2	2	9
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	6	8	10	12	38
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2422	6680	6553	2235	7420	25310
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	264	345	399	458	1507
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
29	Poltekbang Makassar							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	696	816	1008	890	953	4363
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	24	48	72	72	72	288
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	460	597	719	658	700	3134
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1360	900	900	900	900	4960
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	0	0	24	72	0	96
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	31883	75829	123080	37843	5404.96	274040
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	15	16	13	13	13	70
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	5	5	5	5	25
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	15	3	3	3	3	27

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	7970	18943	30461	9419	1349.24	68142
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	36	39	39	39	39	192
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
30	Poltekbang Medan							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	589	576	552	504	576	2797
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	635	626	712	764	828	3565
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2340	492	492	492	492	4308
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	27	14	20	1	62
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	19	20	20	21	22	102
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	10	10	12	12	14	58
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	10	10	10	15	15	60
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	10592	5597	1686	4597	22472
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	16	10	10	10	10	56
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
31	Poltekbang Palembang							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	100	160	220	280	260	1020
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	0	48	0	0	0	48
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	478	639	658	639	658	3072

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1460	400	400	400	400	3060
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	664	3269	3	2352	1352	7640
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	1	1	1	1	1	5
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	4	1006	7509	702	7506	16727
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	37	36	37	37	37	184
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5
32	Poltekbang Surabaya							
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1318	1374	1473	1492	1500	7157
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	677	723	730	823	815	3768
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	730	705	680	655	630	3400
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	450	200	0	200	850
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	23	29	35	41	47	175
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	1	1	1	1	1	5
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5
	Pemenuhan Tenaga Pendidik	orang	0	0	0	12	12	24

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume					Total Target 2020-2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	170	820	63404	32312	38725	135431
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	60	63	65	65	65	318
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

4.2 KERANGKA PENDANAAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN 2020-2024

4.2.1 Kebutuhan Dana Pengembangan SDM Perhubungan

Untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target output maupun capaian sasaran kinerja pada **Sub Bab 4.1** di atas dan memenuhi kegiatan prioritas nasional di Lingkungan BPSDM Perhubungan selama 2020-2024 yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 (lihat **Table 4.4**), perkiraan kebutuhan pendanaan untuk setiap kegiatan pengembangan SDM Transportasi seperti yang disampaikan pada **Tabel 4.3**. Total kebutuhan pembiayaan untuk Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 38.561.722.137.000 (tiga puluh delapan triliun lima ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

4.2.2 Skema Pembiayaan Alternatif

Porsi pembagian sumber pendanaan untuk pengembangan SDM Perhubungan pada periode 2020-2024 disampaikan pada **Gambar 4.1**, dengan alternatif sumber pendanaan dari APBN BPSDM Perhubungan, PNBP/BLU berikut dengan pengalokasian/penggunaan dananya.



Gambar 4.1 Skema Pendanaan BPSDM Perhubungan 2020-2024

Tabel 4.3 Kebutuhan Pendanaan Program Pengembangan SDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024

(Anggaran dalam Milyar)

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
1	Setkretariat BPSDMP													
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	layanan	10	10	10	10	10	50	56.17	61.38	65.71	70.30	75.37	328.94
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	1	1	1	1	1	5	0.50	0.54	0.57	0.61	0.66	2.88
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	1	1	1	1	5	2.10	2.25	2.40	2.57	2.74	12.07
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.08	24.58	25.07	25.57	26.08	125.38
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	4	4	4	4	4	20	1.09	1.17	1.25	1.33	1.43	6.26
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	1.03	4.80	5.13	5.49	5.88	22.34
2	PPSDMAP													
	Layanan Perencanaan	laporan	1	1	1	1	1	5	0.82	0.84	0.84	0.87	0.89	4.27
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	2	2	2	2	2	10	1.84	1.88	1.92	1.95	1.99	9.59
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	138	144	146	155	159	742	30.33	31.69	33.11	34.60	36.24	165.97
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	409	310	311	321	327	1678	25.53	25.68	25.95	26.37	26.89	130.43
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	25.89	30.62	31.22	31.83	32.45	152.02
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	3	3	3	3	3	15	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18	5.82
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan	orang	4876	5363	5438	5653	5683	27013	64.87	69.61	76.56	89.27	98.19	398.50
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	4.95	5.00	5.00	5.05	5.05	25.03
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	1.72	1.12	1.01	1.02	1.02	5.90
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	1.48	1.52	1.57	1.61	1.66	7.83
3	BP3KSMP													

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	63	41	41	41	41	227	6.60	7.92	9.50	11.40	13.68	49.10
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	2	2	2	2	2	10	0.08	0.09	0.11	0.15	0.18	0.61
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2548.512	1757	3162	6185.833	11977.83	25631	23.19	19.82	22.91	40.91	86.58	193.40
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	10.82	15.21	15.51	15.81	16.12	73.46
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.25
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan	orang	7800	7960	8620	8880	8920	42180	20.77	22.29	26.33	28.93	31.04	129.35
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.31	0.37	0.44	0.53	0.64	2.29
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	14	16	16	16	16	78	0.31	0.47	0.56	0.84	1.26	3.43
4	PPSDMP Darat													
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	5	18	18	8	10	59	0.77	6.15	6.88	5.74	7.29	26.83
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	5	7	7	7	7	33	5.96	6.35	6.50	6.65	6.80	32.26
	Layanan Perencanaan	laporan	2	2	2	2	2	10	0.82	1.28	1.87	1.55	1.71	7.23
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	3	2	2	2	10	0.22	0.40	0.22	0.24	0.27	1.35
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3	6	6	372	353.13	740	4.47	28.11	5.31	151.98	209.96	399.82
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	155	207	208	207	207	984	11.60	22.78	26.86	28.12	30.49	119.85
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	12.50	12.45	12.70	12.95	13.21	63.80
5	PTDI-STTD													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2173	2173	2173	2173	2173	10865	88.59	97.45	107.20	117.91	129.71	540.86
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	960	960	960	960	960	4800	7.50	9.28	10.10	11.01	12.01	49.89

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	4826	4826	4826	4826	4826	24130	22.02	24.22	26.64	29.30	32.23	134.41
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	48	48	48	48	48	240	1.04	1.15	1.26	1.39	1.04	5.88
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	7.55	10.33	11.04	11.85	40.76
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	22	22	22	22	22	110	2.73	3.01	3.31	3.64	4.00	16.70
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.13	0.14	0.16	0.17	0.19	0.79
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.84
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	1.16
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	26	26	26	26	26	130	3.17	3.49	3.84	4.22	4.65	19.37
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2317	24387	5373	8950	5281	46308	26.52	184.60	28.32	30.65	23.47	293.56
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	45	45	45	45	45	225	6.38	7.01	7.71	652.84	9.33	683.28
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	44.10	43.84	44.71	45.60	46.52	224.76
6	BP2TD Mempawah													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	239	336	240	360	456	1631	8.76	12.64	9.03	13.54	17.16	61.13
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	750	1853	1753	1773	1713	7842	29.40	29.86	30.86	32.57	35.22	157.91
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2736	10850	10950	11300	11650	47486	11.90	49.15	52.06	56.41	61.05	230.57
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	8.57	10.30	11.27	11.75	12.46	54.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2	11	7	5	0	25	4.92	15.56	11.06	6.51	1.82	39.88
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	3	3	3	3	19	1.65	0.71	0.71	0.71	0.71	4.49

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.99
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1.34
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.36	0.54	0.54	0.54	0.54	2.51
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	13	4	4	7	28	0.00	21.13	6.55	11.08	62.23	100.99
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	27	27	27	27	27	135	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	35.06
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.15	12.03	12.27	12.52	12.77	60.74
7	BP2TD Minahasa Selatan													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	540	540	540	540	540	2700	18.72	20.59	21.53	22.47	24.34	107.65
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1355	1523	1673	1848	2098	8497	27.23	30.30	31.82	33.55	36.70	159.60
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	8352	7852	7852	8097	8097	40250	15.67	17.67	21.21	26.24	28.87	109.66
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	70	85	94	115	130	494	0.95	1.15	1.25	1.42	1.35	6.13
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.20	15.72	10.90	1.24	7.76	35.83
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.20	0.23	36.94	18.77	1.83	57.98
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	4	4	4	4	20	0.83	0.92	0.96	1.00	1.08	4.79
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15	0.43	0.48	0.50	0.52	0.56	2.49
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	3	3	3	3	3	15	0.38	0.41	0.43	0.45	0.49	2.17
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	71	21501.35	10823.06	10928.7	1729.75	45054	0.89	257.06	98.15	99.81	23.22	479.13
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	20	20	20	20	20	100	18.81	20.69	21.63	22.57	24.45	108.13
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.82	13.37	13.64	13.91	14.19	66.93

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
8	PKTJ													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1054	1103	1135	1105	1110	5507	33.87	40.54	47.23	49.43	54.19	225.27
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1160	750	750	750	750	4160	19.42	21.15	21.24	23.04	25.22	110.08
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2580	2275	2275	2275	2275	11680	7.74	7.47	8.22	9.04	9.95	42.42
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	6.51	7.46	5.05	5.41	8.18	32.61
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	6	11	14	23	8	62	8.40	8.52	49.01	15.83	5.99	87.75
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	25	30	30	30	30	145	1.63	2.38	2.62	2.88	3.17	12.68
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	7	7	7	7	35	1.14	1.25	1.38	1.51	1.66	6.94
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.51	0.56	0.61	0.67	0.74	3.09
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.30	0.33	0.37	0.40	0.44	1.84
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	3	3	3	3	17	0.64	0.08	0.09	0.10	0.11	1.03
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	2	4	4	5	3	18	12.48	19.50	20.68	13.14	34.74	100.54
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	41	41	41	41	205	6.78	7.45	8.20	9.02	9.92	41.37
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	27.23	25.79	26.30	26.82	27.34	133.47
9	Poltrada Bali													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	432	144	216	216	216	1224	14.23	12.79	20.34	27.09	28.93	103.38
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	564	2078	2370	2308	1832	9152	5.60	19.67	24.03	25.10	21.64	96.03
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1868	2280	2280	2280	2520	11228	15.12	12.54	13.79	15.17	16.69	73.32

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	16.20	10.75	12.25	12.35	13.01	64.56
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	114.25	10.35	23.90	117.91	266.41
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	13	13	13	13	13	65	0.62	0.68	0.75	0.82	0.90	3.77
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	4	4	4	4	4	20	0.57	0.99	1.05	1.14	1.21	4.95
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	1.08	1.19	1.31	1.44	1.58	6.60
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	4	2	2	2	2	12	1.10	1.22	1.34	1.47	1.62	6.74
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.54	0.59	0.65	0.71	0.79	3.28
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	2373	129851.2	21737.92	6946.666	0	160909	23.83	311.69	96.28	46.32	0.00	478.12
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	41	41	41	41	205	21.24	28.38	31.01	33.94	37.16	151.73
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.27	21.39	21.81	22.25	22.69	104.40
10	Poltrans SDP													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	713	716	788	792	888	3897	21.19	20.92	23.31	23.72	26.78	115.92
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	270	606	1512	1788	2124	6300	10.52	10.34	12.23	12.93	13.55	59.58
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	300	300	300	480	600	1980	1.89	1.50	1.50	2.40	3.00	10.29
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	18.30	8.27	11.42	11.84	13.84	63.67
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	19	4	34	14	0	71	0.00	66.61	0.00	0.00	3.65	70.25
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	6	6	6	6	6	30	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	4.22
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30	2.40	1.07	1.07	1.07	1.07	6.70

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	3	3	3	3	18	1.17	0.33	0.33	0.33	0.33	2.50
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15	0.22	0.19	0.19	0.19	0.19	0.98
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	7	7	7	7	33	0.34	0.48	0.48	0.48	0.48	2.25
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1445	7032	3172	5022	21383	38054	26.02	156.08	46.53	56.14	65.87	350.65
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	56	35	34	34	35	194	10.38	8.05	7.86	9.12	9.26	44.67
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	33.19	29.96	30.56	31.17	31.79	156.67
11	PPI Madiun													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	817	817	817	817	817	4085	24.86	24.84	24.84	24.84	24.84	124.23
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	948	1499	2048	2094	2195	8784	27.28	34.38	39.78	38.77	41.41	181.61
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	7200	7200	7200	7200	7200	36000	51.08	51.08	51.08	51.08	51.04	255.38
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	9.73	33.33	28.96	37.70	33.86	143.56
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2372	17319	3396	5636	1761	30484	26.64	358.28	311.24	386.77	317.49	1400.43
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	33	38	34	34	34	173	4.70	5.08	5.00	5.00	5.00	24.77
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	48	50	50	50	50	248	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	18.74
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	20	5	11	5	11	52	4.18	3.01	4.21	3.01	4.21	18.62
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	2.75
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	5	5	5	5	25	0.75	0.78	0.78	0.78	0.78	3.88
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3	4	4	4	4	19	3.16	3.30	3.30	3.30	3.30	16.38
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	75	70	73	69	71	358	20.13	15.38	15.71	14.38	14.78	80.39

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.90	26.57	27.10	27.65	28.20	134.42
12	PPSDMP Laut													
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	10	16	16	16	16	74	1.80	4.69	5.10	5.54	6.04	23.16
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	16	25	25	25	25	116	6.87	8.50	9.04	9.63	10.29	44.33
	Layanan Perencanaan	laporan	5	12	11	10	10	48	2.44	8.64	6.60	6.84	7.43	31.96
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	6	5	5	5	5	26	1.59	1.42	1.56	1.71	1.88	8.16
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	4	2	5	4	3	18	5.25	4.46	6.98	4.72	8.16	29.57
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	1904	2113	2341	1891	1881	10130	21.06	25.75	28.50	30.49	36.47	142.28
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.31	11.31	11.54	11.77	12.00	57.93
13	STIP Jakarta													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2088	2382	2628	2748	2940	12786	36.20	61.20	59.09	64.23	68.93	289.65
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	56420	53677	51770	48580	51898	262345	43.98	48.03	48.03	48.03	48.03	236.10
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	13700	12800	12800	13100	13100	65500	22.08	24.76	29.71	36.49	43.78	156.82
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1425	2540	2350	2400	2400	11115	6.66	18.30	15.24	15.90	15.90	72.00
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	5.11	5.89	20.55	5.11	36.66
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	319	16	5	3	1504	1847	41.72	16.91	31.64	15.64	21.62	127.53
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	40	40	40	40	40	200	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	6.98
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	2.21

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	1.72
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.21
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.75
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	95	141	47	45	46	374	13.50	13.67	8.72	13.18	13.88	62.97
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	1424	1430	1430	1430	1430	7144	9.36	10.31	10.32	10.31	10.31	50.61
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	109.09	108.49	110.23	111.99	113.78	553.58
14	Poltekpel Banten													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2240	2601	2612	2830	2967	13250	93.53	93.53	93.53	93.53	93.53	467.67
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3078	3078	3510	3894	3894	17454	19.92	20.06	20.06	20.06	20.06	100.16
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	9750	7731	8800	8800	8800	43881	30.26	33.29	33.05	36.36	39.99	172.95
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	2268	2268	2268	2268	2316	11388	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	47.03
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	0.72	0.72	16.52	16.78	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	0	0	0	1	2	0.72	0.00	0.00	0.00	1.82	2.54
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	9	9	9	9	9	45	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	9.65
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.75
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	4.23
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.50
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	2.41
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	17	9	6	6	8	46	145.82	104.53	67.03	16.69	39.17	373.24

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	49	49	49	49	49	245	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	33.61
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	26.05	32.97	33.63	34.30	34.99	161.95
15	Poltekpel Barombang													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2005	2071	2160	2232	2160	10628	45.84	43.54	42.85	44.25	43.38	219.86
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	14175	12750	12750	12750	12779	65204	62.41	11.83	11.85	11.85	11.91	109.84
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3780	3780	3780	3780	3780	18900	12.25	14.70	17.63	21.68	23.84	90.09
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	11350	16826	18874	18922	19018	84990	23.91	19.44	19.59	20.20	21.11	104.25
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	4.49	12.89	8.57	9.71	6.68	42.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	1	1	1	0	3	0.00	2.00	0.88	3.00	1.82	7.70
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	3	10	12	12	12	49	0.18	0.30	0.35	0.35	0.35	1.53
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	3	3	3	3	14	0.20	0.25	0.26	0.26	0.27	1.23
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	1.77
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	12	12	12	12	52	0.17	0.30	0.31	0.32	0.33	1.43
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	1	3	2	2	2	10	3.18	23.67	27.80	15.13	32.42	102.21
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	12	13	12	12	12	61	10.97	10.84	10.53	10.62	10.70	53.66
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	30.57	49.96	50.66	51.37	52.09	234.65
16	Poltekpel Malahayati													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1085	1085	1085	1085	1085	5425	34.84	25.10	25.10	25.10	25.10	135.22

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5304	5304	5304	5304	5304	26520	23.17	23.17	23.17	23.17	23.17	115.87
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	8900	8400	8400	8645	8645	42990	13.98	15.84	19.00	23.47	25.82	98.11
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	504	504	504	504	504	2520	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	13.09
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	5.42	6.47	6.47	6.47	14.92	39.75
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	2	2	2	2	2	10	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2.12
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	2	2	2	2	10	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	1.21
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	7	7	7	7	7	35	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	4.73
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	1.32
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	0	3	0	1	0	4	0.00	6.82	0.00	1.64	0.00	8.46
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	43	43	43	43	43	215	13.05	13.32	13.62	13.92	14.26	68.17
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	21.70	18.19	18.56	18.93	19.30	96.68
17	Poltekpel Sorong													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	840	864	888	912	936	4440	42.62	46.03	48.10	53.57	57.73	248.06
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	864	888	912	936	960	4560	44.48	46.70	49.02	51.46	54.02	245.68
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5310	3600	3600	2160	2160	16830	11.27	9.16	10.33	6.91	7.55	45.23
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	720	744	768	792	816	3840	4.77	5.33	5.69	6.00	6.56	28.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	22.97	10.77	0.40	0.60	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat	lokasi	0	439	413	200	200	1252	0.00	92.62	4.10	0.20	2.02	98.94

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Transportasi													
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	1	1	1	1	1	5	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	5.75
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	5	5	5	5	25	0.39	0.43	0.48	0.52	0.58	2.40
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	2	2	2	2	2	10	2.65	2.91	3.20	3.52	3.87	16.15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.34	0.37	0.41	0.45	0.49	2.05
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.40	0.45	0.49	0.54	0.59	2.47
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	6832	1470	1275	24	9601	0.00	148.66	12.18	11.68	0.58	173.10
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	19	19	19	19	19	95	17.63	19.36	21.26	23.34	25.64	107.23
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	20.03	20.81	21.23	21.65	22.08	105.81
18	Poltekpel Sumatera Barat													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	720	1140	1420	1740	1980	7000	25.41	43.72	54.12	63.29	71.19	257.73
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3044	6355	7574	9214	10153	36340	19.34	24.15	27.14	31.57	34.38	136.59
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	6580	2900	3770	3630	3650	20530	31.08	23.08	28.98	27.31	25.97	136.43
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	400	640	800	1000	1120	3960	6.03	6.30	7.92	9.95	11.03	41.23
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	4.73	9.66	16.42	3.92	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	1	1	0	1	3	0.00	33.14	4.71	0.00	12.98	50.83
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	7	18	20	20	22	87	0.40	1.06	1.08	1.08	1.09	4.70
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	4	7	7	8	8	34	0.41	0.64	0.59	0.64	0.65	2.93
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	1	1	1	1	8	0.38	0.10	0.11	0.11	0.12	0.81

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.23	0.25	0.25	0.27	0.28	1.27
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.09	0.21	0.26	0.28	0.30	1.13
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	16559.5	28920	7	8571	54058	0.00	115.52	141.77	5.02	15.85	278.16
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	10	17	17	17	17	78	7.63	9.14	9.53	9.97	10.44	46.70
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	21.75	21.89	22.33	22.77	23.23	111.96
19	Poltekpel Surabaya													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1671	1679	1680	1728	1944	8702	75.13	91.15	94.15	95.04	101.69	457.16
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	17312	17840	18368	18896	19429	91845	11.08	11.76	12.12	12.49	12.85	60.30
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	11300	10500	9555	9905	9905	51165	24.30	27.10	29.59	33.74	37.12	151.86
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	6440	6824	6780	6780	6876	33700	16.78	18.45	20.76	20.76	20.03	96.77
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	23.36	4.60	6.67	0.10	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	5	0	0	1	6	0.00	36.50	0.00	0.00	3.65	40.15
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	22	22	22	22	22	110	0.60	0.76	0.76	0.76	0.76	3.66
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.48	0.66	0.66	0.66	0.66	3.12
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.22	0.57	0.57	0.57	0.57	2.52
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	6	6	6	6	6	30	2.36	2.47	2.47	2.47	2.47	12.24
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	0	33	32	31	31	127	0.00	120.40	6.72	1.45	1.45	130.03
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	43	43	43	43	43	215	6.16	7.07	7.07	7.07	7.07	34.45

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	66.50	66.72	67.71	68.73	69.75	339.41
20	BP2TL Jakarta													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	6180	7050	7620	7830	8100	36780	53.23	60.25	68.23	76.66	91.74	350.11
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1400	1400	1400	1400	1400	7000	10.37	13.05	15.54	18.53	20.32	77.80
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1620	1860	1980	2220	2280	9960	17.07	24.78	26.97	29.73	32.84	131.38
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	8.68	8.68	8.68	8.68	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5	34.60	48.22	30.08	43.00	63.06	218.96
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	0	2	2	2	2	8	0.00	0.74	0.79	0.84	0.90	3.27
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	0	6	6	6	8	26	0.00	0.28	0.34	0.41	0.65	1.68
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	4	6	6	6	26	0.73	0.81	0.89	0.98	1.08	4.48
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.19	0.21	0.23	0.26	0.28	1.17
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	34	34	34	34	34	170	4.89	5.38	5.91	6.50	7.15	29.83
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	19.56	27.00	27.43	27.87	28.32	130.19
21	BP3IP Jakarta													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	25660	25984	26310	26643	26990	131587	18.21	18.46	18.72	18.99	19.26	93.65
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	11822	12098	12376	12662	12956	61914	36.05	36.91	37.77	38.66	39.57	188.95
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.20	0.24	0.28	17.61	16.47	34.80
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	4	2	2	2	2	12	0.53	0.74	0.79	0.84	0.90	3.80

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	8	32	0.26	0.28	0.34	0.41	0.65	1.93
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.71	0.86	0.86	0.94	0.94	4.32
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.73
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	8	8	8	10	12	46	0.62	0.69	0.84	0.92	1.17	4.25
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	4	2265	2341	2211	2267	9088	2.79	28.54	57.11	19.01	25.90	133.35
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	14	94	94	94	67	363	11.21	13.56	14.78	15.84	17.30	72.69
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	43.33	51.07	51.76	52.45	53.15	251.77
22	PIP Makassar													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2830	2602	2399	2138	2230	12199	27.57	24.95	22.33	17.21	20.18	112.24
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	14940	16480	16810	17065	17330	82625	85.58	111.26	118.64	125.52	132.92	573.92
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	7800	8715	10060	10160	10510	47245	28.48	31.83	36.74	37.10	38.38	172.53
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1220	1950	3610	3785	3565	14130	10.65	10.40	11.18	13.16	13.25	58.64
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	29.73	1.43	2.90	0.68	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	0	2	1	4	7	0.00	16.21	5.81	4.22	32.76	58.99
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	19	20	20	21	21	101	1.86	2.19	2.20	2.32	2.33	10.89
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	10	11	11	12	12	56	0.69	1.11	1.12	1.23	1.24	5.39
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	9	9	7	8	8	41	1.51	1.85	1.51	1.83	1.86	8.55
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.23	0.25	0.27	0.30	0.33	1.38
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.16	0.17	0.19	0.21	0.23	0.95

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	55094.6	34284	20459	11003	120841	0.00	308.79	263.69	191.55	725.99	1490.02
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	8	43	43	43	43	180	10.22	11.25	12.38	13.62	14.98	62.45
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	47.97	68.20	69.20	70.22	71.26	326.86
23	PIP Semarang													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2019	2019	2004	2028	2040	10110	78.18	81.71	83.28	83.09	89.19	415.45
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	20305	20594	20627	20610	20635	102771	12.74	12.99	13.25	13.52	13.79	66.28
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5520	3895	3895	3895	3895	21100	22.32	22.62	17.83	18.32	18.63	99.72
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	6956	6956	6956	6956	6956	34780	11.19	11.42	11.65	11.88	12.12	58.25
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	0.38	0.80	1.70	30.34	33.22
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	7	3	3	2	15	0.00	75.68	25.80	1.70	23.82	127.00
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	13	13	13	13	13	65	1.27	1.30	1.32	1.35	1.38	6.61
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	7	7	7	7	35	1.08	1.10	1.12	1.14	1.16	5.60
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	2.14	2.18	2.22	2.27	2.31	11.13
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.36	0.37	0.37	0.38	0.39	1.87
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	16	16	16	16	16	80	13.07	13.33	13.60	13.87	14.15	68.01
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	40	19	18	17	95	2.00	391.00	296.34	134.88	221.91	1046.13
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	67	69	70	70	70	346	15.98	16.54	17.02	17.96	18.30	85.81
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	60.74	76.41	77.56	78.72	79.90	373.33
24	PPSDMP Udara													

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	25	9	25	25	25	109	0.99	5.91	8.47	9.32	10.25	34.93
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	18	62	24	24	24	152	9.85	24.38	16.65	17.85	19.20	87.93
	Layanan Perencanaan	laporan	7	6	7	7	7	34	1.03	2.41	4.47	4.92	5.41	18.24
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	3	4	4	4	19	1.05	2.06	1.94	2.14	2.35	9.54
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	7	8	8	8	8	39	0.95	3.05	5.40	5.94	6.54	21.88
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	275	2428	277	275	276	3531	0.20	39.10	2.08	2.23	2.92	46.53
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	145	569	575	575	574	2438	8.82	43.17	46.89	45.51	49.82	194.20
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	14.90	14.83	15.13	15.43	15.74	76.02
25	PPI Curug													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1809	2116	1943	1944	2088	9900	75.67	85.46	75.17	72.50	80.09	388.89
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2723	2590	2988	3091	3169	14561	160.28	118.63	124.57	133.76	130.13	667.36
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	4224	3944	4004	4004	4024	20200	20.33	20.67	21.44	21.22	21.42	105.08
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	3.97	6.86	7.50	6.01	24.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	25	716	1245	169	28	2183	1.01	26.77	89.85	98.48	132.87	348.99
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	44	30	35	40	45	194	3.62	2.39	2.81	2.95	4.10	15.89
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	8	9	10	10	42	0.85	0.49	0.51	0.53	0.56	2.94
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	12	9	10	10	11	52	3.26	1.37	1.37	1.37	1.37	8.74
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	6	6	6	6	6	30	0.29	0.30	0.33	0.34	0.36	1.62

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	20	23	26	26	30	125	1.85	2.24	2.30	2.40	2.51	11.29
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	6	24	20240	15594	4597	40461	7.84	45.65	24.36	52.15	31.25	161.24
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	45	44	42	43	45	219	8.27	7.92	8.93	9.56	10.30	44.96
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	79.33	77.47	78.71	79.96	81.24	396.71
26	Poltekbang Jayapura													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	192	240	288	312	288	1320	5.34	8.72	9.83	10.53	9.83	44.24
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	0	0	24	96	168	288	0.00	0.00	2.91	7.59	7.19	17.68
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	178	178	178	178	178	890	10.41	13.17	20.64	20.92	21.82	86.97
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	860	940	1000	1020	1040	4860	5.47	4.23	4.75	5.10	5.46	25.01
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	3.02	3.77	7.30	4.71	2.60	21.40
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	200	203	295	206	205	1109	0.47	12.16	50.86	65.41	36.29	165.20
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	4	4	4	4	4	20	0.46	0.49	0.55	0.55	0.55	2.60
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	3	4	4	5	18	0.13	0.25	0.36	0.36	0.47	1.56
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	8	8	9	9	40	0.58	0.92	0.92	1.14	1.14	4.71
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.39	0.40	0.56	0.67	0.80	2.82
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3462	11402	4235	8026	16030	43155	11.35	107.00	43.06	40.81	47.50	249.72
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	10	155	153	180	180	678	7.13	8.10	9.50	9.93	10.01	44.68
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.81	18.16	18.52	18.89	19.28	91.65
27	BP3 Curug													

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1840	1618	1716	1702	1800	8676	17.17	23.98	19.47	20.42	21.39	102.43
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1045	735	765	800	940	4285	6.36	3.99	4.18	4.33	5.17	24.04
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	4.00	5.50	5.29	5.03	19.82
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	0	0	0	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	0	1	1	1	1	4	0.00	0.04	0.04	0.05	0.05	0.17
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	2	3	3	3	14	0.82	0.82	0.85	0.87	0.88	4.24
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	22	13	6	10	52	0.25	49.04	59.91	31.72	53.02	193.95
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	65	75	75	75	75	365	10.88	11.46	12.15	12.64	13.06	60.19
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.63	16.58	16.91	17.25	17.59	84.95
28	API Banyuwangi													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	169	152	190	204	218	933	22.37	17.97	18.90	20.02	21.09	100.35
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	154	198	218	162	155	887	52.91	73.81	74.68	80.92	80.85	363.17
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	500	250	250	250	250	1500	2.61	2.37	2.49	2.61	2.74	12.82
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	2.50	10.32	6.26	8.20	6.00	33.28
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2	13	15	9	9	48	6.00	186.00	105.17	245.13	36.26	578.55
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	3	3	5	5	6	22	0.25	0.44	0.78	0.78	0.93	3.18
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	3	4	5	5	6	23	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	1.17
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	14	15	19	22	76	1.03	1.05	1.14	1.20	1.26	5.68

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	2	2	2	2	9	0.10	0.15	0.16	0.17	0.18	0.76
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	6	8	10	12	38	0.46	1.09	1.15	1.20	1.26	5.17
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2422	6680	6553	2235	7420	25310	20.48	74.29	63.45	20.16	23.86	202.24
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	264	345	399	458	1507	4.81	8.89	8.47	9.21	9.95	41.34
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	21.24	23.84	24.20	24.57	24.95	118.80
29	Poltekbang Makassar													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	696	816	1008	890	953	4363	60.98	51.43	64.44	69.06	78.42	324.34
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	24	48	72	72	72	288	10.32	0.00	0.84	2.17	0.00	13.32
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	460	597	719	658	700	3134	10.67	18.93	20.53	19.25	20.75	90.14
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1360	900	900	900	900	4960	4.69	2.31	2.54	2.79	3.07	15.38
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	0	0	24	72	0	96	0.00	0.00	0.85	2.55	0.00	3.40
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	5.39	8.45	8.54	3.60	25.98
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	31883	75829	123080	37843	5404.96	274040	142.82	287.62	428.84	652.44	215.09	1726.80
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	15	16	13	13	13	70	0.57	1.57	1.89	2.26	2.72	9.01
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	5	5	5	5	25	0.26	0.50	0.59	0.68	0.80	2.83
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	15	3	3	3	3	27	0.44	1.12	1.31	1.53	1.79	6.18
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.20	0.21	0.25	0.29	0.34	1.29
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.35	1.07	1.28	1.54	1.85	6.09
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	7970	18943	30461	9419	1349.24	68142	47.47	71.02	119.47	158.80	34.77	431.53

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	36	39	39	39	39	192	5.58	15.61	17.15	18.85	20.71	77.90
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.92	32.07	32.58	33.11	33.64	156.31
30	Poltekbang Medan													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	589	576	552	504	576	2797	24.53	20.11	19.03	17.29	18.99	99.95
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	635	626	712	764	828	3565	80.20	13.78	15.86	18.09	20.35	148.28
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2340	492	492	492	492	4308	7.64	1.61	1.61	1.61	1.61	14.07
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	5.79	4.75	8.40	6.26	25.20
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	27	14	20	1	62	0.00	33.95	9.52	49.40	4.82	97.69
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	19	20	20	21	22	102	0.79	0.95	1.04	1.25	1.38	5.41
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	10	10	12	12	14	58	1.02	1.12	1.24	1.36	1.50	6.23
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.46	0.51	0.56	0.62	0.68	2.82
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.18	0.19	0.21	0.24	0.26	1.08
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	10	10	10	15	15	60	0.62	0.69	0.76	0.83	0.91	3.81
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	10592	5597	1686	4597	22472	0.00	100.52	59.74	33.71	72.15	266.12
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	16	10	10	10	10	56	12.60	13.86	15.25	16.78	18.45	76.95
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	25.06	26.59	27.05	27.51	27.98	134.19
31	Poltekbang Palembang													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	100	160	220	280	260	1020	2.93	5.92	8.19	9.78	9.32	36.15
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	0	48	0	0	0	48	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	11.22

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	478	639	658	639	658	3072	15.26	18.82	16.24	16.70	17.90	84.93
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1460	400	400	400	400	3060	8.48	1.93	1.93	1.93	1.93	16.20
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	4.50	3.92	8.50	8.07	5.34	30.32
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	664	3269	3	2352	1352	7640	4.50	63.86	12.15	9.47	7.17	97.15
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	1	1	1	1	1	5	1.09	1.20	1.32	1.45	1.60	6.67
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.22	0.24	0.27	0.30	0.33	1.36
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.52	0.57	0.63	0.69	0.76	3.17
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.26
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.84
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	4	1006	7509	702	7506	16727	3.02	40.49	21.26	5.34	6.53	76.64
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	37	36	37	37	37	184	5.42	10.08	8.05	8.85	9.74	42.13
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	17.52	18.15	18.51	18.88	19.26	92.32
32	Poltekbang Surabaya													
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1318	1374	1473	1492	1500	7157	33.99	33.49	35.32	33.05	35.02	170.87
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	677	723	730	823	815	3768	23.38	25.92	25.52	27.91	26.50	129.22
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	730	705	680	655	630	3400	11.69	11.46	11.23	11.00	10.78	56.16
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	10.69	9.12	7.50	7.84	35.15
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	450	200	0	200	850	0.00	72.13	77.68	13.50	11.91	175.21

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Total Target 2020-2024	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024	Total Anggaran 2020-2024
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	23	29	35	41	47	175	1.53	1.79	1.83	1.86	1.90	8.92
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.35	0.50	0.51	0.52	0.53	2.39
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.57	0.57	0.59	0.60	0.61	2.94
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.89
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.20	0.30	0.30	0.31	0.32	1.43
	Pemenuhan Tenaga Pendidik	orang	0	0	0	12	12	24	0.00	0.00	0.00	1.61	1.65	3.26
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	170	820	63404	32312	38725	135431	1.71	10.34	259.84	183.21	202.72	657.81
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	60	63	65	65	65	318	5.18	5.98	6.38	6.81	6.89	31.24
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	33.73	37.17	37.81	38.46	39.12	186.29
Total Pendanaan Renstra 2020-2024 BPSDM Perhubungan									4,718.50	8,939.01	7,874.56	8,679.27	8,350.37	38,561.72

Tabel 4.4 Rekap Pendanaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Periode Tahun 2020-2024

URAIAN	RPJMN 2020-2024 (Rp. 000)							KERANGKA PENDANAAN BPSDMP HASIL REVIEW final 2020-2024 (Rp.000)						
	TARGET VOLUME						Anggaran RPJMN	TARGET VOLUME						usulan kerangka pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
A. PRIORITAS NASIONAL							12.980.700.000							12.980.700.001
Jumlah lulusanDiklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat	5428	5289	5369	5463	5660	27.209	1.170.800.000	5428	5289	5369	5463	5660	27.209	1.170.800.000
Jumlah lulusanDiklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat	4652	7746	9393	9673	9574	41.038	655.100.000	4652	7746	9393	9673	9574	41.038	655.100.000
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Darat	19510	27731	27831	28361	29071	132.504	746.400.000	19510	27731	27831	28361	29071	132.504	746.400.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	6	6	6	6	6	30	399.500.000	6	6	6	6	6	30	399.500.001
Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut	16038	16983	17416	17981	18822	87.240	2.710.700.000	16038	16983	17416	17981	18822	87.240	2.710.700.000
Jumlah lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Laut	168637	171523	173228	173570	179570	866.528	2.248.100.000	168637	171523	173228	173570	179570	866.528	2.248.100.000
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Laut	82392	71573	73912	73572	73942	375.391	1.311.200.000	82392	71573	73912	73572	73942	375.391	1.311.200.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	0	12	12	12	12	48	431.000.000	0	12	12	12	12	48	431.000.000
Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Udara	4873	5434	5674	5626	5883	27.490	1.164.800.000	4873	5434	5674	5626	5883	27.490	1.164.800.000
Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara	7145	7169	7906	8017	8303	38.540	1.672.500.000	7145	7169	7906	8017	8303	38.540	1.672.500.000
Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi Udara	12495	8222	8287	8317	8452	45.773	255.100.000	12495	8222	8287	8317	8452	45.773	255.100.000
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	0	8	8	8	8	32	215.500.000	0	8	8	8	8	32	215.500.000
B. BELANJA OPERATIONAL							4.413.000.000							4.413.000.000
C. PRIORITAS BIDANG							6.977.424.000							6.977.423.855
NILAI TOTAL (A+B+C) RPJMN							24.371.124.000							24.371.123.856
d. Anggaran Kebutuhan														14.190.598.277
NILAI TOTAL (A+B+C+D) RPJMN + anggaran Kebutuhan														38,561,722,137

BAB 5 PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Perhubungan 2020-2024 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada BPSDM Perhubungan sesuai amanat UU No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Berbagai tantangan akan dihadapi pengembangan SDM Perhubungan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam dokumen Renstra BPSDM Perhubungan 2020-2024 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikian perlu dicatat bahwa pencapaian target pengembangan SDM Perhubungan maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional di segala bidang, karena ketersediaan SDM Perhubungan yang prima, professional dan beretika, serta berkelas dunia akan menjadi tulang punggung pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan.

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya untuk dapat memastikan bahwa program pengembangan SDM Perhubungan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat semaksimal mungkin melibatkan peran serta publik. Kebutuhan pendanaan pengembangan SDM Perhubungan yang sedemikian besar, tidak akan terpenuhi oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif pendanaan perlu diupayakan.

5.2 ARAHAN PIMPINAN

Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Perhubungan 2020-2024 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit Kerja di Lingkungan BPSDM Perhubungan untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Diharapkan setiap Unit Kerja dapat menyusun Rencana Strategis masing-masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Untuk implementasi Renstra BPSDM Perhubungan 2020-2024 ini dalam program dan kegiatan tahunan, setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Selanjutnya, kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 MEKANISME EVALUASI DAN PERUBAHAN

Dokumen Renstra BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 ini setidaknya-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP BPSDM Perhubungan merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
1	Setkretariat BPSDMP																										
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	layanan	10	10	10	10	10	50	55.91	61.09	65.37	69.94	74.99	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.29	0.35	0.36	0.38	1.63	328.94
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	1	1	1	1	1	5	0.50	0.54	0.57	0.61	0.66	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	1	1	1	1	5	2.10	2.25	2.40	2.57	2.74	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.07
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.06	24.55	25.04	25.54	26.05	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.13	125.38
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	4	4	4	4	4	20	1.09	1.17	1.25	1.33	1.43	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	1.03	4.80	5.13	5.49	5.88	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.34
2	PPSDMAP																										
	Layanan Perencanaan	laporan	1	1	1	1	1	5	0.82	0.84	0.84	0.87	0.89	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	2	2	2	2	2	10	1.84	1.88	1.92	1.95	1.99	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	138	144	146	155	159	742	30.33	31.69	33.11	34.60	36.24	165.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.97
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	409	310	311	321	327	1678	25.36	25.68	25.95	26.37	26.89	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	130.43
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.98	29.11	29.69	30.28	30.89	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	1.52	1.53	1.55	1.56	7.07	152.02
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	3	3	3	3	3	15	1.15	1.16	1.17	1.17	1.18	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan	orang	4876	5363	5438	5653	5683	27013	62.16	69.61	76.56	89.27	98.19	395.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	398.50
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	4.95	5.00	5.00	5.05	5.05	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.03
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	1.72	1.12	1.01	1.02	1.02	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	1.48	1.52	1.57	1.61	1.66	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.83
3	BP3KSMPT																										

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	63	41	41	41	41	227	6.60	7.92	9.50	11.40	13.68	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	laporan	2	2	2	2	2	10	0.08	0.09	0.11	0.15	0.18	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2548.512	1757	3162	6185.833	11977.83	25631	23.19	19.82	22.91	40.91	86.58	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	10.82	14.32	14.61	14.90	15.20	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.90	0.91	0.92	3.62	73.46
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan	orang	7800	7960	8620	8880	8920	42180	13.99	15.39	18.89	20.58	22.44	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	6.90	7.44	8.35	8.60	38.07	129.35
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.31	0.37	0.44	0.53	0.64	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
	Pengelolaan Sistem Informasi Penunjang Diklat	laporan	14	16	16	16	16	78	0.31	0.47	0.56	0.84	1.26	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
4	PPSDMP Darat																										
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	5	18	18	8	10	59	0.77	6.15	6.88	5.74	7.29	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	5	7	7	7	7	33	5.96	6.35	6.50	6.65	6.80	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.26
	Layanan Perencanaan	laporan	2	2	2	2	2	10	0.82	1.28	1.87	1.55	1.71	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	3	2	2	2	10	0.22	0.40	0.22	0.24	0.27	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3	6	6	372	353.13	740	4.47	28.11	5.31	151.98	209.96	399.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.82
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	155	207	208	207	207	984	11.60	22.78	26.86	28.12	30.49	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.85
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	12.50	12.45	12.70	12.95	13.21	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80
5	PTDI-STTD																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2173	2173	2173	2173	2173	10865	48.97	53.87	59.25	65.18	71.69	298.96	39.62	43.59	47.94	52.74	58.01	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.86
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	960	960	960	960	960	4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	9.28	10.10	11.01	12.01	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.89
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	4826	4826	4826	4826	4826	24130	22.02	24.22	26.64	29.30	32.23	134.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.41

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	48	48	48	48	48	240	0.78	0.85	0.94	1.03	0.78	4.38	0.27	0.29	0.32	0.35	0.27	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	7.55	10.33	11.04	11.85	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.76
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	22	22	22	22	22	110	0.88	0.97	1.06	1.17	1.29	5.36	1.86	2.04	2.25	2.47	2.72	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.13	0.14	0.16	0.17	0.19	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.19	0.21	0.23	0.25	0.28	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	26	26	26	26	26	130	0.29	0.32	0.35	0.38	0.42	1.75	2.89	3.18	3.49	3.84	4.23	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.37
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2317	24387	5373	8950	5281	46308	26.52	184.60	28.32	30.65	23.47	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.56	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	45	45	45	45	45	225	5.79	6.21	6.83	651.87	8.26	678.96	0.59	0.80	0.88	0.97	1.07	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.28
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	44.00	43.74	44.62	45.51	46.42	224.28	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.76
6	BP2TD Mempawah																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	239	336	240	360	456	1631	4.35	12.64	9.03	13.54	17.16	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	61.13
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	750	1853	1753	1773	1713	7842	29.40	29.86	30.86	32.57	35.22	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.91
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2736	10850	10950	11300	11650	47486	11.90	49.15	52.06	56.41	61.05	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.57
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	8.57	10.30	11.27	11.75	12.46	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2	11	7	5	0	25	4.92	15.56	11.06	6.51	1.82	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.88
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	3	3	3	3	19	1.65	0.71	0.71	0.71	0.71	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.36	0.54	0.54	0.54	0.54	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	13	4	4	7	28	0.00	21.13	6.55	11.08	62.23	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.99
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	27	27	27	27	27	135	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.15	12.03	12.27	12.52	12.77	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.74
7	BP2TD Minahasa Selatan																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	540	540	540	540	540	2700	16.39	18.27	19.20	20.14	22.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	11.65	107.65
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1355	1523	1673	1848	2098	8497	25.14	27.56	28.55	29.76	32.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	2.74	3.27	3.80	4.62	16.52	159.60
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	8352	7852	7852	8097	8097	40250	15.67	17.67	21.21	26.24	28.87	109.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.66
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	70	85	94	115	130	494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	1.15	1.25	1.42	1.35	6.13	6.13
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.20	15.72	10.90	1.24	7.76	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.83
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.20	0.23	36.94	18.77	1.83	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.98
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	4	4	4	4	20	0.83	0.92	0.96	1.00	1.08	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15	0.43	0.48	0.50	0.52	0.56	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	3	3	3	3	3	15	0.38	0.41	0.43	0.45	0.49	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	71	21501.35	10823.06	10928.7	1729.75	45054	0.89	257.06	98.15	99.81	23.22	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.13
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	20	20	20	20	20	100	18.81	20.69	21.63	22.57	24.45	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.74	13.30	13.57	13.84	14.11	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.37	66.93
8	PKTJ																										

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1054	1103	1135	1105	1110	5507	19.80	23.24	29.40	31.91	36.64	140.99	14.07	17.31	17.83	17.51	17.56	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.27
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1160	750	750	750	750	4160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	21.15	21.24	23.04	25.22	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.08
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2580	2275	2275	2275	2275	11680	7.74	7.47	8.22	9.04	9.95	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.42	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	6.51	7.46	5.05	5.41	8.18	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	6	11	14	23	8	62	8.40	8.52	49.01	15.83	5.99	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.75	
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	25	30	30	30	30	145	1.63	2.38	2.62	2.88	3.17	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.68	
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	7	7	7	7	35	1.14	1.25	1.38	1.51	1.66	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.51	0.56	0.61	0.67	0.74	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.30	0.33	0.37	0.40	0.44	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	3	3	3	3	17	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	2	4	4	5	3	18	12.48	19.50	20.68	13.14	34.74	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.54	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	41	41	41	41	205	6.78	7.45	8.20	9.02	9.92	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.37	
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	26.72	25.08	25.58	26.09	26.62	130.09	0.51	0.71	0.71	0.72	0.73	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.47
9	Poltrada Bali																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	432	144	216	216	216	1224	8.56	9.03	15.12	17.85	17.85	68.41	5.67	3.77	5.22	9.23	11.08	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.38
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	564	2078	2370	2308	1832	9152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	19.67	24.03	25.10	21.64	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.03
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1868	2280	2280	2280	2520	11228	15.12	12.54	13.79	15.17	16.69	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.32	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	16.20	10.75	12.25	12.35	13.01	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.56	

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	114.25	10.35	23.90	117.91	266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.41
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	13	13	13	13	13	65	0.62	0.68	0.75	0.82	0.90	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	4	4	4	4	4	20	0.57	0.99	1.05	1.14	1.21	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	1.08	1.19	1.31	1.44	1.58	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	4	2	2	2	2	12	1.10	1.22	1.34	1.47	1.62	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.54	0.59	0.65	0.71	0.79	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	2373	12985 1.2	21737. 92	6946.6 66	0	160909	23.83	311.69	96.28	46.32	0.00	478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.12
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	41	41	41	41	205	19.27	26.28	29.12	31.84	35.02	141.54	1.97	2.09	1.89	2.10	2.14	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.73
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.19	21.31	21.73	22.17	22.61	104.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.40
10	Poltrans SDP																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	713	716	788	792	888	3897	11.19	5.65	8.79	9.20	11.02	45.85	9.99	15.26	14.52	14.52	15.77	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.92
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	270	606	1512	1788	2124	6300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.5 2	10.34	12.23	12.93	13.55	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.58
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	300	300	300	480	600	1980	1.89	1.50	1.50	2.40	3.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.29	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	18.30	8.27	11.42	11.84	13.84	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.67
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	19	4	34	14	0	71	0.00	66.61	0.00	0.00	3.65	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.25
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	6	6	6	6	6	30	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30	2.40	1.07	1.07	1.07	1.07	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	3	3	3	3	18	1.17	0.33	0.33	0.33	0.33	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	3	3	3	3	3	15	0.22	0.19	0.19	0.19	0.19	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	7	7	7	7	33	0.34	0.48	0.48	0.48	0.48	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1445	7032	3172	5022	21383	38054	26.02	156.08	46.53	56.14	65.87	350.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.65
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	56	35	34	34	35	194	10.38	8.05	7.86	9.12	9.26	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.67
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	33.07	29.78	30.38	30.99	31.61	155.82	0.12	0.18	0.18	0.18	0.18	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.67
11	PPI Madiun																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	817	817	817	817	817	4085	20.18	20.16	20.16	20.16	20.16	100.82	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.23
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	948	1499	2048	2094	2195	8784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.2 8	34.38	39.78	38.77	41.41	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.61
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	7200	7200	7200	7200	7200	36000	51.08	51.08	51.08	51.08	51.04	255.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.38
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	9.73	33.33	28.96	37.70	33.86	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.56
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2372	17319	3396	5636	1761	30484	26.64	358.28	311.24	386.77	317.49	1400.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1400.43
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	33	38	34	34	34	173	4.70	5.08	5.00	5.00	5.00	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	48	50	50	50	50	248	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.74
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	20	5	11	5	11	52	4.18	3.01	4.21	3.01	4.21	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.62
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	5	5	5	5	5	25	0.75	0.78	0.78	0.78	0.78	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3	4	4	4	4	19	3.16	3.30	3.30	3.30	3.30	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	75	70	73	69	71	358	20.13	15.38	15.71	14.38	14.78	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.39
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.90	26.57	27.10	27.65	28.20	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.42
12	PPSDMP Laut																										
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	10	16	16	16	16	74	1.80	4.69	5.10	5.54	6.04	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.16

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	16	25	25	25	25	116	6.87	8.50	9.04	9.63	10.29	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.33
	Layanan Perencanaan	laporan	5	12	11	10	10	48	2.44	8.64	6.60	6.84	7.43	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.96
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	6	5	5	5	5	26	1.59	1.42	1.56	1.71	1.88	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.16
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	4	2	5	4	3	18	5.25	4.46	6.98	4.72	8.16	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.57
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	1904	2113	2341	1891	1881	10130	19.22	23.79	26.36	28.81	34.85	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.96	2.15	1.68	1.62	9.26	142.28
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	11.31	11.27	11.50	11.73	11.96	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.16	57.93
13	STIP Jakarta																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2088	2382	2628	2748	2940	12786	13.24	17.39	13.97	12.54	11.67	68.81	22.96	43.80	45.13	51.70	57.26	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.65
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	56420	53677	51770	48580	51898	262345	40.86	44.91	44.91	44.91	44.91	220.51	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.10
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	13700	12800	12800	13100	13100	65500	22.08	24.76	29.71	36.49	43.78	156.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.82
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1425	2540	2350	2400	2400	11115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.66	18.30	15.24	15.90	15.90	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	5.11	5.11	20.55	5.11	35.88	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.66
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	319	16	5	3	1504	1847	41.72	16.91	31.64	15.64	21.62	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.53
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	40	40	40	40	40	200	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	95	141	47	45	46	374	13.50	13.67	7.57	13.18	13.88	61.82	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.97

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	1424	1430	1430	1430	1430	7144	8.80	9.75	9.75	9.75	9.75	47.80	0.56	0.56	0.57	0.56	0.56	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.61
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	66.02	64.84	66.14	67.46	68.81	333.28	43.07	43.65	44.09	44.53	44.97	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.58
14	Poltekpel Banten																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2240	2601	2612	2830	2967	13250	57.95	57.95	57.95	57.95	57.95	289.74	35.59	35.59	35.59	35.59	35.59	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467.67
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3078	3078	3510	3894	3894	17454	15.15	15.29	15.29	15.29	15.29	76.29	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.16
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	9750	7731	8800	8800	8800	43881	30.26	33.29	33.05	36.36	39.99	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.95	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	2268	2268	2268	2268	2316	11388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.41	9.41	9.41	9.41	9.41	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	0.72	0.72	16.52	16.78	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	0	0	0	1	2	0.72	0.00	0.00	0.00	1.82	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	9	9	9	9	9	45	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	17	9	6	6	8	46	145.82	104.53	67.03	16.69	39.17	373.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.24	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	49	49	49	49	49	245	6.72	6.72	6.72	6.72	6.72	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	26.05	32.97	33.63	34.30	34.99	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.95	
15	Poltekpel Barombong																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2005	2071	2160	2232	2160	10628	15.00	13.20	11.39	11.28	11.16	62.02	30.84	30.35	31.46	32.97	32.22	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.86

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	14175	12750	12750	12750	12779	65204	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	30.38	32.03	11.83	11.85	11.85	11.91	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.84
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3780	3780	3780	3780	3780	18900	12.25	14.70	17.63	21.68	23.84	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.09
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	11350	16826	18874	18922	19018	84990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.91	19.44	19.59	20.20	21.11	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.25
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	4.49	12.89	8.57	9.71	6.68	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	1	1	1	0	3	0.00	2.00	0.88	3.00	1.82	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	3	10	12	12	12	49	0.18	0.30	0.35	0.35	0.35	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	3	3	3	3	14	0.20	0.25	0.26	0.26	0.27	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	12	12	12	12	52	0.17	0.30	0.31	0.32	0.33	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	1	3	2	2	2	10	3.18	23.67	27.80	15.13	32.42	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.21
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	12	13	12	12	12	61	9.57	10.03	9.69	9.76	9.83	48.87	1.40	0.82	0.84	0.86	0.87	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.66
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	18.40	19.66	20.05	20.45	20.86	99.42	12.16	30.31	30.61	30.92	31.23	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.65
16	Poltekpel Malahayati																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1085	1085	1085	1085	1085	5425	21.36	11.62	11.62	11.62	11.62	67.83	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.22
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5304	5304	5304	5304	5304	26520	18.50	18.50	18.50	18.50	18.50	92.48	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.87
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	8900	8400	8400	8645	8645	42990	13.98	15.84	19.00	23.47	25.82	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.11	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	504	504	504	504	504	2520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat	lokasi	1	1	1	1	1	5	5.42	6.47	6.47	6.47	14.92	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.75

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Transportasi (Prioritas Nasional)																										
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	2	2	2	2	2	10	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	2	2	2	2	10	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	7	7	7	7	7	35	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	0	3	0	1	0	4	0.00	6.82	0.00	1.64	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	43	43	43	43	43	215	8.98	9.24	9.54	9.84	10.18	47.78	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.17
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	21.63	18.11	18.48	18.85	19.22	96.30	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.68
17	Poltekpel Sorong																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	840	864	888	912	936	4440	34.67	35.66	35.13	37.57	38.91	181.94	7.95	10.37	12.97	16.00	18.82	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.06
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	864	888	912	936	960	4560	42.21	44.39	46.69	49.10	51.63	234.01	2.28	2.31	2.33	2.36	2.39	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.68
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5310	3600	3600	2160	2160	16830	11.27	9.16	10.33	6.91	7.55	45.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.23
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	720	744	768	792	816	3840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	5.33	5.69	6.00	6.56	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	22.97	10.77	0.40	0.60	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	439	413	200	200	1252	0.00	92.62	4.10	0.20	2.02	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.94
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	1	1	1	1	1	5	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	5	5	5	5	25	0.39	0.43	0.48	0.52	0.58	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	2	2	2	2	2	10	2.65	2.91	3.20	3.52	3.87	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.34	0.37	0.41	0.45	0.49	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.40	0.45	0.49	0.54	0.59	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	6832	1470	1275	24	9601	0.00	148.66	12.18	11.68	0.58	173.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.10
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	19	19	19	19	19	95	17.63	19.36	21.26	23.34	25.64	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	20.03	20.81	21.23	21.65	22.08	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.81
18	Poltekpel Sumatera Barat																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	720	1140	1420	1740	1980	7000	23.26	40.65	50.35	59.10	66.86	240.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	3.08	3.77	4.18	4.33	17.51	257.73
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	3044	6355	7574	9214	10153	36340	17.23	18.91	20.66	24.18	25.46	106.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	5.25	6.48	7.39	8.92	30.16	136.59
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	6580	2900	3770	3630	3650	20530	31.08	23.08	28.98	27.31	25.97	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.43
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	400	640	800	1000	1120	3960	5.30	5.56	6.26	7.74	8.81	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	1.66	2.21	2.21	7.55	41.23
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	4.73	9.66	16.42	3.92	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	1	1	0	1	3	0.00	33.14	4.71	0.00	12.98	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.83
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	7	18	20	20	22	87	0.40	1.06	1.08	1.08	1.09	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	4	7	7	8	8	34	0.41	0.64	0.59	0.64	0.65	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	1	1	1	1	8	0.38	0.10	0.11	0.11	0.12	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.23	0.25	0.25	0.27	0.28	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	2	2	2	2	10	0.09	0.21	0.26	0.28	0.30	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	16559.5	28920	7	8571	54058	0.00	115.52	141.77	5.02	15.85	278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.16
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	10	17	17	17	17	78	7.63	9.14	9.53	9.97	10.44	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	21.75	21.89	22.33	22.77	23.23	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.96

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
19	Poltekpel Surabaya																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1671	1679	1680	1728	1944	8702	36.46	46.38	50.03	49.29	53.57	235.73	38.68	44.76	44.12	45.76	48.12	221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457.16
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	17312	17840	18368	18896	19429	91845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.08	11.76	12.12	12.49	12.85	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.30
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	11300	10500	9555	9905	9905	51165	24.30	27.10	29.59	33.74	37.12	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.86	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	6440	6824	6780	6780	6876	33700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.78	18.45	20.76	20.76	20.03	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.77
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	23.36	4.60	6.67	0.10	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	5	0	0	1	6	0.00	36.50	0.00	0.00	3.65	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.15	
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	22	22	22	22	22	110	0.60	0.76	0.76	0.76	0.76	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	6	30	0.48	0.66	0.66	0.66	0.66	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.22	0.57	0.57	0.57	0.57	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	6	6	6	6	6	30	0.26	2.47	2.47	2.47	2.47	10.14	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	0	33	32	31	31	127	0.00	120.40	6.72	1.45	1.45	130.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.03	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	43	43	43	43	43	215	3.58	7.04	7.07	7.07	7.07	31.84	2.58	0.03	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.45	
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	32.71	32.91	33.57	34.24	34.93	168.36	33.78	33.80	34.14	34.48	34.83	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.41
20	BP2TL Jakarta																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	6180	7050	7620	7830	8100	36780	38.38	49.14	55.44	61.82	74.85	279.64	14.85	11.10	12.79	14.84	16.88	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.11
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1400	1400	1400	1400	1400	7000	10.37	13.05	15.54	18.53	20.32	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80	

No	Nomenkatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1620	1860	1980	2220	2280	9960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.07	24.78	26.97	29.73	32.84	131.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.38
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	8.68	8.68	8.68	8.68	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	1	1	1	1	1	5	34.60	48.22	30.08	43.00	63.06	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.96
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	0	2	2	2	2	8	0.00	0.74	0.79	0.84	0.90	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	0	6	6	6	8	26	0.00	0.28	0.34	0.41	0.65	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	4	4	6	6	6	26	0.73	0.81	0.89	0.98	1.08	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.19	0.21	0.23	0.26	0.28	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	34	34	34	34	34	170	4.89	5.38	5.91	6.50	7.15	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.83
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	19.48	16.23	16.56	16.89	17.23	86.39	0.08	10.77	10.88	10.99	11.10	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.19
21	BP3IP Jakarta																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	25660	25984	26310	26643	26990	131587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21	18.46	18.72	18.99	19.26	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.65
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	11822	12098	12376	12662	12956	61914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.05	36.91	37.77	38.66	39.57	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.95
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	0.00	0.00	17.27	16.06	33.33	0.20	0.24	0.28	0.34	0.41	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	4	2	2	2	2	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.74	0.79	0.84	0.90	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	6	6	6	6	8	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.28	0.34	0.41	0.65	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.51	0.86	0.86	0.94	0.94	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.16	0.14	0.14	0.14	0.14	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	8	8	8	10	12	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.69	0.84	0.92	1.17	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	4	2265	2341	2211	2267	9088	0.00	28.54	57.11	19.01	25.90	130.55	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.35

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	14	94	94	94	67	363	5.42	8.28	9.51	11.52	14.28	49.00	5.79	5.28	5.27	4.32	3.03	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.69
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	17.75	17.20	17.54	17.89	18.25	88.63	25.58	33.88	34.21	34.56	34.90	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.77
22	PIP Makassar																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2830	2602	2399	2138	2230	12199	21.72	16.00	14.51	10.80	12.17	75.21	5.85	8.95	7.82	6.41	8.01	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.24
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	14940	16480	16810	17065	17330	82625	38.37	49.88	52.97	55.91	59.83	256.97	47.21	61.37	65.67	69.61	73.09	316.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.92
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	7800	8715	10060	10160	10510	47245	28.48	31.83	36.74	37.10	38.38	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.53	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	1220	1950	3610	3785	3565	14130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65	10.40	11.18	13.16	13.25	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.64
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	0.00	29.73	1.43	2.90	0.68	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.74	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	0	2	1	4	7	0.00	16.21	5.81	4.22	32.76	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.99	
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	19	20	20	21	21	101	1.86	2.19	2.20	2.32	2.33	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.89	
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	10	11	11	12	12	56	0.69	1.11	1.12	1.23	1.24	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	9	9	7	8	8	41	1.51	1.85	1.51	1.83	1.86	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.23	0.25	0.27	0.30	0.33	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.16	0.17	0.19	0.21	0.23	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	55094.6	34284	20459	11003	120841	0.00	308.79	263.69	191.55	725.99	1490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.02	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	8	43	43	43	43	180	9.17	10.16	11.23	12.41	13.71	56.69	1.04	1.09	1.15	1.21	1.27	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.45
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	32.66	32.17	32.81	33.47	34.14	165.25	15.31	36.03	36.39	36.75	37.12	161.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.86
23	PIP Semarang																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2019	2019	2004	2028	2040	10110	32.18	29.76	30.26	31.05	31.65	154.90	46.01	51.95	53.02	52.04	57.54	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.45

No	Nomenktatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	20305	20594	20627	20610	20635	102771	0.87	0.89	0.90	0.92	0.94	4.52	11.87	12.10	12.35	12.59	12.85	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.28
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	5520	3895	3895	3895	3895	21100	22.32	22.62	17.83	18.32	18.63	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.72
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	6956	6956	6956	6956	6956	34780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19	11.42	11.65	11.88	12.12	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.25
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	0.38	0.80	1.70	30.34	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.22
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	7	3	3	2	15	0.00	75.68	25.80	1.70	23.82	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	13	13	13	13	13	65	1.27	1.29	1.32	1.35	1.37	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	7	7	7	7	7	35	1.08	1.10	1.12	1.14	1.16	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	6	6	6	6	30	2.14	2.18	2.22	2.27	2.31	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	1.56	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	16	16	16	16	16	80	0.61	0.63	0.64	0.65	0.66	3.19	12.46	12.70	12.96	13.22	13.48	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	40	19	18	17	95	0.00	391.00	296.34	134.88	221.91	1044.13	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1046.13
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	67	69	70	70	70	346	8.31	8.72	9.05	9.83	10.01	45.91	7.67	7.82	7.98	8.14	8.30	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.81
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	39.99	38.03	38.79	39.56	40.36	196.72	20.75	38.38	38.77	39.16	39.55	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.33
24	PPSDMP Udara																										
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	25	9	25	25	25	109	0.99	5.91	8.47	9.32	10.25	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	18	62	24	24	24	152	9.85	24.38	16.65	17.85	19.20	87.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.93
	Layanan Perencanaan	laporan	7	6	7	7	7	34	1.03	2.41	4.47	4.92	5.41	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.24
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	3	4	4	4	19	1.05	2.06	1.94	2.14	2.35	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54
	Dukungan Teknis dan Administratif Penyelenggaraan Diklat SDM Transportasi	laporan	7	8	8	8	8	39	0.95	3.05	5.40	5.94	6.54	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	275	2428	277	275	276	3531	0.20	39.08	2.05	2.20	2.89	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.12	46.53
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	145	569	575	575	574	2438	8.82	43.17	46.89	45.51	49.82	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.20
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	14.90	14.83	15.13	15.43	15.74	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.02
25	PPI Curug																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1809	2116	1943	1944	2088	9900	26.79	38.85	35.75	26.31	31.15	158.85	48.88	46.61	39.42	46.19	48.94	230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.89
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2723	2590	2988	3091	3169	14561	128.34	83.82	82.45	90.69	85.98	471.27	31.94	34.81	42.12	43.07	44.15	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.36
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	4224	3944	4004	4004	4024	20200	20.33	18.12	19.15	18.09	18.08	93.76	0.00	2.55	2.29	3.13	3.34	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.08
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	3.97	6.86	7.50	6.01	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.34
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	25	716	1245	169	28	2183	1.01	26.77	88.41	98.48	132.87	347.55	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.99
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	44	30	35	40	45	194	3.62	2.39	2.81	2.95	4.10	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	8	9	10	10	42	0.85	0.49	0.51	0.53	0.56	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	12	9	10	10	11	52	3.26	1.37	1.37	1.37	1.37	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.74
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	6	6	6	6	6	30	0.29	0.30	0.33	0.34	0.36	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	20	23	26	26	30	125	1.65	2.02	2.04	2.14	2.25	10.09	0.20	0.22	0.26	0.26	0.26	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	6	24	20240	15594	4597	40461	7.84	45.65	24.36	52.15	31.25	161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.24
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	45	44	42	43	45	219	8.27	7.92	8.93	9.56	10.30	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.96
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	48.22	46.18	47.11	48.05	49.01	238.57	31.11	31.29	31.60	31.92	32.23	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.71
26	Poltekbang Jayapura																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	192	240	288	312	288	1320	1.83	3.12	3.67	3.67	3.67	15.95	3.51	5.61	6.16	6.86	6.16	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	0	0	24	96	168	288	0.00	0.00	0.68	2.01	3.34	6.02	0.00	0.00	2.23	5.58	3.85	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	178	178	178	178	178	890	9.02	11.78	19.25	19.52	20.42	79.99	1.39	1.39	1.39	1.41	1.41	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.97
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	860	940	1000	1020	1040	4860	5.47	4.23	4.75	5.10	5.46	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.01
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	3.02	3.77	7.30	4.71	2.60	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	200	203	295	206	205	1109	0.47	12.16	50.86	65.41	36.29	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.20
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	4	4	4	4	4	20	0.46	0.49	0.55	0.55	0.55	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	2	3	4	4	5	18	0.13	0.25	0.36	0.36	0.47	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	8	8	9	9	40	0.58	0.92	0.92	1.14	1.14	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.39	0.40	0.56	0.67	0.80	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	3462	11402	4235	8026	16030	43155	11.35	107.00	43.06	40.81	47.50	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.72
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	10	155	153	180	180	678	7.13	8.10	9.50	9.93	10.01	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.68
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.81	18.16	18.52	18.89	19.28	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.65
27	BP3 Curug																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1840	1618	1716	1702	1800	8676	7.69	10.42	8.76	9.75	10.59	47.21	9.48	13.56	10.71	10.67	10.80	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.43
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1045	735	765	800	940	4285	6.36	3.99	4.18	4.33	5.17	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.04
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	4.00	5.50	5.29	5.03	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	0	0	0	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	0	1	1	1	1	4	0.00	0.04	0.04	0.05	0.05	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

No	Nomenkatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	2	3	3	3	14	0.82	0.82	0.85	0.87	0.88	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.24
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	1	22	13	6	10	52	0.25	49.04	59.91	31.72	53.02	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.95
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	65	75	75	75	75	365	10.88	11.46	12.15	12.64	13.06	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.19
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	16.63	16.52	16.85	17.19	17.53	84.73	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
28	API Banyuwangi																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	169	152	190	204	218	933	9.27	7.70	7.29	7.29	7.29	38.85	13.10	10.27	11.60	12.73	13.80	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.35
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	154	198		218	162	155	887	47.12	67.45	68.30	74.54	74.47	331.88	5.78	6.36	6.37	6.38	6.39	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.17
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	500	250	250	250	250	1500	2.61	2.37	2.49	2.61	2.74	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	2.50	10.32	6.26	8.20	6.00	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.28	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	2	13	15	9	9	48	6.00	186.00	105.17	245.13	36.26	578.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.55	
	Penelitian Bidang Transportasi	laporan	3	3	5	5	6	22	0.25	0.44	0.78	0.78	0.93	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	3	4	5	5	6	23	0.20	0.22	0.24	0.25	0.26	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	6	14	15	19	22	76	1.03	1.05	1.14	1.20	1.26	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	2	2	2	2	9	0.10	0.15	0.16	0.17	0.18	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	2	6	8	10	12	38	0.46	1.09	1.15	1.20	1.26	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	2422	6680	6553	2235	7420	25310	20.48	74.29	63.45	20.16	23.86	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.24	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	41	264	345	399	458	1507	4.81	8.89	8.47	9.21	9.95	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34	
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	12.60	12.49	12.73	12.99	13.25	64.06	8.63	11.35	11.47	11.58	11.70	54.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.80
29	Poltekbang Makassar																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	696	816	1008	890	953	4363	38.46	37.64	46.64	43.55	51.52	217.81	22.52	13.79	17.80	25.51	26.91	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.34

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Nasional)																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	24	48	72	72	72	288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32	0.00	0.84	2.17	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	460	597	719	658	700	3134	6.15	11.82	11.10	11.11	12.00	52.18	4.52	7.12	9.43	8.15	8.75	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.14
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1360	900	900	900	900	4960	4.69	2.31	2.54	2.79	3.07	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.38	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi	orang	0	0	24	72	0	96	0.00	0.00	0.85	2.55	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	5.39	8.45	8.54	3.60	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.98	
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	31883	75829	123080	37843	5404.96	274040	142.40	287.16	428.34	651.89	214.48	1724.28	0.41	0.45	0.50	0.55	0.60	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1726.80
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	15	16	13	13	13	70	0.57	1.57	1.89	2.26	2.72	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01	
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	5	5	5	5	5	25	0.26	0.50	0.59	0.68	0.80	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	15	3	3	3	3	27	0.44	1.12	1.31	1.53	1.79	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18	
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.20	0.21	0.25	0.29	0.34	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	4	4	4	4	4	20	0.35	1.07	1.28	1.54	1.85	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	7970	18943	30461	9419	1349.24	68142	47.47	71.02	119.47	158.80	34.77	431.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.53	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	36	39	39	39	39	192	5.18	14.95	16.45	18.09	19.90	74.57	0.40	0.66	0.71	0.76	0.81	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.90
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.50	19.23	19.62	20.01	20.41	103.77	0.41	12.84	12.97	13.10	13.23	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.31
30	Poltekbang Medan																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	589	576	552	504	576	2797	7.34	8.69	9.00	8.57	8.73	42.34	17.19	11.42	10.02	8.72	10.26	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	635	626	712	764	828	3565	71.00	6.61	7.60	8.69	8.58	102.48	9.20	7.17	8.26	9.40	11.77	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.28
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	2340	492	492	492	492	4308	7.64	1.61	1.61	1.61	1.61	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Nasional)																										
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	5.79	4.75	8.40	6.26	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	27	14	20	1	62	0.00	33.95	9.52	49.40	4.82	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	19	20	20	21	22	102	0.79	0.95	1.04	1.25	1.38	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	10	10	12	12	14	58	1.02	1.12	1.24	1.36	1.50	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.46	0.51	0.56	0.62	0.68	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	2	2	2	2	2	10	0.18	0.19	0.21	0.24	0.26	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	10	10	10	15	15	60	0.62	0.69	0.76	0.83	0.91	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	0	10592	5597	1686	4597	22472	0.00	100.52	59.74	33.71	72.15	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.12
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	16	10	10	10	10	56	12.60	13.86	15.25	16.78	18.45	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.95
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	25.06	18.78	19.16	19.54	19.93	102.48	0.00	7.81	7.89	7.97	8.05	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.19
31	Poltekbang Palembang																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	100	160	220	280	260	1020	1.65	4.03	5.68	6.65	6.67	24.67	1.28	1.90	2.51	3.12	2.66	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi	orang	0	48	0	0	0	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	478	639	658	639	658	3072	7.37	8.34	7.36	7.69	9.31	40.08	7.90	10.48	8.88	9.01	8.58	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.93
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1460	400	400	400	400	3060	8.48	1.93	1.93	1.93	1.93	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	1	1	1	1	1	5	4.50	3.92	8.50	8.07	5.34	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	664	3269	3	2352	1352	7640	4.50	63.86	12.15	9.47	7.17	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.15

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	1	1	1	1	1	5	1.09	1.20	1.32	1.45	1.60	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.22	0.24	0.27	0.30	0.33	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	3	3	3	3	3	15	0.52	0.57	0.63	0.69	0.76	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Lokasi	4	1006	7509	702	7506	16727	3.02	40.49	21.26	5.34	6.53	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.64
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	37	36	37	37	37	184	5.42	10.08	8.05	8.85	9.74	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.13
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	17.41	18.04	18.41	18.77	19.15	91.79	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.32
32	Poltekbang Surabaya																										
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	1318	1374	1473	1492	1500	7157	16.55	14.71	15.69	14.80	16.21	77.95	17.44	18.78	19.63	18.25	18.82	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.87
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Teknis SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	677	723	730	823	815	3768	16.96	16.75	16.46	17.50	16.90	84.56	6.42	9.17	9.06	10.41	9.60	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.22
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan DPM SDM Transportasi (Prioritas Nasional)	orang	730	705	680	655	630	3400	11.69	11.46	11.23	11.00	10.78	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.16
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi (Prioritas Nasional)	lokasi	0	1	1	1	1	4	0.00	10.69	9.12	7.50	7.84	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.15
	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi	lokasi	0	450	200	0	200	850	0.00	72.13	77.68	13.50	11.91	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.21
	Penelitian Bidang Transportasi	jurnal	23	29	35	41	47	175	1.53	1.79	1.83	1.86	1.90	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
	Pengabdian Masyarakat Diklat SDM Transportasi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.35	0.50	0.51	0.52	0.53	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
	Pengembangan Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi	laporan	1	1	1	1	1	5	0.57	0.57	0.59	0.60	0.61	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
	Evaluasi Pasca Diklat	laporan	1	1	1	1	1	5	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	laporan	1	1	1	1	1	5	0.20	0.30	0.30	0.31	0.32	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
	Pemenuhan Tenaga Pendidik	orang	0	0	0	12	12	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.65	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

No	Nomenklatur Keluaran/Output	Satuan	Target Volume						Sumber Pendanaan (Rp. Dalam Milyar)																		Total Pendanaan 2020-2024
									Rupiah Murni						Badan Layanan Umum						PNBP						
			2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	unit	170	820	63404	32312	38725	135431	1.71	10.34	259.84	183.21	202.72	657.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.81
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	laporan	60	63	65	65	65	318	5.18	5.59	6.38	6.81	6.89	30.85	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	24.45	26.44	26.97	27.51	28.06	133.43	9.28	10.73	10.84	10.95	11.06	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.29

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
1. Pembentukan Balai Diklat Aparatur	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme • PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM Transportasi • PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi • Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019 Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	• Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penelitian dan Pengembangan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana SDM Transportasi Nasional; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembinaan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi Nasional;
2. Peningkatan Status Lembaga Pendidikan Vokasi yang terakreditasi BAN-PT	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • UU No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan • UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	• Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kapal Latih; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Instruktur Penerbangan;

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
	• UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian • UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran • PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • PP No. 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda • PP No. PP 51 Tahun 2012 mengenai SDM Bidang Transportasi • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta • Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi • Peraturan Menteri Ristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	• Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penelitian dan Pengembangan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana SDM Transportasi Nasional; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlindungan Kerja Terhadap Kesehatan Kerja SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pembinaan SDM di Bidang Transportasi; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Informasi Manajemen SDM Transportasi Nasional; • Rencana Peraturan Menteri Perhubungan tentang Dosen di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Penyesuaian Eselonisasi UPT Diklat	• UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara • InPres Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan • PP Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan	•

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
	• PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian • Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan • Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi • Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	
4. Pengembangan kerjasama antara UPT dengan organisasi profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	• UU No. 18 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi • PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang • PP No. 51 Tahun 2012 mengenai SDM Bidang Transportasi	•
5. Pengembangan kerjasama antara UPT dengan Lembaga	• UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri • UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional • UU No. 18 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	•

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
Internasional	• UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • PP No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang • PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing • PP No. 51 Tahun 2012 mengenai SDM Bidang Transportasi • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi	
6. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan (BLU) di Lingkungan BPSDM Perhubungan	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum • PP No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur • PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara • PP No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur • KP No. 145 Tahun 2018 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Lingkungan Kementerian Perhubungan • Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Bahan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	•

ARAH KEBIJAKAN / RENCANA KEGIATAN	REGULASI EKSISTING	KEBUTUHAN PENGUATAN
	• Permen Perhubungan No. PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Diklat • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum	

KERANGKA PENDANAAN RENSTRA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2020- 2024
SESUAI DENGAN RSPF KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO) DAN RINCIAN OUTPUT (RO)

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)																			
													RUPIAH MURNI										BLU					PNBP				
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	SEKRETARIAT BPSDM PERHUBUNGAN		496.10	0.00	0.00	1.76	497.86					84.69	94.39	99.77	105.50	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.31	0.37	0.39	0.41		
AKM	Peraturan Menteri	Permen	0.00	0.00	0.00	0.00																										
001	Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Bidang SDM Transportasi	Permen	0.00	0.00	0.00	0.00																										
AKM	Peraturan Lainnya	Peraturan	6.83	0.00	0.00	6.83	2	2	2	2	2	1.19	1.27	1.36	1.46	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Peraturan Kepala BPSDM Perhubungan	Peraturan	6.83	0.00	0.00	6.83	2	2	2	2	2	1.19	1.27	1.36	1.46	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
END	Layanan Humas	Layanan	3.38	0.00	0.00	3.38	1	1	1	1	1	0.58	0.63	0.67	0.72	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Layanan Humas dan Kepatuhan Internal	Layanan	3.38	0.00	0.00	3.38	1	1	1	1	1	0.58	0.63	0.67	0.72	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AKM	Kerjasama	Kesepakatan	22.34	0.00	0.00	22.34	2	2	2	2	2	1.03	4.80	5.13	5.49	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	Kesepakatan	22.34	0.00	0.00	22.34	2	2	2	2	2	1.03	4.80	5.13	5.49	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BMK	Data dan Informasi Publik	Layanan	6.26	0.00	0.00	6.26	4	4	4	4	4	1.09	1.17	1.25	1.33	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Sistem Data dan Informasi	Layanan	6.26	0.00	0.00	6.26	4	4	4	4	4	1.09	1.17	1.25	1.33	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
END	Layanan Kehumasan dan Protokol	Layanan	16.19	0.00	0.00	16.19	1	1	1	1	1	2.81	3.01	3.22	3.45	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Layanan humas dan protokol	Layanan	16.19	0.00	0.00	16.19	1	1	1	1	1	2.81	3.01	3.22	3.45	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EAP	Layanan SDM	Orang	46.22	0.00	0.00	46.22	1	1	1	1	1	8.04	8.61	9.21	9.85	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Kepegawaian	Orang	17.34	0.00	0.00	17.34	1	1	1	1	1	3.53	2.87	3.55	3.66	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Rintisan Gelar	Orang	28.88	0.00	0.00	28.88						4.51	5.73	5.66	6.20	6.78																
END	Layanan Umum	Layanan	77.43	0.00	1.63	79.06	3	3	3	3	3	12.49	14.63	15.65	16.76	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.29	0.35	0.36	0.38					
001	Pelayanan Sipencat	Layanan	31.09	0.00	1.63	32.72	1	1	1	1	1	4.97	5.88	6.29	6.74	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.29	0.35	0.36	0.38					
002	Pelayanan umum dan perlengkapan	Layanan	25.86	0.00	0.00	25.86	1	1	1	1	1	4.50	4.81	5.15	5.51	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Pelayanan Wisata terpadu	Layanan	20.48	0.00	0.00	20.48	1	1	1	1	1	3.02	3.93	4.21	4.50	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EAP	Layanan Sarana Internal	Layanan	12.07	0.00	0.00	12.07	1	1	1	1	1	2.10	2.25	2.40	2.57	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Sarana Internal Perkantoran	Layanan	12.07	0.00	0.00	12.07	1	1	1	1	1	2.10	2.25	2.40	2.57	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EAP	Layanan Prasarana Internal	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																										
001	Prasarana Internal Perkantoran Sekretariat BPSDMP	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																										
END	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Layanan	173.23	0.00	0.00	173.23	4	4	4	4	4	30.0946	32.2013	34.4553	36.8672	39.6078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Layanan Perencanaan, Keuangan dan Kinerja	Layanan	173.23	0.00	0.00	173.23	4	4	4	4	4	30.09	32.20	34.46	36.87	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EPA	Layanan Perkantoran	Layanan	125.25	0.00	0.13	125.38	2	2	2	2	2	24.06	24.55	25.04	25.54	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.025	0.025	0.026	0.026	0.026					
001	Gaji dan Tunjangan non Pendidikan Sekretariat BPSDM	Layanan	88.52	0.00	0.00	88.52	1	1	1	1	1	17.28	17.28	17.63	17.98	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor non Pendidikan Sekretariat BPSDM	Layanan	36.73	0.00	0.13	36.86	1	1	1	1	1	6.77	7.27	7.41	7.56	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0254	0.0254	0.0257	0.0260	0.0262					
EAP	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	6.91	0.00	0.00	6.91	1	1	1	1	1	1.20	1.29	1.38	1.47	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Layanan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	Layanan	6.91	0.00	0.00	6.91	1	1	1	1	1	1.20	1.29	1.38	1.47	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	BPKSDM PERHUBUNGAN		410.21	0.00	41.69	451.89						55.33	58.41	67.06	89.36	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78	7.79	8.34	9.26	9.51					
AKM	Kerjasama	Kesepakatan	0.25	0.00	0.00	0.25	2	2	2	2	2	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga	Kesepakatan	0.25	0.00	0.00	0.25	2	2	2	2	2	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
END	Layanan Data dan Informasi	Layanan	5.71	0.00	0.00	5.71	15	17	17	17	17	0.62	0.83	1.00	1.37	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Evaluasi Pasca Diklat	Layanan	2.29	0.00	0.00	2.29	1	1	1	1	1	0.31	0.37																			

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	18.83	0.00	0.00	18.83		49	38	44	50	55	4.47	2.88	3.32	3.49	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	154.02	230.04	0.00	384.07	1,762	2,069	1,920	1,944	2,088	24.50	36.98	35.08	26.31	31.15	48.88	46.61	39.42	46.19	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	27.06	22.80	0.00	49.86	687	262	144	72	96	12.79	5.61	4.02	2.38	2.26	13.07	5.98	1.54	0.70	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	119.93	0.00	119.93	499	514	624	816	1,008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.53	16.43	19.97	25.84	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	126.97	87.31	0.00	214.28	576	1,293	1,152	1,056	984	11.71	31.37	31.06	23.93	28.89	14.28	24.21	17.91	19.65	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Kerjasama	Kesepakatan	10.09	1.20	0.00	11.29	20	23	26	26	30	1.65	2.02	2.04	2.14	2.25	0.20	0.22	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	Kesepakatan	10.09	1.20	0.00	11.29	20	23	26	26	30	1.65	2.02	2.04	2.14	2.25	0.20	0.22	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Data dan Informasi Publik	Layanan	12.32	0.00	0.00	12.32	12	12	12	13	14	1.77	1.79	2.43	2.89	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Data Peserta dan Penyerapan Lulus Diklat Transportasi Udara	Layanan	1.29	0.00	0.00	1.29	2	2	2	2	2	0.23	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara	Layanan	1.62	0.00	0.00	1.62	6	6	6	6	6	0.29	0.30	0.33	0.34	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Layanan	9.41	0.00	0.00	9.41	4	4	4	5	5	1.24	1.24	1.85	2.28	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	8.74	0.00	0.00	8.74	12	9	10	10	11	3.26	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	NSPK	8.74	0.00	0.00	8.74	12	9	10	10	11	3.26	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Layanan Prasarana Internal	Unit	94.77	0.00	0.00	94.77	0	10	20,024	15,585	4,584	0.00	30.32	10.38	45.20	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	94.77	0.00	0.00	94.77	0	10	20,024	15,585	4,584	0.00	30.32	10.38	45.20	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Layanan Sarana Internal	Unit	66.47	0.00	0.00	66.47	6	14	216	9	12	7.84	15.33	13.98	6.95	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	66.47	0.00	0.00	66.47	6	14	216	9	12	7.84	15.33	13.98	6.95	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	24.34	0.00	0.00	24.34	0	1	1	1	1	0.00	3.97	6.86	7.50	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Paket	24.34	0.00	0.00	24.34	0	1	1	1	1	0.00	3.97	6.86	7.50	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	347.55	1.44	0.00	348.99	25	716	1,245	169	28	1.01	26.77	88.41	98.48	132.87	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Paket	347.55	1.44	0.00	348.99	25	716	1,245	169	28	1.01	26.77	88.41	98.48	132.87	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
000	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	34.27	0.00	0.00	34.27	44	43	41	41	42	6.79	6.43	6.82	7.01	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Udara	Layanan	10.92	0.00	0.00	10.92	16	16	16	16	16	1.89	1.91	2.29	2.37	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Udara	Layanan	2.37	0.00	0.00	2.37	5	5	5	5	5	0.40	0.48	0.48	0.49	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	kepegawaian Transportasi Udara	Layanan	4.14	0.00	0.00	4.14	7	7	7	7	7	0.61	0.86	0.86	0.89												

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)																
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP						
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
002	Layanan Prasarana Internal	Unit	175.40	0.00	0.00	175.40	2,420	2,420	6,671	6,549	2,230	7,418	19.90	63.92	56.62	13.97	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	175.40	0.00	0.00	175.40	2,420		6,671	6,549	2,230	7,418	19.90	63.92	56.62	13.97	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7AD	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Layanan Sarana Internal	Unit	26.83	0.00	0.00	26.83	2	9	4	5	2	0.58	10.37	6.84	6.19	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	26.83	0.00	0.00	26.83	2	9	4	5	2	0.58	10.37	6.84	6.19	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	33.28	0.00	0.00	33.28	1	1	1	1	1	2.50	10.32	6.26	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Paket	33.28	0.00	0.00	33.28	1	1	1	1	1	2.50	10.32	6.26	8.20	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	578.55	0.00	0.00	578.55	2	13	15	9	9	6.00	186.00	105.17	245.13	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Paket	578.55	0.00	0.00	578.55	2	13	15	9	9	6.00	186.00	105.17	245.13	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																						
009	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	26.90	0.00	0.00	26.90	42	37	38	38	38	4.50	4.66	5.53	5.92	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Udara	Layanan	7.23	0.00	0.00	7.23	19	19	20	20	20	0.90	1.08	1.59	1.75	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Udara	Layanan	1.15	0.00	0.00	1.15	5	5	5	5	5	0.20	0.20	0.22	0.25	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	kepegawaian Transportasi Udara	Layanan	2.29	0.00	0.00	2.29	7	7	7	7	7	0.96	0.29	0.32	0.35	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Udara	Layanan	16.23	0.00	0.00	16.23	11	6	6	6	6	2.43	3.09	3.40	3.57	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Layanan Perkantoran	layanan	64.06	54.74	0.00	118.80	2	2	2	2	2	12.60	12.49	12.73	12.99	13.25	8.63	11.35	11.47	11.58	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Udara	layanan	28.07	0.00	0.00	28.07	1	1	1	1	1	5.50	5.48	5.59	5.70	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Udara	layanan	35.99	54.74	0.00	90.73	1	1	1	1	1	7.11	7.01	7.15	7.29	7.44	8.63	11.35	11.47	11.58	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	BPK CURUG		436.42	55.45	0.00	491.86						42.63	96.29	108.25	81.84	107.42	9.48	13.62	10.77	10.73	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	71.25	55.22	0.00	126.47	2,885	2,353	2,481	2,502	2,740	14.05	14.41	12.95	14.08	15.76	9.48	13.56	10.71	10.67	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	47.21	55.22	0.00	102.43	1,840	1,618	1,716	1,702	1,800	7.69	10.42	8.76	9.75	10.59	9.48	13.56	10.71	10.67	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	24.04	0.00	0.00	24.04	1,045	735	765	800	940	6.36	3.99	4.18	4.33	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	5.22	0.00	0.00	5.22	57	68	68	68	68	1.00	0.90	1.00	1.10	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	1.23	0.00	0.00	1.23	4	15	15	15	15	0.09	0.26	0.28	0.30	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	3.98	0.00	0.00	3.98	53	53	53	53	53	0.91	0.65	0.73	0.81	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	79.99	6.97	0.00	86.97	178	178	178	178	178	9.02	11.78	19.25	19.52	20.42	1.39	1.39	1.39	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	25.01	0.00	0.00	25.01	860	940	1,000	1,020	1,040	5.47	4.23	4.75	5.10	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	13.59	0.00	0.00	13.59	6	150	151	178	179	0.60	2.89	3.06	3.47		3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	7.69	0.00	0.00	7.69	6	27	28	38	39	0.60	1.51	1.67	1.90	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	5.90	0.00	0.00	5.90	0																				
008	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	15.95	28.25	0.00	44.24	192	240	288	312	288	1.83	3.12	3.67	3.67	3.67	3.51	5.61	6.16	6.86	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	15.95	18.04	0.00	34.00	144	192	216	216	216	1.83	3.12	3.67	3.67	3.67	2.45	3.49	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	10.25	0.00	10.25	48	48	72	96	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	2.12	2.12	2.82	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	6.02	11.66	0.00	17.68	0	0	24	96	168	0.00	0.00	0.68	2.01	3.34	0.00	0.00	2.23	5.58	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	6.02	6.42	0.00	12.44	0	0	24	72	120	0.00	0.00	0.68	2.01	3.34	0.00	0.00	2.23	3.02	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara	Orang	0.00	5.25	0.00	5.25	0	0	0	24	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	Kesepakatan	2.82	0.00	0.00	2.82	4	4	4	4	4	0.39	0.40	0.56	0.67	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	Kesepakatan	2.82	0.00	0.00	2.82	4	4	4	4	4	0.39	0.40	0.56	0.67	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Data dan Informasi Publik	Layanan	3.08	0.00	0.00	3.08	4	4	4	4	4	0.49	0.50	0.66	0.68	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara	Layanan	0.54	0.00	0.00	0.54	2	2	2	2	2	0.07	0.08	0.11	0.13	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																					
009	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Layanan	2.54	0.00	0.00	2.54	2	2	2	2	2	0.42	0.42	0.55	0.55	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	4.71	0.00	0.00	4.71	6	8	8	9	9	0.58	0.92	0.92	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	NSPK	4.71	0.00	0.00	4.71	6	8	8	9	9	0.58	0.92	0.92	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Layanan Prasarana Internal	Unit	245.95	0.00	0.00	245.95	3,400	11,401	4,235	8,026	16,030	9.35	105.24	43.06	40.81	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	245.95	0.00	0.00	245.95	3,400	11,401	4,235	8,026	16,030	9.35	105.24	43.06	40.81	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Layanan Sarana Internal	Unit	3.76	0.00	0.00	3.76	62	1	0	0	0	2.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	3.76	0.00	0.00	3.76	62	1	0	0	0	2.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	21.40	0.00	0.00	21.40	1	1	1	1	1	3.02	3.77	7.30	4.71	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Paket	21.40	0.00	0.00	21.40	1	1	1	1	1	3.02	3.77	7.30	4.71	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	165.20	0.00	0.00	165.20	200	203	295	206	205	0.47	12.16	50.86	65.41	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Paket	165.20	0.00	0.00	165.20	200	203	295	206	205	0.47	12.16	50.86	65.41	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00								</													

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)															PNBP				
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI				BLU					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024										
BMA	Data dan Informasi Publik	Layanan	8.22	0.00	0.00	8.22		5	5	5	5	0.48	1.65	1.83	2.03	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara	Layanan	2.19	0.00	0.00	2.19		1	1	1	1	0.13	0.44	0.49	0.54	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara	Layanan	1.29	0.00	0.00	1.29		2	2	2	2	0.20	0.21	0.25	0.29	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Layanan	4.74	0.00	0.00	4.74		2	2	2	2	0.15	0.99	1.09	1.20	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Layanan	6.18	0.00	0.00	6.18		15	3	3	3	0.44	1.12	1.31	1.53	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Modul dan bahan ajar Berbasis kompetensi Transportasi Udara	NSPK	6.18	0.00	0.00	6.18		15	3	3	3	0.44	1.12	1.31	1.53	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	377.06	0.00	0.00	377.06	7.970	18.713	30.235	9.400	1.328	47.47	56.82	108.72	150.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	377.06	0.00	0.00	377.06	7.970	18.713	30.235	9.400	1.328	47.47	56.82	108.72	150.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAD	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EAD	Layanan Sarana Internal	Unit	54.46	0.00	0.00	54.46	0	230	226	19	21	0.00	14.20	10.75	8.80	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	54.46	0.00	0.00	54.46	0	230	226	19	21	0.00	14.20	10.75	8.80	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Paket	25.98	0.00	0.00	25.98	0	1	1	1	1	0.00	5.39	8.45	8.54	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Paket	25.98	0.00	0.00	25.98	0	1	1	1	1	0.00	5.39	8.45	8.54	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TA4	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	1.724.28	2.52	0.00	1.726.80	31.883	75.829	123.080	37.843	5.405	142.40	287.16	428.34	651.89	214.48	0.41	0.45	0.50	0.55	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Paket	1.724.28	2.52	0.00	1.726.80	31.883	75.829	123.080	37.843	5.405	142.40	287.16	428.34	651.89	214.48	0.41	0.45	0.50	0.55	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EAD	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	65.05	3.33	0.00	68.38	38	37	37	37	37	4.90	12.96	14.26	15.68	17.25	0.40	0.66	0.71	0.76	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Udara	Layanan	10.40	3.33	0.00	13.73	19	19	19	19	19	0.90	2.05	2.25	2.48	2.73	0.40	0.66	0.71	0.76	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Udara	Layanan	13.44	0.00	0.00	13.44	5	5	5	5	5	0.33	2.83	3.11	3.42	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	kepegawaian Transportasi Udara	Layanan	13.68	0.00	0.00	13.68	9	8	8	8	8	1.22	2.69	2.95	3.25	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Udara	Layanan	27.52	0.00	0.00	27.52	5	5	5	5	5	2.46	5.40	5.94	6.54	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TA4	Layanan Perkantoran	Layanan	103.77	52.55	0.00	156.31	24	24	24	24	24	24.50	19.23	19.62	20.01	20.41	0.41	12.84	12.97	13.10	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Udara	Layanan	35.58	0.00	0.00	35.58	12	12	12	12	12	10.87	5.99	6.11	6.24	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Uda	Layanan	68.19	52.55	0.00	120.74	12	12	12	12	12	13.63	13.24	13.50	13.77	14.05	0.41	12.84	12.97	13.10	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	POLTEKBANG MEDAN		746.69	135.12	0.00	881.82						126.72	193.28	130.43	150.99	145.26	26.39	26.40	26.17	26.09	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasio	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
007	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	116.55	45.80	0.00	162.35	2.975	1.118	1.204	1.256	1.320	78.64	8.22	9.21	10.30	10.19	9.20	7.17	8.26	9.40	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara (Priori	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara (Priori	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara (Priorita	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	102.48	45.80	0.00	148.28	635	626	712	764	828	71.00	6.61	7.60	8.69	8.58	9.20	7.17	8.26	9.40	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas	Orang	14.07	0.00	0.00	14.07	2.340	492	492	492	492	7.64	1.61	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Priori	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EA3	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	11.64	0.00	0.00	11.64	29	30	32	33	36	1.81	2.07	2.28	2.61	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00																										

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)															PNBP				
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP									
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
012	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi	Layanan	38.31	0.00	0.00	38.31	1	1	1	1	1	6.27	6.90	7.59	8.35	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Layanan Perkantoran	Layanan	102.48	31.71	0.00	134.19	24	24	24	24	24	24	25.06	18.78	19.16	19.54	19.93	0.00	7.81	7.89	7.97	7.97	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Udara	Layanan	37.79	0.00	0.00	37.79	12	12	12	12	12	12	12.12	6.23	6.35	6.48	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Udara	Layanan	64.69	31.71	0.00	96.40	12	12	12	12	12	12	12.94	12.55	12.81	13.06	13.32	0.00	7.81	7.89	7.97	7.97	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	POLTEKBANG PALEMBANG	Orang	431.28	68.08	0.00	499.36							54.36	152.90	85.78	69.46	68.79	9.29	23.70	11.50	12.24	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	84.58	44.85	0.00	129.43	478	639	658	639	658	7.37	8.34	7.36	7.69	9.31	7.90	10.48	8.88	9.01	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	16.20	0.00	0.00	16.20	1,460	400	400	400	400	8.48	1.93	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
022	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	8.70	0.00	0.00	8.70	2	4	2	2	2	1.32	2.11	1.59	1.75	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
009	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
015	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	8.24	0.00	0.00	8.24	2	3	2	2	2	1.32	1.66	1.59	1.75	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara yang Kompeten	Orang	0.45	0.00	0.00	0.45	0	1	0	0	0	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	24.67	11.48	0.00	36.15	100	160	220	280	260	1.65	4.03	5.68	6.65	6.67	1.28	1.90	2.51	3.12	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	21.68	8.79	0.00	30.47	60	120	180	240	260	1.10	2.87	4.74	6.30	6.67	0.61	1.23	1.84	2.45	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	2.99	2.68	0.00	5.68	40	40	40	40	40	0.54	1.15	0.94	0.35	0.00	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
022	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	11.22	0.00	11.22	0	48	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara	Orang	0.00	11.22	0.00	11.22	0	48	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
022	Kerjasama	Kesepakatan	0.84	0.00	0.00	0.84	1	1	1	1	1	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	Kesepakatan	0.84	0.00	0.00	0.84	1	1	1	1	1	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	Data dan Informasi Publik	Layanan	3.96	0.00	0.00	3.96	5	5	5	5	5	0.50	0.75	0.82	0.90	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara	Layanan	0.26	0.00	0.00	0.26	1	1	1	1	1	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara	Layanan	0.26	0.00	0.00	0.26	1	1	1	1	1	0.04	0.05	0.05	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Udara	Layanan	3.44	0.00	0.00	3.44	3	3	3	3	3	0.42	0.65	0.44	0.72	0.79	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	3.17	0.00	0.00	3.17	3	3	3	3	3	0.52	0.57	0.63	0.69	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	NSPK	3.17	0.00	0.00	3.17	3	3	3	3	3	0.52	0.57	0.63	0.69	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Layanan Prasarana Internal																														

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP				
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
009	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	49.64	34.68	0.00	84.32	380	406	479	504	552	10.63	7.64	9.25	10.18	11.96	5.13	6.13	7.16	7.63	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	23.92	0.00	23.92	554	464	490	508	492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	5.19	4.66	4.05	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Orang	28.31	34.33	0.00	62.64	384	504	504	480	456	5.92	7.07	6.44	4.62	4.25	5.69	7.46	7.82	6.57	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
009	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	3.26	0.00	3.26	0	0	0	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
011	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
012	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Udara	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
012	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi udara	Orang	0.00	3.26	0.00	3.26	0	0	0	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
AKC	Kerjasama	Kesepakatan	1.43	0.00	0.00	1.43	13	16	19	22	25	0.20	0.30	0.30	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	Kesepakatan	1.43	0.00	0.00	1.43	13	16	19	22	25	0.20	0.30	0.30	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BMK	Data dan Informasi Publik	Layanan	6.48	0.00	0.00	6.48	8	11	13	13	13	0.89	1.18	1.38	1.59	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Udara	Layanan	1.66	0.00	0.00	1.66	4	7	9	9	9	0.11	0.11	0.47	0.48	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Udara	Layanan	0.89	0.00	0.00	0.89	1	1	1	1	1	0.16	0.18	0.18	0.18	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat: Transporstasi Udara	Layanan	3.52	0.00	0.00	3.52	3	3	3	3	3	0.62	0.90	0.73	0.93	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AKA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	2.94	0.00	0.00	2.94	45	49	53	57	61	0.57	0.57	0.59	0.60	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Udara	NSPK	2.94	0.00	0.00	2.94	45	49	53	57	61	0.57	0.57	0.59	0.60	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
KAJ	Layanan Prasarana Internal	Unit	637.03	0.00	0.00	637.03	0	752	63,398	32,244	38,722	0.00	3.50	256.55	176.47	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	637.03	0.00	0.00	637.03	0	752	63,398	32,244	38,722	0.00	3.50	256.55	176.47	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAD	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
FAJ	Layanan Sarana Internal	Unit	20.78	0.00	0.00	20.78	170	68	5	68	3	1.71	6.84	3.29	6.74	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Udara	Unit	20.78	0.00	0.00	20.78	170	68	5	68	3	1.71	6.84	3.29	6.74	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	35.15	0.00	0.00	35.15	0	1	1	1	1	0.00	10.69	9.12	7.50	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Paket	35.15	0.00	0.00	35.15	0	1	1	1	1	0.00	10.69	9.12	7.50	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KAJ	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	175.21	0.00	0.00	175.21	0	450	200	0	200	0.00	72.13	77.68	13.50	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Paket	175.21	0.00	0.00	175.21	0	450	200	0	200	0.00	72.13	77.68	13.50	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BAJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
ESJ	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	25.25	0.39	0.00	25.64	61	61	61	61	61	4.46	4.58	5.18	5.40	5.64	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Udara	Layanan	4.93	0.00	0.00	4.93	17	17	17	17	17	0.93	0.97	0.99	1.01	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Udara	Layanan	0.78	0.00	0.00	0.78	5	5	5	5	5	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	kepegawaian Transportasi Udara	Layanan	5.77	0.39	0.00	6.16	8	8	8	8	8	0.86	0.90	1.31	1.34	1.37	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Udara	Layanan	13.77	0.00	0.00	13.77	31	31	31	31	31	2.52	2.56	2.72	2.89	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAJ	Layanan Perkantoran	layanan	133.43	52.86	0.00	186.29	2	2	2	2	2	24.45	26.44	26.97	27.51	28.06	9.28	10.73	10.84	10.95	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Udara	layanan	61.75	0.00	0.00	61.75	1	1	1	1	1	10.13	12.52	12.77	13.03	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Uda	layanan	71.68	52.86	0.00	124.54	1	1	1	1	1	14.32	13.92	14.19	14.48	14.77	9.28	10.73	10.84	10.95	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	STIP JAKARTA		1,064.32	533.46	0.00	1,597.78						208.57	199.73	211.18	222.91	221.93	76.37	109.43	110.06	115.80	121.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
BSJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	377.33	15.59	0.00	392.92																				

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME								RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)																PNBP				
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP													
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024									
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Paket	35.88	0.77	0.00	36.66																													
002	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	127.53	0.00	0.00	127.53	319	16	5	3	1,504	41.72	16.91	31.64	15.64	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Paket	127.53	0.00	0.00	127.53	319	16	5	3	1,504	41.72	16.91	31.64	15.64	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	47.77	2.55	0.00	50.33	1,426	1,432	1,432	1,432	1,432	8.79	9.75	9.75	9.75	9.75	0.51	0.51	0.52	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Laut	Layanan	2.69	2.44	0.00	5.13	20	20	20	20	20	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Laut	Layanan	0.54	0.00	0.00	0.54	4	4	4	4	4	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	kepegawaian Transportasi Laut	Layanan	31.67	0.00	0.00	31.67	1,399	1,405	1,405	1,405	1,405	6.63	6.26	6.26	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi	Layanan	12.87	0.11	0.00	12.99	3	3	3	3	3	1.51	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	Layanan Perkantoran	Layanan	333.28	220.31	0.00	553.58	2	2	2	2	2	66.02	64.84	66.14	67.46	68.81	43.07	43.65	44.09	44.53	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Laut	Layanan	101.95	0.00	0.00	101.95	1	1	1	1	1	19.33	20.05	20.45	20.86	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Laut	Layanan	231.33	220.31	0.00	451.63	1	1	1	1	1	46.69	44.80	45.69	46.61	47.54	43.07	43.65	44.09	44.53	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	PIP SEMARANG		1,734.21	664.21	0.00	2,398.42						109.06	572.58	425.38	243.68	383.50	112.00	134.44	136.78	137.09	143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
004	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	104.24	61.76	0.00	166.00	25,825	24,489	24,522	24,505	24,530	23.19	23.51	18.74	19.24	19.57	11.87	12.10	12.35	12.59	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	4.52	61.76	0.00	66.28	20,305	20,594	20,627	20,610	20,635	0.87	0.89	0.90	0.92	0.94	11.87	12.10	12.35	12.59	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	99.72	0.00	0.00	99.72	5,520	3,895	3,895	3,895	3,895	22.32	22.62	17.83	18.32	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
005	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	12.20	58.26	0.00	70.46	6,976	6,976	6,976	6,976	6,976	2.34	2.39	2.44	2.49	2.54	11.20	11.42	11.65	11.88	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut	Orang	0.00	40.55	0.00	40.55	432	432	432	432	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79	7.95	8.11	8.27	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut	Orang	0.00	15.43	0.00	15.43	874	874	874	874	874	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	3.02	3.08	3.15	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut	Orang	0.00	2.28	0.00	2.28	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.45	0.46	0.46	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	12.20	0.01	0.00	12.21	20	20	20	20	20	2.34	2.39	2.44	2.49	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																													
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	154.90	260.56	0.00	415.45	2,019	2,019	2,004	2,028	2,040	32.18	29.76	30.26	31.05	31.65	46.01	51.95	53.02	52.04	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	123.68	105.11	0.00	228.79	696	480	480	480	480	26.86	23.49	23.96	24.44	24.93	20.20	20.60	21.01	21.43															

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)															
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003B	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	16.29	58.64	0.00	74.93	1,249	1,981	3,641	3,818	3,598	2.56	3.30	3.32	3.55	3.57	10.65	10.40	11.18	13.16	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut	Orang	0.00	34.24	0.00	34.24	570	550	570	670	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	5.20	5.59	6.58	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut	Orang	0.00	14.73	0.00	14.73	350	350	740	840	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	3.12	3.35	3.95	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut	Orang	0.00	9.67	0.00	9.67	300	1,050	2,300	2,275	2,225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	2.08	2.24	2.63	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	16.29	0.00	0.00	16.29	29	31	31	33	33	2.56	3.30	3.32	3.55	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003B	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	75.21	37.03	0.00	112.24	2,830	2,602	2,399	2,138	2,230	21.72	16.00	14.51	10.80	12.17	5.85	8.95	7.82	6.41	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	64.82	0.32	0.00	65.14	1,514	1,165	1,129	1,042	1,078	17.02	11.99	12.84	10.80	12.17	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	36.71	0.00	36.71	1,004	1,125	1,126	1,096	1,152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79	8.88	7.76	6.34	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	10.39	0.00	0.00	10.39	312	312	144	0	0	4.70	4.02	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)															PNBP				
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024											
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15	2	2	2	2	2	2	2.6461	2.9107	3.2018	3.522	3.8742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	NSPK	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15	2	2	2	2	2	2	2.65	2.91	3.20	3.52	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
TAAD	Layanan Prasarana Internal	Unit	164.32	0.00	0.00	0.00	164.32	0	6,779	1,444	1,250	0	0.00	142.77	11.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit	164.32	0.00	0.00	0.00	164.32	0	6,779	1,444	1,250	0	0.00	142.77	11.55	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAD	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EAD	Layanan Sarana Internal	Unit	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	0	53	26	25	24	0.00	5.89	0.63	1.68	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit	8.78	0.00	0.00	0.00	8.78	0	53	26	25	24	0.00	5.89	0.63	1.68	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAR	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	34.74	0.00	0.00	0.00	34.74	0	419	13	220	224	0.00	22.97	10.77	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Paket	34.74	0.00	0.00	0.00	34.74	0	419	13	220	224	0.00	22.97	10.77	0.40	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EAD	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	98.94	0.00	0.00	0.00	98.94	0	439	413	200	200	0.00	92.62	4.10	0.20	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Paket	98.94	0.00	0.00	0.00	98.94	0	439	413	200	200	0.00	92.62	4.10	0.20	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EAD	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	102.11	0.00	0.00	0.00	102.11	7	2	2	2	2	16.73	18.40	20.24	22.26	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Laut	Layanan	6.67	0.00	0.00	0.00	6.67	4	2	2	2	2	1.09	1.20	1.32	1.46	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Laut	Layanan	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	1	0	0	0	0	0.36	0.39	0.43	0.47	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	kepegawaian Transportasi Laut	Layanan	35.54	0.00	0.00	0.00	35.54	1	0	0	0	0	5.82	6.40	7.04	7.75	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Laut	Layanan	57.72	0.00	0.00	0.00	57.72	1	0	0	0	0	9.45	10.40	11.44	12.58	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EAD	Layanan Perkantoran	Layanan	105.81	0.00	0.00	0.00	105.81	24	24	24	24	24	20.03	20.81	21.23	21.65	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Laut	Layanan	34.60	0.00	0.00	0.00	34.60	12	12	12	12	12	5.97	6.94	7.08	7.23	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Laut	Layanan	71.21	0.00	0.00	0.00	71.21	12	12	12	12	12	14.06	13.87	14.14	14.43	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	POLITEKPEL BANTEN		1,162.61	248.83	0.00	0.00	1,411.43						286.18	254.98	217.90	187.34	216.21	49.77	49.77	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
TAEB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	249.24	23.87	0.00	0.00	273.12	12,828	10,809	12,310	12,694	12,694	45.41	48.58	48.34	51.64	55.28	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyeragaman Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	76.29	23.87	0.00	0.00	100.16	3,078	3,078	3,510	3,894	3,894	15.15	15.29	15.29	15.29	15.29	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	172.95	0.00	0.00	0.00	172.95	9,750	7,731	8,800	8,800	8,800	30.26	33.29	33.05	36.36	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																									
TAEB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	10.40	47.03	0.00	0.00	57.43	2,280	2,280	2,280	2,28																					

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)																
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI				BLU					PNBP							
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
20	POLTEKPEL SURABAYA		812.38	554.26	0.00	1,366.63							98.66	298.22	136.11	136.98		142.40	105.00	108.80	111.14	113.48	115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
003	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
004	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
005	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	151.46	60.30	0.00	211.76	28,612	28,340	27,923	28,801	29,334	34.30	27.10	29.59	33.74		37.12	11.08	11.76	12.12	12.49	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
007	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
008	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
009	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	60.30	0.00	60.30	17,312	17,840	18,368	18,896	19,429	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11.08	11.76	12.12	12.49	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	151.86	0.00	0.00	151.86	11,300	10,500	9,555	9,905	9,905	24.30	27.10	29.59	33.74		37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
012	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
013	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	6.78	96.77	0.00	103.55	6,468	6,852	6,808	6,808	6,904	1.08	1.42	1.42	1.42		1.42	16.78	18.45	20.76	20.76	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut	Orang	0.00	87.08	0.00	87.08	1,056	1,104	1,296	1,296	1,392	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	14.99	15.95	18.96	18.96	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut	Orang	0.00	8.38	0.00	8.38	912	1,248	912	912	912	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.53	2.24	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut	Orang	0.00	1.31	0.00	1.31	4,472	4,472	4,572	4,572	4,572	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
018	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
019	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	6.78	0.00	0.00	6.78	28	28	28	28	28	1.08	1.42	1.42	1.42		1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																						
021	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	235.73	221.44	0.00	457.16	1,671	1,679	1,680	1,728	1,944	36.46	46.38	50.03	49.29		53.57	38.68	44.76	44.12	45.76	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	191.06	89.68	0.00	280.74	756	408	456	504	600	31.52	37.37	39.21	39.34		43.62	18.21	16.43	16.99	19.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	2020	RUPIAH MURNI				BLU					PNBP					
													2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
004B	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Kerjasama	Kesepakatan	1.43	0.00	0.00	1.43																					
002	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut	Kesepakatan	1.43	0.00	0.00	1.43	4	12	12	12	12	12	0.17	0.30	0.31	0.32	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004B	Data dan Informasi Publik	Layanan	4.00	0.00	0.00	4.00	3	4	3	3	3	3	0.68	1.10	0.72	0.74	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Data Peserta dan Penyerapan Lunasan Diklat Transportasi Laut	Layanan	1.20	0.00	0.00	1.20	2	2	2	2	2	2	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																					
008	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Trasportasi Laut	Layanan	2.80	0.00	0.00	2.80	1	2	1	1	1	1	0.48	0.88	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004B	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	1.77	0.00	0.00	1.77	6	6	6	6	6	6	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	NSPK	1.77	0.00	0.00	1.77	6	6	6	6	6	6	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit	100.21	0.00	0.00	100.21	1	1	1	1	1	1	3.18	23.17	27.30	14.63	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Layanan Sarana Internal	Unit	2.00	0.00	0.00	2.00	0	2	1	1	1	1	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit	2.00	0.00	0.00	2.00	0	2	1	1	1	1	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004B	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	42.34	0.00	0.00	42.34	320	388	799	103	107	107	4.49	12.89	8.57	9.71	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut. (Prioritas Nasional)	Paket	42.34	0.00	0.00	42.34	320	388	799	103	107	107	4.49	12.89	8.57	9.71	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004B	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	7.70	0.00	0.00	7.70	0	1	1	1	1	0	0.00	2.00	0.88	3.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Paket	7.70	0.00	0.00	7.70	0	1	1	1	0	0	0.00	2.00	0.88	3.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0																								

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)																			
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI				BLU					PNBP					2020	2021	2022	2023	2024	
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024					
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
CBU	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
E001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	49.00	23.69	0.00	72.69		15	97	97	97	70	5.42	8.28	9.51	11.52	14.28	5.79	5.28	5.27	4.32	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Laut	Layanan	4.27	10.61	0.00	14.98	12	54	54	54	54		1.51	0.64	0.69	0.74	0.80	1.51	1.75	2.06	2.42	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Laut	Layanan	5.86	0.00	0.00	5.86	1	3		3			0.88	1.18	1.28	1.22	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	kepegawian Transportasi Laut	Layanan	19.06	6.80	0.00	25.85		12	12	12	12		1.24	3.32	3.92	4.15	6.44	1.38	1.74	1.61	1.90	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi	Layanan	19.71	6.28	0.00	26.00		1	28	28	28	1	1.78	3.14	3.63	5.41	5.75	2.90	1.78	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAS	Layanan Perkantoran	layanan	88.63	163.13	0.00	251.77	2	2	2	2	2	2	17.75	17.20	17.54	17.89	18.25	25.58	33.88	34.21	34.56	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Laut	layanan	36.75	0.00	0.00	36.75		1	1	1	1	1	7.51	7.10	7.24	7.38	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Lau	layanan	51.88	163.13	0.00	215.01	1	1	1	1	1	1	10.24	10.10	10.30	10.51	10.72	25.58	33.88	34.21	34.56	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z3	BPPTL JAKARTA		737.96	245.65	0.00	983.62							108.64	142.75	134.46	157.90	194.21	32.00	46.65	50.64	55.56	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut (Prioritas Nasio	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
BE1	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
001	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	357.44	70.47	0.00	427.91	7,580	8,450	9,020	9,230	9,500	48.75	62.19	70.98	80.34	95.17	14.85	11.10	12.79	14.84	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut (Priorita	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut (Priorita	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut (Prioritas	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	279.64	70.47	0.00	350.11	6,180	7,050	7,620	7,830	8,100	38.3804	49.143	55.4422	61.8174	74.8545	14.8505	11.1035	12.7922	14.8389	16.8825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut(Prioritas Na	Orang	77.80	0.00	0.00	77.80	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	10.37	13.05	15.54	18.53	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Prioritas Na	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten (Priorita	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
001	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	4.95	131.38	0.00	136.33	1,620	1,868	1,988	2,228	2,298	0.00	1.02	1.13	1.25	1.55	17.07	24.78	26.97	29.73	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Laut	Orang	0.00	129.59	0.00	129.59	1,500	1,500	1,620	1,800	1,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.93	24.41	26.60	29.29	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut	Orang	0.00	1.80	0.00	1.80	120	360	360	420	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.37	0.37	0.44	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	4.95	0.00	0.00	4.95	0	8	8	8	8	10	0.00	1.02	1.13	1.25	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
001	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut (	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prior	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
001	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																									
KEC	Kerjasama	Kesepakatan	1.17	0.00	0.00	1.17	1	1	1	1	1	1	0.19	0.21	0.23	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Lau	Kesepakatan	1.17	0.00	0.00	1.17	1	1	1	1	1	1	0.19	0.21	0.23	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Data dan Informasi Publik	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Laut	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																									
005	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																									
008	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Laut	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																									
AFS	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	4.48	0.00	0.00	4.48	4	4		6	6	6	0.73	0.81	0.89	0.98	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	NSPK	4.48	0.00	0.00	4.48	4	4		6	6	6	0.73	0.81	0.89	0.98	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
EAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																									
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit</																													

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME								RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)																	
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP								
														2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
005	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Laut	Orang	0.00	0.69	0.00	0.69		216	216	216	216	216	216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
011	Diklat Teknis Bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
014	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
018	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	3.33	0.00	0.00	3.33	4	4	4	4	4	4	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
019	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Laut yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	67.83	67.39	0.00	135.22	1,085	1,085	1,085	1,085	1,085	21.36	11.62	11.62	11.62	11.62	11.62	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	58.70	50.71	0.00	109.41	903	903	903	903	903	19.54	9.79	9.79	9.79	9.79	9.79	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	9.13	16.69	0.00	25.81	182	182	182	182	182	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
008	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
005	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
006	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
007	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
008	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Laut	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Kerjasama	Kesepakatan	1.32	0.00	0.00	1.32	2	2	2	2	2	2	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut	Kesepakatan	1.32	0.00	0.00	1.32	2	2	2	2	2	2	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Data dan Informasi Publik	Layanan	6.00	0.00	0.00	6.00	1	1	1	1	1	1	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Laut	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																										
005	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Laut	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																										
008	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Laut	Layanan	6.00	0.00	0.00	6.00	1	1	1	1	1	1	0.60	0.90	1.20	1.50	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	4.73	0.00	0.00	4.73	7	7	7	7	7	7	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Laut	NSPK	4.73	0.00	0.00	4.73	7	7	7	7	7	7	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Layanan Prasarana Internal	Unit	3.00	0.00	0.00	3.00	0	1	0	0	0	0	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit	3.00	0.00	0.00	3.00	0	1	0	0	0	0	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Layanan Sarana Internal	Unit	5.46	0.00	0.00	5.46	0	2	0	1	0	0	0.00	3.82	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Laut	Unit	5.46	0.00	0.00	5.46	0	2	0	1	0	0	0.00	3.82	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	39.75	0.00	0.00	39.75	76	76	76	76	76	76	5.42	6.47	6.47	6.47	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Paket	39.75	0.00	0.00	39.75	76	76	76	76	76	76	5.42	6.47	6.47	6.47	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Paket	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
002	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																										
005	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	41.78	20.39	0.00	62.17	46	46	46	46	46	46	8.38	8.34	8.34	8.34	8.38	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Laut	Layanan	24.12	20.39	0.00	44.51	17	17	17	17	17	17	4.84	4.81	4.81	4.81	4.85	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Laut	Layanan	0.81	0.00	0.00	0.81	4	4	4	4	4	4	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007	kepegawaian Transportasi Laut	Layanan	11.79	0.00	0.00	11.79	22	22	22	22	22																					

[illegible]

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
001	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	134.41	49.89	0.00	184.30	5,786	5,786	5,786	5,786	5,786	22.02	24.22	26.64	29.30	32.23	7.50	9.28	10.10	11.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	49.89	0.00	49.89	960	960	960	960	960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	9.28	10.10	11.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	134.41	0.00	0.00	134.41	4,826	4,826	4,826	4,826	4,826	22.02	24.22	26.64	29.30	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
016	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
017	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	10.53	12.84	0.00	23.36	71	71	71	71	71	1.78	1.96	2.16	2.37	2.25	2.12	2.33	2.57	2.83	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	4.38	1.50	0.00	5.88	48	48	48	48	48	0.78	0.85	0.94	1.03	0.78	0.27	0.29	0.32	0.35	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
013	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
016	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	6.15	11.34	0.00	17.49	23	23	23	23	23	1.01	1.11	1.22	1.34	1.47	1.86	2.04	2.25	2.47	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	298.96	241.90	0.00	540.86	2,173	2,173	2,173	2,173	2,173	48.97	53.87	59.25	65.18	71.69	39.62	43.59	47.94	52.74	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	37.21	15.37	0.00	52.58	401	401	401	401	401	6.10	6.71	7.38	8.11	8.92	2.52	2.77	3.05	3.35	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	261.74	226.53	0.00	488.28	1,772	1,772	1,772	1,772	1,772	42.87	47.16	51.88	57.06	62.77	37.11	40.82	44.90	49.39	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
AKC	Kerjasama	Kesepakatan	3.88	0.00	0.00	3.88	5	5	5	5	5	5	0.75	0.78	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	Kesepakatan	3.88	0.00	0.00	3.88	5	5	5	5	5	5	0.75	0.78	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BM4	Data dan Informasi Publik	Layanan	8.58	0.00	0.00	8.58	7	6	6	5	4	2.46	2.05	1.98	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Data Peserta dan Penyerapan Lunasan Diklat Transportasi Darat	Layanan	1.50	0.00	0.00	1.50	1	1	1	1	1	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat	Layanan	2.75	0.00	0.00	2.75	2	2	2	2	2	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
007	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Darat	Layanan	4.33	0.00	0.00	4.33	4	3	3	2	1	1.61	1.20	1.13	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AKA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	18.62	0.00	0.00	18.62	20	5	11	5	11	4.18	3.01	4.21	3.01	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat	NSPK	18.62	0.00	0.00	18.62	20	5	11	5	11	4.18	3.01	4.21	3.01	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
EAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Darat	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
YAD	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Layanan Sarana Internal	Unit	16.38	0.00	0.00	16.38	4	27	27	27	27	3.16	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Darat	Unit	16.38	0.00	0.00	16.38	4	27	27	27	27	3.16	3.30	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AKA	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	143.56	0.00	0.00	143.56	1	1	1	1	1	9.73	33.33	28.96	37.70	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Paket	143.56	0.00	0.00	143.56	1	1	1	1	1	9.73	33.33	28.96	37.70	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AKA	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	1,400.43	0.00	0.00	1,400.43	2,372	17,319	3,396	5,636	1,761	26.64	358.28	311.24	386.77	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Paket	1,400.43	0.00	0.00	1,400.43	2,372	17,319	3,396	5,636	1,761	26.64	358.28	311.24	386.77	317.49	317.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ASB	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	74.56	0.00	0.00	74.56	74	70	73	70	73	18.23	13.88	14.28	13.88	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Darat	Layanan	15.08	0.00	0.00	15.08	18	18	18	18	18	2.98	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Darat	Layanan	1.26	0.00	0.00	1.26	4	4	4	4	4	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	kepegawaian Transportasi Darat	Layanan	30.54	0.00	0.00	30.54	26	22	25	22	25	9.54	5.05	5.45	5.05	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Darat	Layanan	27.67	0.00	0.00	27.67	26	26	26	26	26	5.45	5.56	5.56	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
EKA	Layanan Perkantoran	Layanan	134.42	0.00	0.00	134.42	2	2	2	2	2	24.90	26.57	27.10	27.65	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Darat	Layanan	53.78	0.00	0.00	53.78	1	1	1	1	1	8.98	10.87	11.09	11.31	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Darat	Layanan	80.64	0.00	0.00	80.64	1	1	1	1	1	15.92	15.70	16.02	16.34	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Z9	BPPTO MEMPAWAH		745.54	0.00	4.41	749.96					1		79.78	159.40	141.84	153.10	211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.41	0.00	0.00		
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
AKA	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	388.49	0.00	0.00	388.49	3,486	12,703	12,703	13,073	13,363	41.30	79.01	82.92	88.98	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	157.91	0.00	0.00	157.91	750	1,853	1,753	1,773	1,713	29.40	29.86	30.86	32.57	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
013	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	230.57	0.00	0.00	230.57	2,736	10,850	10,950	11,300	11,650	11.90	49.15	52.06	56.41	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
016	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
017	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
AKA	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	4.49	0.00	0.00	4.49	7	3	3	3	3	3	1.65	0.71	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																					
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00																							

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)				TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP				
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	35.06	0.00	0.00	35.06	31	31	31	31	31	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Darat	Layanan	6.84	0.00	0.00	6.84	17	17	17	17	17	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Darat	Layanan	1.26	0.00	0.00	1.26	4	4	4	4	4	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	kepegawaian Transportasi Darat	Layanan	16.01	0.00	0.00	16.01	5	5	5	5	5	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Darat	Layanan	10.95	0.00	0.00	10.95	5	5	5	5	5	2.19	2.19	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Layanan Perkantoran	Layanan	60.74	0.00	0.00	60.74	2	2	2	2	2	11.15	12.03	12.27	12.52	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Darat	Layanan	25.00	0.00	0.00	25.00	1	1	1	1	1	4.09	5.07	5.17	5.28	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Darat	Layanan	35.74	0.00	0.00	35.74	1	1	1	1	1	7.06	6.96	7.10	7.24	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	PKTJ TEGAL		600.89	198.20	0.00	799.09						92.57	103.24	151.11	115.93	138.04	34.08	39.25	39.88	41.37	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Bantuan Pendidikan Tinggi	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Diklat Pembentukan Beasiswa SDM Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	42.42	110.08	0.00	152.50	3,740	3,025	3,025	3,025	3,025	7.74	7.47	8.22	9.04	9.95	19.42	21.15	21.24	23.04	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	110.08	0.00	110.08	1,160	750	750	750	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	21.15	21.24	23.04	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	42.42	0.00	0.00	42.42	2,580	2,275	2,275	2,275	2,275	7.74	7.47	8.22	9.04	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
017	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Pelatihan Bidang Infrastruktur	Orang	19.62	0.00	0.00	19.62	32	37	37	37	37	2.76	3.63	4.00	4.40	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Diklat Peningkatan Kompetensi Penjenjangan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
013	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
016	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	Orang	19.62	0.00	0.00	19.62	32	37	37	37	37	2.76	3.63	4.00	4.40	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	140.99	84.28	0.00	225.27	1,054	1,103	1,135	1,105	1,110	19.80	23.24	29.40	31.91	36.64	14.07	17.31	17.83	17.51	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	50.15	21.35	0.00	71.50	339	268	240	300	330	10.23	6.85	9.06	11.20	12.81	4.45	3.81	3.42	4.59	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.47	11.51	0.00	11.97	175	145	115	55	30	0.25	0.09	0.06	0.04	0.02	3.61	3.12	2.60	1.36	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	90.38	51.42	0.00	141.79	540	690	780	750	750	9.32	16.30	20.28	20.68	23.81	6.01	10.38	11.81	11.56	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Kerjasama	Kesepakatan	0.56	0.47	0.00	1.03	5	3	3	3	3	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	Kesepakatan	0.56	0.47	0.00	1.03	5	3	3	3	3	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.09	0.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	Kesepakatan	0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	Kesepakatan	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Data dan Informasi Publik	Layanan	4.36	0.00	0.00	4.36	5	5	5	5	5	0.71	0.78	0.86	0.95	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Darat	Layanan	2.51	0.00	0.00	2.51	3	3	3	3	3	0.41	0.45	0.50	0.55	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat	Layanan	1.84	0.00	0.00	1.84	2	2	2	2	2	0.30	0.33	0.37	0.40	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Darat	Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	3.09	0.00	0.00	3.09	3	3	3	3	3	0.51	0.56	0.61	0.67	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat	NS																								

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
002	Diklat Peningkatan Kompetensi Pemutakhiran Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Diklat Peningkatan Kompetensi Penyebaran Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
010	Diklat Teknis Bidang Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
013	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
016	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	Orang		8.72	0.00	0.00	8.72	17	17	17	17	17	1.19	1.67	1.79	1.96	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Darat yang Kompeten	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang		68.41	34.97	0.00	103.38	432	144	216	216	216	8.56	9.03	15.12	17.85	17.85	5.67	3.77	5.22	9.23	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang		68.41	34.97	0.00	103.38	432	144	216	216	216	8.56	9.03	15.12	17.85	17.85	5.67	3.77	5.22	9.23	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
005	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Diklat Pembentukan Reguler (non Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
002	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
004	Pendidikan Strata II (S-2) Terapan Transportasi Darat	Orang		0.00	0.00	0.00	0.00																				
005	Kerjasama	Kesepakatan		3.28	0.00	0.00	3.28	2	2	2	2	2	0.54	0.59	0.65	0.71	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Darat	Kesepakatan		3.28	0.00	0.00	3.28	2	2	2	2	2	0.54	0.59	0.65	0.71	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Laut	Kesepakatan		0.00	0.00	0.00	0.00																				
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lembaga Transportasi Udara	Kesepakatan		0.00	0.00	0.00	0.00																				
004	Data dan Informasi Publik	Layanan		10.92	0.00	0.00	10.92	8	6	6	6	6	1.61	2.00	2.21	2.43	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Data Peserta dan Penyerapan Lulusan Diklat Transportasi Darat	Layanan		2.22	0.00	0.00	2.22	1	1	1	1	1	0.19	0.44	0.48	0.53	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Evaluasi Pasca Diklat Transportasi Darat	Layanan		6.74	0.00	0.00	6.74	4	2	2	2	2	1.10	1.22	1.34	1.47	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transportasi Darat	Layanan		1.95	0.00	0.00	1.95	3	3	3	3	3	0.32	0.35	0.39	0.43	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK		6.60	0.00	0.00	6.60	3	3	3	3	3	1.08	1.19	1.31	1.44	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Modul dan bahan ajar Berbasis kompetensi Transportasi Darat	NSPK		6.60	0.00	0.00	6.60	3	3	3	3	3	1.08	1.19	1.31	1.44	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Layanan Prasarana Internal	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Layanan Prasarana Internal	Unit		370.67	0.00	0.00	370.67	2,370	123,223	17,571	6,946	0	19.17	238.98	70.60	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Darat	Unit		370.67	0.00	0.00	370.67	2,370	123,223	17,571	6,946	0	19.17	238.98	70.60	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Layanan Sarana Internal	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Layanan Sarana Internal	Unit		107.45	0.00	0.00	107.45	2	6,699	8,167	1,238	0	4.66	72.71	25.68	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Darat	Unit		107.45	0.00	0.00	107.45	2	6,699	8,167	1,238	0	4.66	72.71	25.68	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Sarana Bidang Pendidikan	Paket		64.56	0.00	0.00	64.56	1	1	1	1	1	16.20	10.75	12.25	12.35	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Paket		64.56	0.00	0.00	64.56	1	1	1	1	1	16.20	10.75	12.25	12.35	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Sarana Bidang Pendidikan	Paket		266.41	0.00	0.00	266.41	1	1	1	1	1	0.00	114.25	10.35	23.90	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Paket		266.41	0.00	0.00	266.41	1	1	1	1	1	0.00	114.25	10.35	23.90	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Unit		0.00	0.00	0.00	0.00																				
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan		137.36	10.19	0.00	147.56	43	43	43	43	43	18.76	25.49	28.25	30.88	33.97	1.97	2.09	1.89	2.10	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Darat	Layanan		11.43	4.93	0.00	16.36	25	25	25	25	25	1.54	2.14	2.34	2.58	2.83	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Darat	Layanan		2.36	0.00	0.00	2.36	6	6	6	6	6	0.17	0.47	0.52	0.57	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	Kepegawaian Transportasi Darat	Layanan		24.38	0.00	0.00	24.38	10	10	10	10	10	3.93	4.52	4.88	5.30	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Darat	Layanan		99.19	5.27	0.00	104.46	2	2	2	2	2	13.12	18.36	20.52	22.44	24.76	1.01	1.10	0.90	1.11	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	Layanan Perkantoran	Layanan		104.00	0.40	0.00	104.40	2	2	2	2	2	16.19	21.31	21.73	22.17	22.61	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No	UPT/KRO/RO	Satuan	TOTAL PENDANAAN APBN 2020-2024 (Rp.Miliar)					TARGET VOLUME					RINCIAN SUMBER PENDANAAN (Rp.Miliar)														
			RM	BLU	PNBP	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI					BLU					PNBP					
												2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	NSPK	2.50	0.00	0.00	2.50	6	3	3	3	3	1.17	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Transportasi Darat	NSPK	2.50	0.00	0.00	2.50	6	3	3	3	3	1.17	0.33	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TAE	Layanan Prasarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Layanan Prasarana Internal	Unit	325.05	0.00	0.00	325.05	1,200	6,751	2,996	4,840	21,202	16.3836	151.9045	43.0441	51.651	62.0686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Prasarana Internal Perkantoran Transportasi Darat	Unit	325.05	0.00	0.00	325.05	1,200	6,751	2,996	4,840	21,202	16.38	151.90	43.04	51.65	62.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TAD	Layanan Sarana Internal	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Layanan Sarana Internal	Unit	25.59	0.00	0.00	25.59	245	560	350	361	360	9.634	4.1759	3.4869	4.4929	3.8039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Sarana Internal Perkantoran Transportasi Darat	Unit	25.59	0.00	0.00	25.59	245	560	350	361	360	9.63	4.18	3.49	4.49	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SBA	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	63.67	0.00	0.00	63.67	1	1	1	1	1	18.303173	8.270173	11.415173	11.837673	13.84272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Paket	63.67	0.00	0.00	63.67	1	1	1	1	1	18.30	8.27	11.42	11.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	70.25	0.00	0.00	70.25	19	4	34	14	1	0	66.60528	0	0	3.64532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Paket	70.25	0.00	0.00	70.25	19	4	34	14	1	0.00	66.61	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (Prioritas Nasional)	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat	Unit	0.00	0.00	0.00	0.00																					
001	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	42.64	0.00	0.00	42.64	66	40	40	40	40	10.06	7.54	7.54	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	Rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Transportasi Darat	Layanan	11.63	0.00	0.00	11.63	17	13	13	13	13	2.26	1.99	1.99	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002	Pemantauan dan evaluasi Transportasi Darat	Layanan	3.05	0.00	0.00	3.05	14	10	10	10	10	0.49	0.59	0.59	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	kepegawainan Transportasi Darat	Layanan	11.29	0.00	0.00	11.29	20	10	10	10	10	2.59	1.98	1.98	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Layanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Transportasi Darat	Layanan	16.67	0.00	0.00	16.67	15	7	7	7	7	4.72	2.99	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TAD	Layanan Perkantoran	layanan	155.82	0.85	0.00	156.67	2	2	2	2	2	33.07	29.78	30.38	30.99	31.61	0.12	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003	Gaji dan Tunjangan Pendidikan SDM Transportasi Darat	layanan	66.25	0.00	0.00	66.25	1	1	1	1	1	15.38	12.34	12.59	12.84	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendidikan SDM Transportasi Darat	layanan	89.57	0.85	0.00	90.41	1	1	1	1	1	17.69	17.44	17.79	18.15	18.51	0.12	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	